



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 1.6 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang mendesak dan memerlukan langkah penanganan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, sehingga diperlukan langkah penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman dengan menyusun rencana penanggulangan kemiskinan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan arah kebijakan, program dan kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabaran dari strategi dan program kebijakan penanggulangan kemiskinan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanangulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2021-2026.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumberdaya alam, rasa aman dan partisipasi.
2. Kemiskinan adalah keadaan orang atau keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
3. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan serta program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
5. Basis Data Terpadu yang terintegrasi dalam Sistem Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat BDT adalah sistem data elektronik yang berisi nama, alamat, nomor induk kependudukan dan keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu dengan tingkat kesejahteraan terendah, yang menjadi acuan utama penetapan sasaran

program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah.

6. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
7. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPK Daerah adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman.
8. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan, untuk periode 5 (lima) tahun dengan sasaran rumah tangga dan individu dalam basis data terpadu (BDT) yang terintegrasi dalam system informasi penanggulangan kemiskinan dan/atau data terpadu fakir miskin yang merupakan penjabaran dari Isu strategis dan Indikator Kinerja Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
9. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
11. Bupati adalah Bupati Sleman.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud penyusunan RPKD adalah untuk:

- a. menetapkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan sasaran masyarakat miskin dan/atau rentan miskin yang terintegrasi dalam BDT; dan

- b. memandu intervensi program dan kegiatan dari Perangkat Daerah pelaksana penanggulangan kemiskinan secara terpadu, terarah dan terstruktur.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyusunan RPKD adalah untuk:

- a. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh semua pihak, untuk mengatasi kemiskinan di Daerah; dan
- b. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung tujuan pembangunan nasional.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II KONDISI UMUM DAERAH;
 - c. BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH;
 - d. BAB IV PRIORITAS PROGRAM;
 - e. BAB V LOKASI PRIORITAS KEMISKINAN; dan
 - f. BAB VI PENUTUP
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat latar belakang dan landasan hukum penyusunan RPKD.
- (3) Kondisi Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat kondisi umum Daerah yang meliputi kondisi perekonomian, kondisi geografis, kondisi demografis, akses pelayanan publik, dan informasi sosial budaya yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
- (4) Profil Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat tentang kondisi kemiskinan di Daerah yang meliputi kondisi kemiskinan konsumsi dan kemiskinan non konsumsi.

- (5) Prioritas Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat (2) dua bagian yaitu bagian prioritas intervensi program penanggulangan kemiskinan di Daerah Tahun 2021-2026 dan bagian analisa anggaran berisi uraian tentang potensi sumber dana yang dikelola Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- (6) Lokasi Prioritas Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan di Daerah tahun 2021-2026.
- (7) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat rangkuman mengenai tujuan, sasaran dan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman Periode 2021-2026 yang disajikan dalam matriks.

Pasal 5

RPKD Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD ditingkat Daerah dilakukan oleh Wakil Bupati selaku Ketua TKPK;
- (2) Hasil Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD ditingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati selaku penanggungjawab TKPK Daerah dan ditembuskan kepada Gubernur selaku penanggung jawab TKPK Tingkat Provinsi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

Pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 1.6

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 1.6 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH TAHUN
2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat global. Perserikatan Bangsa Bangsa telah menjadikan masalah kemiskinan sebagai masalah bersama yang harus ditangani bersama, yaitu melalui kesepakatan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang disepakatai pada tahun 2000. Selanjutnya pada tahun 2015 komitmen bersama tersebut diperbaharui menjadi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan menempatkan masalah penanggulangan kemiskinan pada urutan pertama dari tujuh belas tujuan yang disepakati.

Tujuan pertama SDGs adalah mengakhiri/menghapuskan kemiskinan dalam segala bentuknya di mana pun. Untuk mewujudkan tujuan tersebut telah ditetapkan lima target. *Pertama* pada tahun 2030 menghapuskan kemiskinan ekstrim bagi penduduk di mana pun, yaitu penduduk yang pengeluarannya kurang dari \$1.25 per hari. *Kedua*, pada tahun 2030 mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan dengan segala dimensinya menurut definisi nasional masing-masing negara. *Ketiga*, menerapkan sistem dan tindakan perlindungan sosial yang sesuai secara nasional untuk semua, termasuk yang paling dasar, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi masyarakat miskin dan rentan. *Keempat*, menjamin bahwa pada tahun 2030 semua laki-laki dan perempuan, khususnya penduduk yang miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber-sumber ekonomi, layanan dasar, kepemilikan dan penguasaan atas tanah dan bentuk-bentuk kekayaan lainnya, warisan, sumberdaya alam, teknologi baru yang layak, serta jasa keuangan termasuk jasa keuangan mikro. *Kelima*, pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam situasi rentan dan mengurangi keterpaparan dan kerentanan mereka terhadap

peristiwa iklim yang ekstrem serta guncangan dan bencana ekonomi, sosial dan lingkungan lainnya.

Pemerintah Indonesia juga menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai hal yang strategis. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) 2005-2025 dinyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Dinyatakan pula bahwa sejalan dengan proses demokratisasi, pemenuhan hak dasar rakyat diarahkan pada peningkatan pemahaman tentang pentingnya mewujudkan hak-hak dasar rakyat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) 2020-2024 upaya penanggulangan kemiskinan terdapat dalam kelompok pembangunan sumberdaya manusia (SDM). Terdapat tiga strategi pembangunan SDM, yaitu layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter. Upaya pengentasan kemiskinan merupakan bagian dari strategi pertama yakni penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial. Sasaran tahun 2024 dalam pengentasan kemiskinan adalah 40% rumah tangga miskin dan rentan memiliki aset produktif.

Dalam dokumen RPJM Nasional telah dimasukkan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*; SDGs) yang berjumlah 17 tujuan. Sebagaimana disebutkan di atas, tujuan pertama SDGs adalah mengakhiri/menghapuskan kemiskinan dalam segala bentuknya di mana pun. Dengan demikian terdapat sambungan antara kebijakan pada level nasional dengan kebijakan pada level global dalam hal upaya penanggulangan kemiskinan.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 Kabupaten Sleman juga telah dimasukkan upaya penanggulangan kemiskinan. Hal itu terdapat misi-5 yaitu membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya pada tujuan “menurunnya ketimpangan pendapatan, dengan sasaran menurunnya kemiskinan”.

Dari uraian di atas terlihat bahwa upaya penanggulangan kemiskinan merupakan hal yang menjadi perhatian pada semua level, yaitu global, nasional,

hingga lokal. Hal itu menunjukkan bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat mendesak untuk diatasi karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya yang sistematis, terfokus, terencana dan terkoordinasi. Salah satunya adalah dengan menyusun panduan yang dapat dijadikan rujukan bersama, yaitu berupa Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).

RPKD merupakan rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun. RPKD selanjutnya akan di implementasi oleh Perangkat Daerah dengan dukungan dari kalangan swasta dan masyarakat. Dalam kaitan itu diperlukan koordinasi agar setiap program dan kegiatan tepat sasaran, efektif, dan efisien. Di sini diperlukan peran aktif dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sleman sejak dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi dan revisi kebijakan selanjutnya.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) ini meliputi:

- a. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Sleman Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026.

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

Pada bab ini diuraikan gambaran tentang kondisi umum Kabupaten Sleman yang meliputi kondisi perekonomian, kondisi geografis, kondisi demografis, akses ke pelayanan publik, informasi sosial budaya yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, serta capaian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dalam lima tahun terakhir.

2.1. Perekonomian

Kondisi perekonomian Kabupaten Sleman dalam dokumen ini digambarkan dengan menyajikan data produk domestik regional bruto (PDRB), laju inflasi, indeks gini, dan indeks pembangunan manusia (IPM).

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang umum digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB adalah nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

Pengukuran kinerja pembangunan ekonomi daerah umumnya menggunakan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pergerakan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman selama 2016-2020 disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2. 1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia
Tahun 2016 – 2020 (%)



Sumber: BPS, 2021

Selama periode 2016-2019, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman berkecenderungan naik. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi turun tajam hingga pada angka -3,91%. Angka penurunan tersebut lebih dalam

dibanding provinsi maupun nasional. Pada gambar di atas terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman selama tahun 2016-2019 selalu lebih tinggi daripada laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data rinci perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman serta kabupaten/kota lain di Provinsi DIY ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1
Pertumbuhan Ekonomi ADHK di Provinsi DIY Tahun 2016-2020 (%)

Wilayah	2016	2017	2018	2019*	2020**
Kulon progo	4,76	5,97	10,83	13,49	-4,06
Bantul	5,05	5,10	5,47	5,53	-1,66
Gunung Kidul	4,88	5,01	5,16	5,34	-0,68
Sleman	5,22	5,34	6,42	6,48	-3,91
Yogyakarta	5,11	5,24	5,49	5,96	-2,42
DIY	5,07	5,27	6,16	6,57	-2,69
Indonesia	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07

*) angka sementara; **) angka sangat sementara
Sumber: BPS, 2021

Pertumbuhan sektor-sektor PDRB Kabupaten Sleman selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.2. Sektor yang tumbuh paling tinggi pada tahun 2020 adalah sektor jasa dan kegiatan sosial (20,02%), diikuti oleh sektor informasi dan komunikasi (19,99%). Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh negatif sebesar -1,62%.

Tabel 2. 2
Laju Pertumbuhan Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%) di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,67	1,17	1,53	1,67	5,05
B	Pertambangan dan Penggalian	0,43	0,2	8,93	5,78	-8,77
C	Industri Pengolahan	4,47	5,72	5,6	5,96	-3,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,27	3,93	2,27	5,83	-1,26
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,40	3,26	4,93	8,34	0,51
F	Konstruksi	4,77	7,05	13,11	12,42	-16,22
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,26	5,27	5,01	5,27	-5,12
H	Transportasi dan Pergudangan	7,39	5,38	8,07	-1,62	-33,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,98	6,10	6,77	9,12	-18,08
J	Informasi dan Komunikasi	8,19	6,37	6,17	7,89	19,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,04	2,82	7,17	8,72	-0,05
L	Real Estat	5,52	5,02	5,1	5,96	1,36
M,N	Jasa Perusahaan	3,55	5,81	5,52	7,03	-14,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,89	3,98	4,07	3,30	-2,02
P	Jasa Pendidikan	3,98	5,72	6,00	6,82	5,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,47	6,04	6,07	6,93	20,02

R,S, T,U	Jasa lainnya	5,24	5,58	4,85	5,83	-14,98
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,25	5,34	6,42	6,48	-3,91

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

Sumber: BPS, 2021

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga mengalami tantangan pada tahun 2020. Meskipun demikian, kinerja pertanian tetap bertumbuh 5,05%. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib bertumbuh dengan tren menurun, bahkan pada tahun 2020 tumbuh sebesar -2,03%. Selengkapnya, perkembangan PDRB Kabupaten Sleman selama 2016-2020 disajikan pada tabel 2.3 pada halaman berikut.

Tabel 2. 3
PDRB Kabupaten Sleman Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku
menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (juta rupiah)

Kategori	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.972.354,3	3.071.678,6	3.246.725,20	3.401.824,30	3.655.925,00
B	Pertambangan dan Penggalian	152.783,8	153.789,8	168.302,30	181.376,90	172.647,90
C	Industri Pengolahan	4.967.607,9	5.324.535,7	5.776.072,90	6.215.242,30	6.161.108,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	38.678,7	47.254,0	50.235,10	54.689,90	53.673,70
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.998,6	19.099,0	20.232,22	22.002,19	22.289,60
F	Konstruksi	3.961.585,0	4.379.154,3	5.161.187,77	5.967.725,33	5.035.656,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.894.590,8	3.160.936,4	3.433.151,50	3.694.961,13	3.581.912,40
H	Transportasi dan Pergudangan	2.688.158,8	2.972.225,7	3.362.652,70	3.342.219,60	2.088.475,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.775.147,6	4.122.801,9	4.449.710,20	4.930.570,10	4.051.028,90
J	Informasi dan Komunikasi	2.963.963,3	3.247.928,5	3.480.973,03	3.740.296,04	4.479.815,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.198.586,9	1.280.647,4	1.422.568,00	1.575.434,30	1.573.571,60
L	Real Estate	2.936.364,4	3.149.558,2	3.382.571,67	3.703.143,81	3.847.681,40
M,N	Jasa Perusahaan	616.791,5	668.865,1	724.570,92	797.827,16	704.439,60
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.524.427,4	2.786.354,1	2.985.695,56	3.157.205,65	3.201.881,40
P	Jasa Pendidikan	3.516.897,4	3.791.740,9	4.108.553,88	4.500.265,20	4.873.846,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	868.689,9	947.867,0	1.016.163,55	1.115.209,56	1.404.639,90
R,S, T,U	Jasa lainnya	838.216,8	923.426,9	989.677,36	1.068.210,78	924.894,30
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		33.826.505,4	36.932.843,2	43.779.043,70	47.468.204,30	45.833.487,60

*angka sementara; ** angka sangat sementara

Sumber : BPS, 2021

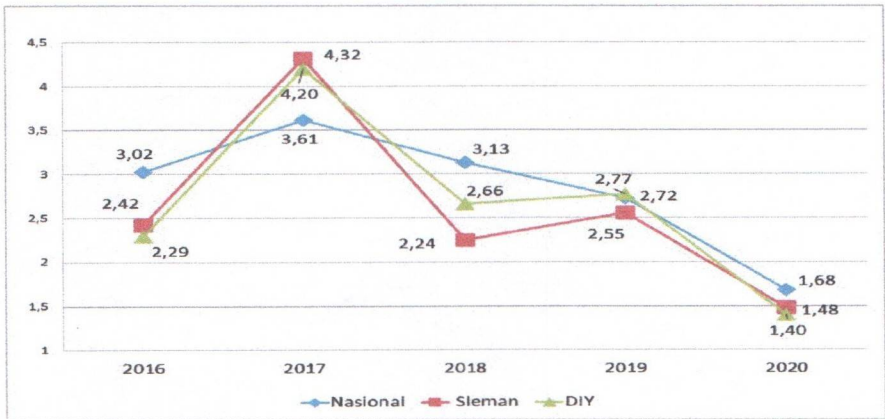
Sektor industri pengolahan memberikan andil yang cukup besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, sebesar 13,44%. Selain itu, sector industry mampu menyerap banyak tenaga kerja. Dua sektor lainnya yang mempunyai peran penting dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sleman adalah sektor

konstruksi (10,99%) dan sektor jasa pendidikan (10,63%). Pada tahun 2021 diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman akan menggeliat lagi dan tumbuh sebesar 2,71%.

2.1.2. Laju Inflasi

Secara sederhana inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang. Dengan demikian inflasi juga dapat dikatakan sebagai penurunan nilai mata uang. Tinggi rendahnya inflasi dipengaruhi antara lain oleh keseimbangan antara permintaan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*), biaya produksi suatu barang, nilai tukar, dan jumlah uang yang beredar. Tingginya inflasi berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat karena berpengaruh pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok. Perkembangan tingkat inflasi Kabupaten Sleman selama lima tahun dapat dilihat pada Gambar 2.2. Pada gambar tersebut terlihat bahwa pada tahun 2020 tingkat inflasi Kabupaten Sleman merupakan inflasi tahunan terendah, mencapai 1,48%. Inflasi terendah terjadi pada April 2020, sebesar -0,19%.

Gambar 2. 2
Tingkat Inflasi Kabupaten Sleman dan Indonesia
Tahun 2016 s.d 2020 (%)



Sumber: BPS, 2021

Keterangan lebih rinci mengenai inflasi pada masing-masing kelompok pengeluaran disajikan pada tabel 2.4. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2019 terdapat 3 (tiga) kelompok pengeluaran yang mengalami perbaikan, yang ditunjukkan dengan menurunnya laju inflasi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu bahan makanan, pendidikan, rekreasi dan olahraga serta transportasi dan komunikasi. Laju inflasi kelompok makanan-jadi, minuman, rokok dan tembakau serta kesehatan mengalami peningkatan hampir 2 (dua) kali lipat.

Tabel 2. 4
Perkembangan Tingkat Inflasi Bulanan Kabupaten Sleman
Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2016-2020 (%)

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bahan Makanan	4,77	2,71	3,46	1,55	1,42
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	3,84	2,79	2,51	4,36	2,72
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	1,64	5,63	2,01	2,07	0,53
4	Sandang	3,04	3,84	5,25	5,62	1,25
5	Kesehatan	4,17	2,76	1,21	3,84	0,33
6	Pendidikan, Rekreasi, & Olahraga	2,4	2,81	4,65	3,57	0,07
7	Transportasi dan Komunikasi	-2,06	6,72	2,43	0,58	-2,53

*) Inflasi Tahun Kalender Januari-September 2020
Sumber : BPS, 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020

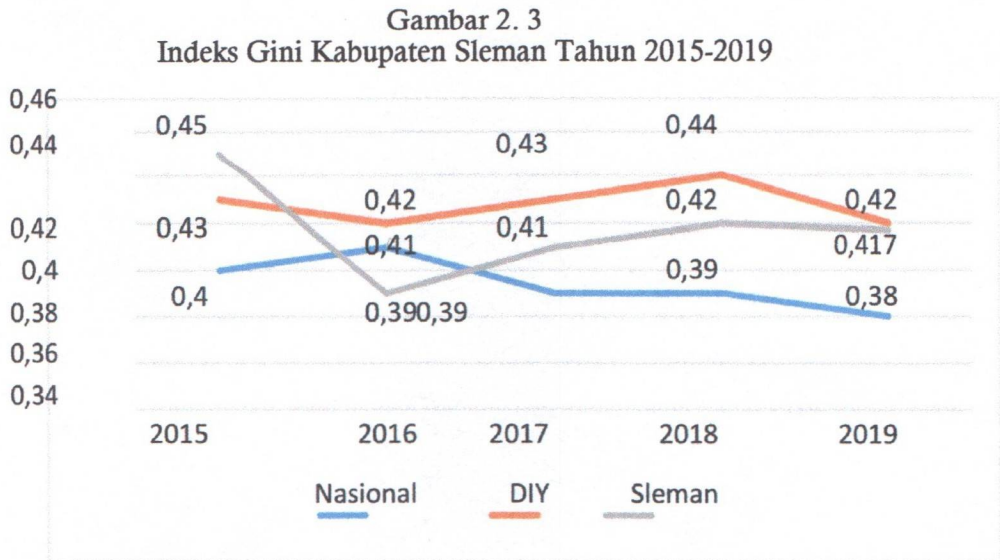
2.1.3. Indeks Gini

Indeks gini (*gini ratio*) merupakan alat ukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antarpenduduk suatu wilayah. Indeks gini menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah, $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi.

Selama tahun 2015-2019, indeks gini di Kabupaten Sleman berada pada ketimpangan sedang. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan penduduk di Kabupaten Sleman pada kurun waktu tersebut belum merata antara kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu penyebabnya adalah adanya polarisasi kepemilikan aset produktif dan dualisme ekonomi. Polarisasi kepemilikan aset menjadikan penduduk yang kaya memiliki kecepatan untuk meningkatkan kekayaan yang lebih tinggi karena memiliki aset produktif, sedangkan yang miskin kecepatan untuk meningkatkan perekonomiannya jauh lebih rendah. Aset produktif adalah sektor-sektor yang menghasilkan tingkat upah atau pendapatan yang tinggi, seperti hotel, bisnis otomotif dan properti. Di lain pihak, budaya *narima ing pandum* memberikan dampak yang besar, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

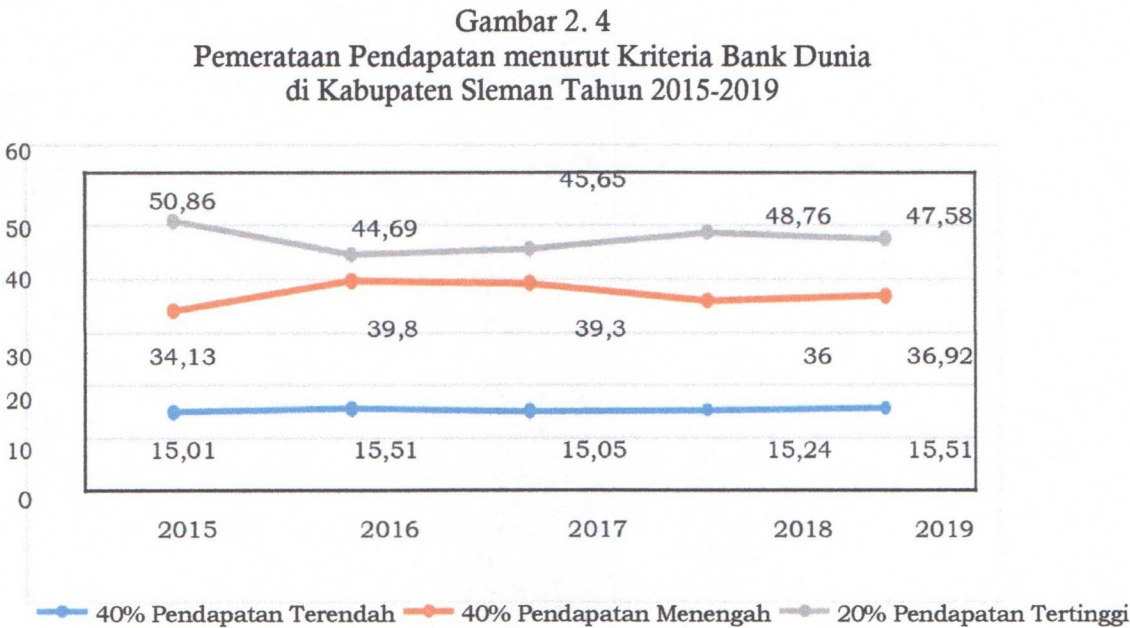
Pada tahun 2019, indeks gini di Kabupaten Sleman sebesar 0,417, lebih baik dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 0,42, yang berarti bahwa distribusi pendapatan antarpenduduk bergeser ke tengah. Indeks gini Indonesia dan DIY juga mengalami penurunan menjadi 0,38 dan 0,42. Meskipun terjadi

penurunan, DIY masih menjadi wilayah dengan kesenjangan tertinggi se-Indonesia. Perkembangan indeks gini dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Sumber: BPS, 2020

Kesenjangan pendapatan juga dapat diukur dengan menghitung persentase pendapatan penduduk dari 40% penduduk berpendapatan terendah dibandingkan dengan total pendapatan seluruh penduduk. Kelompok yang menjadi fokus dalam penghitungan berdasar kriteria Bank Dunia adalah kelompok 40% penduduk dengan pendapatan terendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok ini menunjukkan distribusi pendapatan penduduknya semakin merata.



Sumber: BPS, 2020

Gambar 2.4 memperlihatkan bahwa pada tahun 2019 kelompok 40% penduduk berpendapatan terendah di Kabupaten Sleman sebesar 15,51% dari total pendapatan penduduk, meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini dimungkinkan adanya keberhasilan dari program optimalisasi pemanfaatan

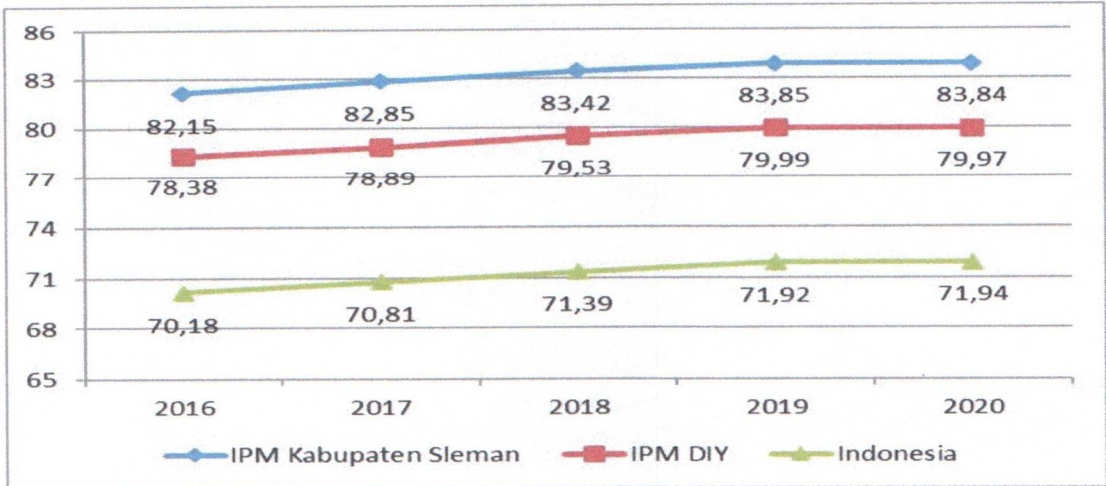
dan pengembangan potensi ekonomi lokal pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Sleman. Untuk 40% pendapatan menengah juga mengalami peningkatan menjadi 36,92%. Kelompok 20% penduduk pendapatan tertinggi mengalami penurunan menjadi 47,58%.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu gambaran tentang kemampuan penduduk dalam menikmati hasil pembangunan. IPM terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Komponen kesehatan diukur dari angka harapan hidup saat lahir (AHH), komponen pendidikan diukur dengan dua komponen yaitu harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS), sedangkan komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah).

Perkembangan capaian IPM Kabupaten Sleman selama periode 2016-2020 menunjukkan peningkatan dengan kategori sangat tinggi (>80). Pencapaian tersebut menempati peringkat kedua tertinggi di DIY setelah Kota Yogyakarta dan lebih tinggi dibandingkan IPM provinsi dan nasional. Di antara kabupaten/kota di Indonesia, Kabupaten Sleman memiliki fenomena unik, yakni merupakan satu-satunya kabupaten yang berstatus “sangat tinggi”, bahkan menempati peringkat 5 terbesar dan mampu bersaing dengan wilayah perkotaan. IPM Kabupaten Sleman pada tahun 2019 tercatat sebesar 83,85, pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi 83,84. Meskipun demikian, secara umum, perkembangan angka ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Sleman cukup maju, dan cukup komprehensif pada semua dimensi pembangunan manusia, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Data perbandingan IPM disajikan pada gambar 2.5.

Gambar 2. 5
Perkembangan IPM Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia
Tahun 2016– 2020



Sumber: BPS, 2020

Tingginya level IPM Kabupaten Sleman dan perkembangannya yang semakin baik tidak terlepas dari perkembangan indikator penyusunnya. Dari tahun ke tahun, seluruh dimensi yang membentuk IPM mengalami peningkatan, dapat dilihat dalam Tabel 2.5.

Tabel 2. 5
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

URAIAN		TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
Indikator penyusun IPM						
1	Angka harapan hidup (tahun)	74,6	74,63	74,69	74,77	74,81
2	Harapan lama sekolah (tahun)	16,08	16,48	16,71	16,72	16,73
3	Rata-rata lama sekolah (tahun)	10,64	10,65	10,66	10,67	10,91
4	Pengeluaran per kapita riil setahun disesuaikan (ribu rupiah)	14.921	15.365	15.844	16.434	15.926
Indeks IPM						
1	Indeks kesehatan	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
2	Indeks pendidikan	0,80	0,81	0,82	0,82	0,83
3	Indeks pengeluaran	0,82	0,83	0,84	0,85	0,84
IPM Kabupaten Sleman		82,15	82,85	83,42	83,85	83,84
IPM DIY		78,38	78,89	79,53	79,99	79,97
IPM Indonesia		70,18	70,81	71,39	71,92	71,94

Sumber: BPS, 2021

Indeks kesehatan merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah direpresentasikan dengan angka harapan hidup. Angka harapan hidup di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan harapan hidup bayi yang baru lahir semakin besar. Tingginya angka harapan hidup tidak lepas dari upaya pemerintah daerah yang konsisten meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana kesehatan dasar secara berjenjang, tenaga kesehatan, serta penolong persalinan. Di samping itu, upaya peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang layak, terjangkau, mudah, dan merata bagi semua

penduduk juga terus ditingkatkan sampai wilayah yang terpencil. Faktor lain yang turut berpengaruh terhadap tingginya umur harapan hidup adalah pola hidup sehat masyarakat.

Komponen rata rata lama sekolah (RLS) tahun 2020 di Kabupaten Sleman adalah 10,91 tahun. Hal ini relevan dengan distribusi penduduk Sleman menurut tingkat pendidikan, dimana sebagian besar penduduk Sleman (31,78%) berpendidikan SMA/ sederajat. Harapan lama sekolah (HLS) juga menunjukkan kenaikan, sebesar 16,73 tahun, yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D3. Ada perbedaan angka yang cukup besar antara RLS dan HLS. Hal ini dimungkinkan karena keberadaan penduduk berusia tua yang hanya mengenyam pendidikan dasar.

Dari sisi pengeluaran, penduduk Kabupaten Sleman antara tahun 2016-2019 mengalami peningkatan. Kondisi ini menggambarkan bahwa daya beli penduduk Sleman semakin membaik dan tingkat kesejahteraan penduduk secara rata-rata lebih baik dibandingkan dengan D.I Yogyakarta maupun nasional. Namun pada tahun 2020, akibat pandemi COVID-19 mengalami penurunan, berada pada angka Rp15.926.000,00.

2.2. Geografis

Kabupaten Sleman secara umum terbagi menjadi dua wilayah dataran, yaitu di bagian selatan berupa dataran rendah landai dengan dominasi persawahan, dan di bagian utara berupa dataran tinggi tanah kering dengan dominasi perkebunan serta memiliki permukaan miring ke selatan dengan titik tertinggi di puncak Gunungapi Merapi. Wilayah Kabupaten Sleman dapat dibedakan menurut karakteristik sumber daya, jalur lintas jalan raya, serta pusat pertumbuhan. Berdasarkan karakteristik sumber daya, Kabupaten Sleman terbagi menjadi empat wilayah yaitu:

- a. Wilayah Utara/lereng Gunungapi Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan Kapanewon Tempel, Kapanewon Pakem, dan Kapanewon Cangkringan (*ringbelt*) sampai dengan puncak Gunungapi Merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada aktivitas Gunungapi Merapi dan ekosistemnya.
- b. Wilayah Timur, meliputi Kapanewon Prambanan, sebagian Kapanewon Kalasan, dan Kapanewon Berbah. Wilayah ini merupakan tempat

peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata budaya, daerah lahan kering, serta sumber bahan batu putih.

- c. Wilayah Tengah, yaitu Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang meliputi Kapanewon Mlati, Kapanewon Sleman, Kapanewon Ngaglik, Kapanewon Ngemplak, Kapanewon Depok, dan Kapanewon Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.
- d. Wilayah Barat, meliputi Kapanewon Godean, Kapanewon Minggir, Kapanewon Seyegan, dan Kapanewon Moyudan, merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu, gerabah dan genteng.

Berdasarkan karakteristik jalur lintas antardaerah, wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Sleman dengan kota-kota pelabuhan utama yaitu Semarang, Surabaya, dan Jakarta. Jalur ini melewati wilayah Kapanewon Prambanan, Kapanewon Kalasan, Kapanewon Depok, Kapanewon Mlati, Kapanewon Tempel, dan Kapanewon Gamping. Selain itu, wilayah Kapanewon Depok, Kapanewon Mlati, dan Kapanewon Gamping juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer. Kecamatan-kecamatan tersebut menjadi wilayah yang cepat berkembang dari pertanian menjadi industri, perdagangan, dan jasa.

Pusat-pusat pertumbuhan di wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu Kota Yogyakarta. Berdasar letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut:

- a. Wilayah aglomerasi perkotaan (perkembangan kota dalam kawasan tertentu) yang merupakan perkembangan Kota Yogyakarta. Wilayah perkotaan yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta yaitu Kapanewon Depok, Kapanewon Gamping serta sebagian wilayah Kapanewon Ngaglik dan Kapanewon Mlati. Keempat wilayah tersebut merupakan Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY).
- b. Wilayah peri-urban/sub-urban (wilayah perbatasan antara desa dan kota) yang merupakan kota kecamatan di Kapanewon Godean, Kapanewon Sleman, dan Kapanewon Ngaglik terletak agak jauh dari Kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan kegiatan masyarakat di wilayah kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan.

- c. Wilayah fungsi khusus atau wilayah penyangga (*buffer zone*) meliputi Kapanewon Tempel, Kapanewon Pakem, dan Kapanewon Prambanan yang merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.
- d. Keadaan tanah Kabupaten Sleman bagian selatan relatif datar, kecuali daerah perbukitan Kapanewon Prambanan bagian tenggara dan sebagian Kapanewon Gamping. Keadaan tanah wilayah bagian utara umumnya miring dan wilayah sekitar lereng Gunungapi Merapi relatif terjal.
- e. Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara 100 meter sampai dengan 2.900 meter di atas permukaan laut (m d.p.l). Wilayah dengan ketinggian di bawah 250 m dpl seluas 35.065,09 ha, atau 61% dari luas wilayah, terdapat di hampir semua kecamatan, kecuali Kapanewon Turi, Kapanewon Pakem dan Kapanewon Cangkringan. Wilayah dengan ketinggian 250-500 m d.p.l seluas 13.877,65 ha atau 24,14% dari luas wilayah, terdapat di Kapanewon Prambanan, Kapanewon Kalasan, Kapanewon Ngemplak, Kapanewon Ngaglik, Kapanewon Sleman, Kapanewon Tempel, Kapanewon Turi, Kapanewon Pakem dan Kapanewon Cangkringan.

Wilayah dengan ketinggian 500-1.500 m d.p.l seluas 8.045,71 ha atau 14,00% dari luas wilayah, terdapat di Kapanewon Tempel, Kapanewon Turi, Kapanewon Pakem dan Kapanewon Cangkringan. Wilayah dengan ketinggian 1.500-2.500 m d.p.l seluas 467,38 ha atau 0,81% dari luas wilayah, terdapat di Kapanewon Pakem dan Kapanewon Cangkringan. Wilayah dengan ketinggian 2.500-2.900 m d.p.l seluas 26,17 ha atau 0,05% dari luas wilayah, juga hanya terdapat di Kapanewon Pakem dan Cangkringan. Untuk lebih lengkap, ketinggian wilayah di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Kondisi geologi di Kabupaten Sleman didominasi oleh keberadaan Gunungapi Merapi. Formasi geologi dibedakan menjadi endapan vulkanik dengan lebih dari 90% luas wilayah, sedimen, dan batuan terobosan. Material vulkanik Gunungapi Merapi berfungsi sebagai lapisan pembawa air tanah (akifer) yang sudah terurai menjadi material pasir vulkanik, yang sebagian besar merupakan bagian dari endapan vulkanik Merapi Muda. Material vulkanik Merapi Muda terdiri atas 2 unit formasi geologi yaitu Formasi Sleman di wilayah bagian bawah, didominasi oleh endapan piroklastik halus dan tufa dan Formasi Yogyakarta di wilayah bagian atas didominasi oleh pasir vulkanik berbutir kasar hingga pasir berkerikil. Formasi Sleman dan Formasi Yogyakarta berfungsi sebagai lapisan pembawa air utama yang sangat potensial dan membentuk satu

sistem akifer yang disebut Sistem Akifer Merapi (SAM). Sistem akifer tersebut menerus dari utara ke selatan dan secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. Selain formasi geologi tersebut, di Kabupaten Sleman juga terdapat formasi batu gamping muda, yaitu Formasi Sentolo di Kapanewon Gamping dan Formasi Semilir di Kapanewon Prambanan.

Berdasarkan jenis tanahnya, Kabupaten Sleman mempunyai jenis tanah yang sangat beragam. Jenis tanah tersebut antara lain *Andic hapludolls* seluas 11.227,98 ha (19,53%), *Typic eutropepts* seluas 7.189,32 ha (12,51%) serta *Andic dystropepts* seluas 5.856,50 ha (10,19%).

Sumber daya air di Kabupaten Sleman meliputi air hujan, air permukaan, serta air tanah. Air permukaan merupakan air sungai yang bersumber dari mata air di lereng Gunung Merapi. Kabupaten Sleman dilalui oleh beberapa sungai, yaitu Kali Progo, Kali Krasak, Kali Sempor, Kali Kuning, Kali Boyong, Kali Winongo, Kali Gendol, Kali Bedog dan Kali Opak, yang merupakan Sub-DAS Progo dan Sub-DAS Opak. Untuk aliran yang ke arah barat bermuara di Kali Progo, sedangkan untuk aliran yang ke arah timur bermuara di Kali Opak. Sungai-sungai tersebut bersifat permanen meskipun mengalami penurunan debit air pada musim kemarau.

Secara hidrologis, Kabupaten Sleman tidak pernah kekurangan air karena berkelimpahan air permukaan dan air tanah, ditambah dengan keberadaan Selokan Mataram yang melintang dari barat ke timur, mengalirkan air dari Kali Progo dan berakhir di Kali Opak. Untuk kondisi air tanah, kedalaman air tanah berkisar antara 7 meter sampai dengan 25 meter, namun banyak mengandung unsur besi (Fe) dan mangan (Mn).

Air tanah merapi yang mengalir di bawah permukaan secara rembesan bergerak menuju daerah yang lebih rendah terpotong oleh topografi, rekahan atau patahan maka akan muncul mata air. Terdapat empat jalur mata air (*springbelt*) di Kabupaten Sleman, yaitu jalur mata air Bebung, jalur mata air Sleman-Cangkringan, jalur mata air Ngaglik dan jalur mata air Yogyakarta. Jumlah mata air yang tersebar di Kabupaten Sleman secara keseluruhan berjumlah 182, namun hanya kisaran 150 mata air yang masih aktif. Mata air ini dimanfaatkan sebagai sumber air bersih maupun irigasi pertanian. Berdasarkan potensi hidrologi, bagian utara wilayah Sleman merupakan kawasan resapan air serta sebagian besar sangat cocok untuk budidaya

pertanian baik tanaman pangan maupun hortikultura, termasuk budidaya perikanan darat.

Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Yogyakarta, kondisi iklim di sebagian besar wilayah Kabupaten Sleman termasuk tropis basah. Pada tahun 2020, jumlah hari hujan terbanyak dalam satu bulan adalah 25 hari. Kecepatan angin maksimum 10,29 m/detik. Rata-rata kelembaban nisbi udara tertinggi 100% dan terendah 45%, sedangkan temperatur udara tertinggi 35,5°C dan terendah 17,5°C. Kondisi *agroklimatic* di atas menunjukkan bahwa iklim di wilayah Kabupaten Sleman pada umumnya cocok untuk pengembangan sektor pertanian.

Berdasarkan penggunaan lahannya, wilayah Kabupaten Sleman dibedakan menjadi kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung ditentukan dengan memperhatikan beberapa aspek, dalam rangka menjaga kelangsungan daerah yang berada di bawahnya. Kawasan lindung meliputi hutan lindung dan kawasan resapan air primer. Hutan lindung yang ada di wilayah Kabupaten Sleman yaitu Taman Nasional Gunung Merapi. Kawasan lindung juga meliputi sempadan sungai, yaitu wilayah yang berada di sekitar sungai.

Kawasan budi daya adalah kawasan atau wilayah yang tidak termasuk sebagai kawasan lindung. Kemiringan lahan menjadi salah satu syarat kawasan tersebut memungkinkan untuk kegiatan budi daya. Kegiatan budi daya tersebut antara lain berupa pertanian lahan basah, pertanian lahan kering serta pertanian tanaman tahunan.

Peruntukan permukiman juga dimungkinkan untuk dikembangkan pada kawasan budi daya di seluruh wilayah Kabupaten Sleman. Meskipun demikian, pengembangan permukiman harus memperhatikan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam rencana tata ruang, sehingga harus memperhatikan antara lain Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), jarak sempadan jalan dan sungai. Selain itu, wilayah sekitar Kapanewon Prambanan dan Berbah tidak dapat dibangun bangunan tinggi karena memperhatikan ketentuan keselamatan operasional penerbangan (KKOP).

Penggunaan lahan di Kabupaten Sleman secara garis besar dapat dibagi ke dalam penggunaan sawah, tegalan, dan pekarangan. Perkembangan penggunaan lahan selama 5 tahun terakhir menunjukkan luas dan jenis lahan sawah turun rata-rata sebesar 0,08% per tahun, luas pekarangan naik 0,12%,

luas tegalan dan lainnya turun 0,04% dari total luas wilayah Kabupaten Sleman.

Alih fungsi lahan yang terjadi mengakibatkan semakin berkurangnya luas lahan sawah dan tegalan, sementara tanah pekarangan semakin meningkat. Meskipun pada tahun 2019 lahan di Kabupaten Sleman masih didominasi oleh sawah sebesar 42,51% dan pekarangan di bawahnya, sebesar 32,90%, pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan langkah-langkah guna mengendalikan alih fungsi lahan dengan menetapkan Perda Pengendalian Lahan Pertanian dan Perkebunan Berkelanjutan (PLP2B). Selain menetapkan lahan pertanian berkelanjutan, program yang dilakukan adalah memperketat perizinan penggunaan lahan dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang.

Pemanfaatan lahan pekarangan di wilayah perkotaan (Wilayah Tengah), lebih tinggi daripada wilayah lereng gunungapi bagian utara. Hal ini merupakan konsekuensi dari jumlah penduduk dan kepadatan penduduk. Pada wilayah perkotaan, jumlah dan kepadatan penduduk tinggi, sehingga kebutuhan ruang untuk permukiman dan berbagai aktivitas ekonomi lebih tinggi daripada wilayah perdesaan.

Potensi bencana di Kabupaten Sleman dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu: bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Sleman sesuai dengan RTRW Kabupaten Sleman tahun 2012, adalah sebagai berikut: (1) Kawasan rawan bencana tanah longsor seluas 3.303 ha, meliputi Kapanewon Gamping dan Kapanewon Pramanan; (2) Kawasan rawan bencana kekeringan seluas 1.969 ha di Kapanewon Prambanan. Selain kedua jenis bencana tersebut, bencana yang sering melanda di Kabupaten Sleman adalah angin kencang atau angin puting beliung, petir serta banjir.

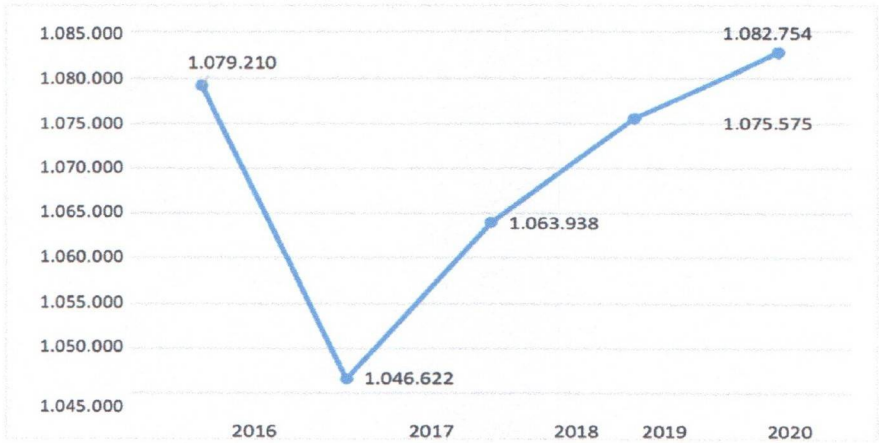
Pada tahun 2020, kejadian bencana di Kabupaten Sleman didominasi oleh bencana angin kencang sebanyak 70 kejadian dan bencana tanah longsor sebanyak 56 kejadian. Pada tahun 2019, terjadi 78 kejadian bencana angin kencang dan 22 kejadian bencana tanah longsor. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, kedua jenis bencana tersebut relatif lebih sering terjadi dibandingkan jenis bencana lainnya seperti erupsi gunung api, gempa bumi, banjir, petir, dan kekeringan.

2.3. Demografis

Pada tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Sleman yang teregistrasi sebanyak 1.075.575 jiwa. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten

Sleman bertambah sebanyak 7.179 jiwa atau sebesar 0,67% menjadi 1.082.754 jiwa. Perkembangan penduduk Sleman tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dilihat pada Gambar 2.6

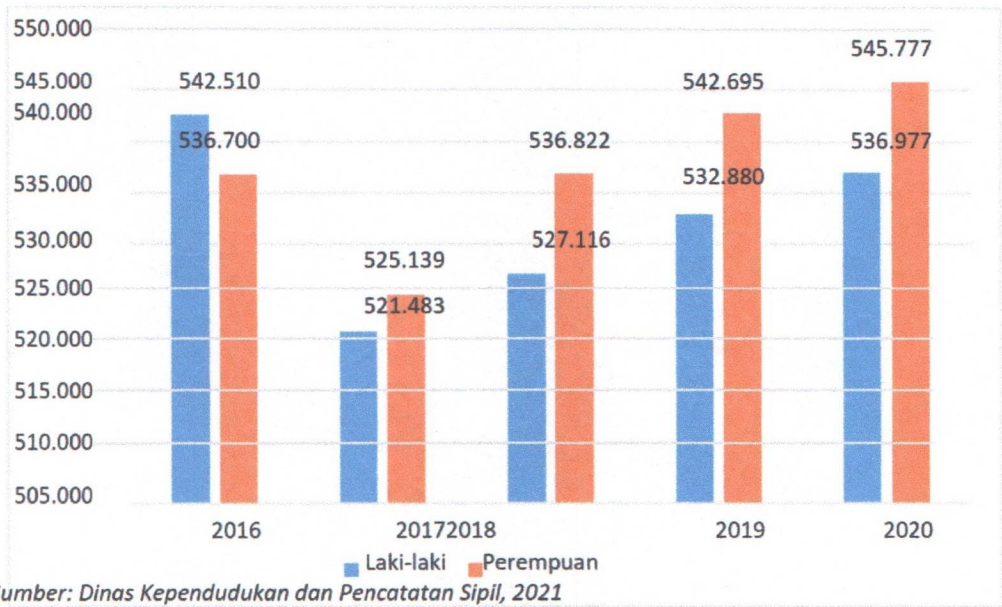
Gambar 2. 6
Perkembangan Penduduk Kabupaten Sleman
Tahun 2016-2020 (jiwa)



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Sleman, dalam empat tahun terakhir, yaitu tahun 2017 sampai tahun 2020, menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini adalah usia harapan hidup perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki. Data mengenai hal itu dapat dilihat pada gambar 2.7.

Gambar 2. 7
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Sleman Tahun 2015-2020 (jiwa)



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Pertambahan jumlah penduduk terjadi akibat jumlah kelahiran lebih banyak daripada jumlah kematian serta penduduk yang masuk ke Kabupaten

Sleman lebih banyak daripada penduduk yang keluar dari Kabupaten Sleman, seperti terlihat pada Tabel 2.6.

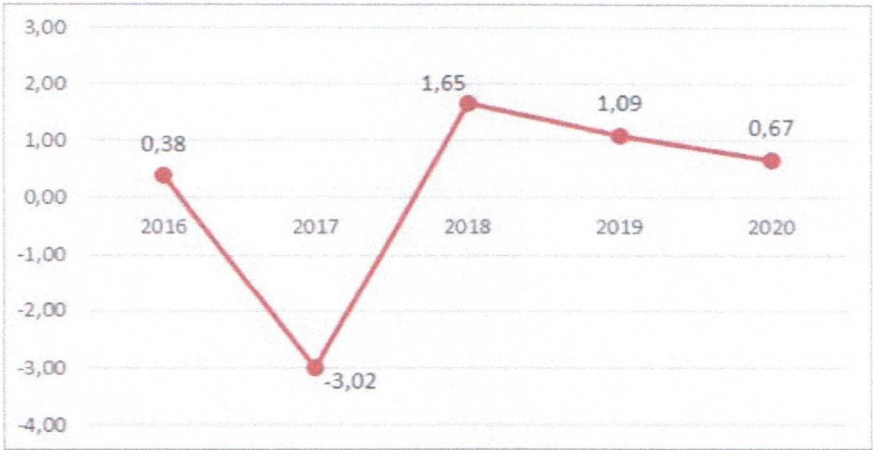
Tabel 2. 6
Perkembangan Migrasi Penduduk di Kabupaten Sleman
Tahun 2016-2020 (jiwa)

No	Mutasi Penduduk	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Lahir	8.878	8.655	11.725	12.973	9,452
2	Mati	5.210	6.059	6.744	8.467	7,913
3	Datang	17.819	10.214	18.640	23.859	17,006
4	Pergi	12.305	6.452	11.967	19.383	9,982

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2020 sebesar 0,67%, mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yang sebesar 1,09%. Salah satu penyebabnya adalah adanya proses konsolidasi data oleh Kemendagri sehingga tidak ada data ganda atau duplikasi data penduduk. Laju pertumbuhan data penduduk Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar 2.8.

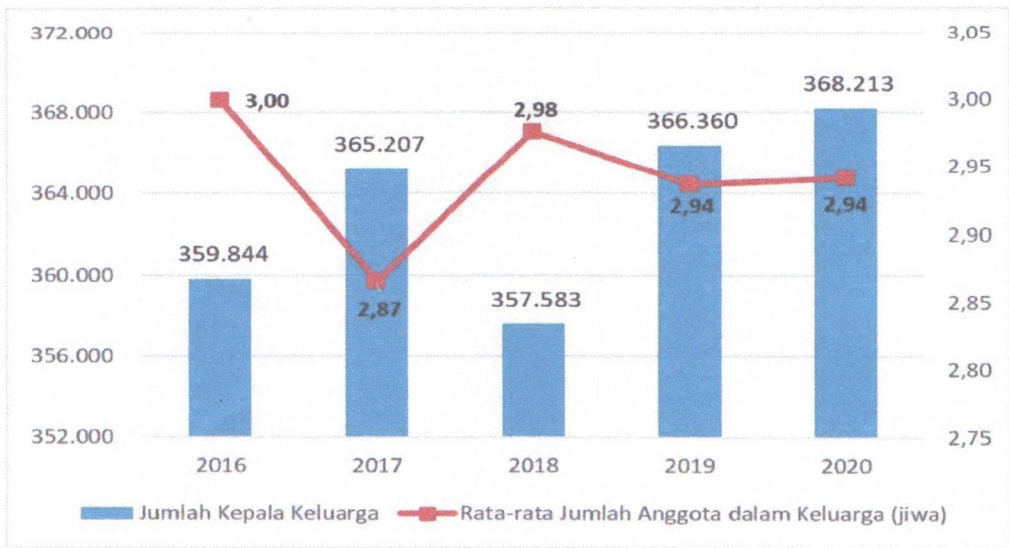
Gambar 2. 8
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Sleman
Tahun 2016- 2020 (%)



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Jumlah kepala keluarga (KK) di Kabupaten Sleman mengalami kenaikan sebanyak 1.853 KK atau 2,94%. Jumlah KK pada tahun 2019 sebanyak 366.360 KK, bertambah menjadi 368.213 KK pada tahun 2020. Pada tahun 2020, rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak 2,94 jiwa. Angka ini tidak mengalami perubahan dari tahun 2019. Perkembangan jumlah kepala keluarga dan rata-rata jumlah jiwa pada setiap keluarga dari tahun 2016 hingga tahun 2020, ditunjukkan dalam Gambar 2.9.

Gambar 2. 9
 Banyaknya KK dan Rata-rata Jiwa Dalam Keluarga
 Tahun 2016-2020 di Kabupaten Sleman



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Pada tahun 2020 komposisi penduduk laki-laki usia 0-14 tahun bertambah menjadi sebesar 21,98% dari tahun 2019 sebesar 22,09%, sementara penduduk usia 15-59 meningkat menjadi 64,53 % dari tahun 2019 sebesar 63,92%, dan penduduk usia lansia menurun menjadi 13,49% dari tahun 2019 sebesar 13,99%. Rincian data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2. 7
 Penduduk Laki-laki Kabupaten Sleman menurut Kelompok Umur
 Tahun 2015-2020 (jiwa)

Kelompok Umur	Tahun (jiwa)				
	2016	2017	2018	2019	2020
0-4	35.707	31.193	34.660	34.578	34.395
5-9	41.943	41.413	41.409	41.026	40.738
10-14	41.530	41.112	40.658	42.100	42.885
15-19	41.034	40.243	38.570	37.309	40.310
20-24	36.170	36.726	36.063	38.099	39.384
25-29	34.620	34.944	35.388	37.046	38.076
30-34	41.105	38.186	36.963	35.966	35.715
35-39	44.827	44.050	43.444	43.302	42.126
40-44	43.029	41.565	40.837	42.337	43.184
45-49	41.640	41.061	40.433	39.701	39.952
50-54	35.171	35.173	35.075	37.311	37.741
55-59	30.229	30.152	29.856	29.529	30.034
60+	75.505	75.923	73.310	74.576	72.437
JUMLAH	75.505	75.923	73.310	74.576	72.437
Proporsi usia anak (0-14) (%)	21,97	21,39	22,16	22,09	21,98
Proporsi Usia 15-59 (%)	64,11	64,34	63,92	63,92	64,53
Proporsi Lansia (>59) (%)	13,92	14,28	13,92	13,99	13,49

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020

Komposisi penduduk perempuan pada usia 0-14 tahun pada tahun 2020 sedikit menurun menjadi sebesar 20,50% dibanding tahun 2019 sebesar 20,55%. Penduduk perempuan usia 15-59 meningkat menjadi 64,17%

dibanding tahun 2019 sebesar 63,7%, dan penduduk perempuan usia lansia naik menjadi 15,33% dibanding tahun 2019 sebesar 15,74%. Rincian data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.8.

Tabel 2. 8
Penduduk Perempuan Kabupaten Sleman Menurut Kelompok Umur
Tahun 2015-2020 (jiwa)

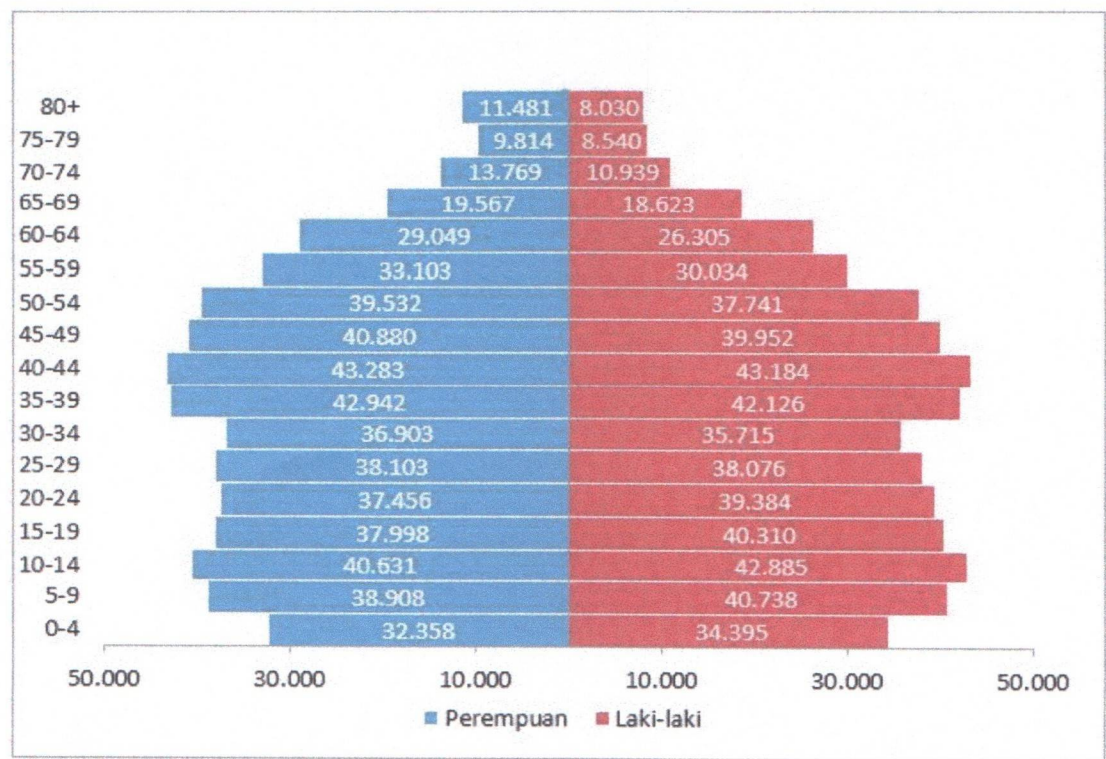
Kelompok Umur	Tahun (jiwa)				
	2016	2017	2018	2019	2020
0-4	34.208	29.765	32.947	32.630	32.358
5-9	39.825	39.399	39.461	39.042	38.908
10-14	39.081	38.683	38.382	39.842	40.631
15-19	38.354	38.027	36.922	35.769	37.998
20-24	35.276	35.243	35.096	36.491	37.456
25-29	35.390	35.437	35.607	36.929	38.103
30-34	41.117	38.608	37.643	37.319	36.903
35-39	43.552	43.387	43.274	43.707	42.942
40-44	41.968	41.222	41.363	43.018	43.283
45-49	40.879	41.273	41.152	40.392	40.880
50-54	35.996	36.313	36.888	39.329	39.532
55-59	31.264	32.118	32.337	32.785	33.103
60+	79.790	81.645	80.630	85.442	83.680
JUMLAH	536.700	531.120	531.702	542.695	545.777
Proporsi usia anak (0-14) (%)	28,22	27,47	20,84	20,55	20,50
Proporsi Usia 15-59 (%)	64,06	64,32	64	63,71	64,17
Proporsi Lansia (>59) (%)	14,87	15,37	15,16	15,74	15,33

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020

Gambaran struktur penduduk Kabupaten Sleman juga dapat dilihat melalui piramida penduduk pada Gambar 2.10 yang menyajikan data penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Bentuk piramida penduduk Kabupaten Sleman adalah piramida penduduk stasioner, yaitu dicirikan oleh komposisi penduduk usia tua (60+) lebih dari 10%, dan didominasi oleh penduduk kelompok umur produktif (kelompok umur 30-49) serta anak-anak (kelompok umur 5-19). Bentuk piramida stasioner dapat diartikan bahwa angka kelahiran mulai menurun. Hal itu terlihat dari jumlah penduduk kelompok umur 0-4 lebih rendah dibanding kelompok umur di atasnya dan angka kematian juga menurun.

Pada tahun 2020 penduduk usia tua mencapai 14,42%. Berdasarkan pola peningkatan jumlah penduduk usia lansia, pada 5-10 tahun mendatang jumlah lansia diprediksi akan terus bertambah. Dengan demikian diperlukan merencanakan secara matang untuk pelayanan kepada lansia terutama terkait kesehatan dan fasilitas umum yang ramah lansia.

Gambar 2. 10
Piramida Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2020 (jiwa)



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.4. Akses kepada pelayanan publik

2.4.1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Sleman dapat dilihat dari beberapa aspek seperti jalan, drainase, saluran irigasi, penyediaan air minum dan rumah ibadah.

Indikator pertama yaitu proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Kondisi jalan baik adalah jalan dengan permukaan jalan yang ditambal kurang dari 10% dan dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan minimal 40 km/jam. Panjang jalan kabupaten adalah 699,50 km yang terdiri atas 320 ruas jalan. Dari panjang jalan tersebut, pada tahun 2020 terdapat 460,3 km (65,804%) yang dalam kondisi baik, selanjutnya 155,85 km dalam kondisi sedang, 38,2 km dalam kondisi rusak ringan, dan 45,15 km dalam kondisi jalan rusak berat. Kondisi ini lebih buruk dari tahun 2019. Hal itu disebabkan adanya *refocusing* anggaran akibat pandemi COVID-19, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan jalan, dialihkan untuk penanganan COVID-19.

Indikator jalan lainnya adalah rasio panjang jalan per jumlah penduduk. Pada tahun 2020, rasio panjang jalan per jumlah penduduk di Kabupaten Sleman sebesar 0,00058 merupakan rasio yang tergolong rendah. Rendahnya rasio panjang jalan per jumlah penduduk dapat menimbulkan persoalan lalu

lintas pada beberapa ruas. Oleh karena itu selain peningkatan jaringan jalan juga diperlukan suatu manajemen rekayasa lalu lintas.

Jumlah jembatan di Kabupaten Sleman yang berada di ruas jalan kabupaten sebanyak 385 buah. Sejumlah 135 jembatan dalam kondisi baik, 162 jembatan dalam kondisi sedang, 60 jembatan dalam kondisi rusak ringan, 25 jembatan dalam kondisi rusak berat, dan sebanyak 3 jembatan runtuh.

Drainase merupakan pendukung prasarana jalan di Kabupaten Sleman, terutama di wilayah perkotaan. Drainase yang dihitung adalah drainase sepanjang jalan kabupaten. Pada tahun 2020, panjang drainase adalah 221,920 kilometer terdiri atas 277 ruas. Drainase berkondisi baik sepanjang 185,658 km dan kondisi sedang sepanjang 12,246 km. Drainase diperlukan untuk mencegah terjadinya genangan dan aliran air pada badan jalan yang dapat merusak struktur bangunan jalan itu sendiri. DPUPKP Kabupaten Sleman melaksanakan pemeliharaan rutin saluran drainase dengan target 30.000 meter setiap tahunnya.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sleman merupakan lahan pertanian. Oleh karena itu, pemerintah membangun jaringan irigasi untuk mengairi lahan pertanian tersebut meskipun luas lahan pertanian berkurang setiap tahun karena alih fungsi lahan. Daerah irigasi di Kabupaten Sleman berjumlah 875 unit. Panjang saluran irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten, telah divalidasi dan masuk dalam *database* Daerah Irigasi mencapai 436,198 kilometer. Jaringan irigasi dengan kondisi baik pada tahun 2020 tercatat sebesar 336,380 kilometer atau 81,23%.

Selain air untuk irigasi, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup pula air yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau air minum. Persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2020 sebesar 99,5%. Meskipun akses air minum sudah tinggi, namun capaian ini belum memperhitungkan kecukupan air minimal 60 liter per orang per hari untuk perdesaan dan minimal 120 liter per orang per hari untuk perkotaan serta belum memperhatikan kualitas air dan belum memperhatikan akses per rumah tangga. Sebagian besar penduduk Kabupaten Sleman memanfaatkan air tanah daripada air permukaan/sumur sebagai sumber air bersih. Penduduk yang dilayani oleh jaringan air minum perpipaan yang disediakan oleh PUDAM sampai tahun 2020 sebanyak 35%.

Kabupaten Sleman memiliki 2 buah tempat pemakaman umum (TPU) yaitu di Seyegan dan di Prambanan. Daya tampung kedua TPU tersebut adalah

26.768 lubang. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk pada tahun 2020 adalah 22,183%.

Indikator lain dari urusan pekerjaan umum adalah tersedianya tempat ibadah. Sampai saat ini rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah 1:133. Sebagian besar tempat ibadah di Kabupaten Sleman dibangun swadana dari masyarakat.

Untuk indikator penanganan sampah, sampah yang dihasilkan pada tahun 2020 sebanyak 702 ton per hari. Penanganan sampah dilakukan dengan cara ditimbun/dibakar, dibuang ke pembuangan sampah (TPA), dan didaur ulang. Pada tahun 2020, sampah yang diangkut ke TPA oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pasar dan Swasta sebanyak 1 234,34 m³/hari (33,38%) dan sampah yang dikurangi/dimanfaatkan (dibuat kompos dan didaur ulang) sebanyak 158,14 m³/hari (22,53%). Untuk wilayah perdesaan, sampah sering kali ditimbun atau dibakar, karena masih luasnya pekarangan. Dari total timbunan, sampah yang tertangani sebesar 55,91%. Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan sebesar 89,02 %. Jumlah prasarana dan sarana persampahan yakni armada 37 unit, transfer depo sebanyak 17 unit, TPS3R 25 unit dan TPS sebanyak 34 unit. Jejaring pengelola sampah mandiri (JPSM) di Kabupaten Sleman sebanyak 232 kelompok.

Untuk mencegah terjadinya pencemaran air dan tanah, Pemerintah Kabupaten Sleman mengelola air limbah domestik. Volume timbunan limbah sebesar 86.393,28 m³/hari. Berdasarkan pendataan diketahui terdapat KK dengan akses aman sebesar 20,36%, KK dengan akses layak sebesar 76,50%, dan KK tanpa akses sebesar 3,14% atau 11.318 KK.

2.4.2. Fasilitas Pendidikan

Selama lima tahun terakhir (2016-2020), jumlah sekolah negeri baik TK, SD maupun SMP, cenderung tetap dan sekolah swasta terdapat tren yang selalu meningkat. Seiring dengan bertambahnya jumlah sekolah swasta, jumlah murid yang bersekolah di sekolah swasta juga bertambah. Tingkat pemenuhan atas kebutuhan sekolah di suatu wilayah dapat dilihat melalui rasio ketersediaan sekolah. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah pada jenjang tersebut. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah.

Selama kurun waktu 2016-2020, rasio ketersediaan gedung sekolah SD/MI terhadap penduduk usia sekolah SD/MI berfluktuasi dan cenderung menurun. Pada tahun 2020, rasio ketersediaan SD/MI sebesar 55, sedangkan rasio ketersediaan sekolah menengah pertama sebesar 32. Untuk kondisi bangunan sekolah SD/MI, sampai tahun 2020 masih terdapat 3 bangunan rusak berat sedangkan untuk sekolah SMP/MTs masih terdapat 10 bangunan rusak berat.

Untuk tenaga guru yang menjadi kewenangan kabupaten, guru negeri terdapat tren yang menurun disebabkan jumlah guru negeri yang pensiun setiap tahunnya mencapai angka ratusan. Pada tahun 2021, terdapat tambahan guru negeri melalui seleksi CPNS pada tahun 2020. Jumlah guru swasta cenderung stabil, bahkan menunjukkan tren sedikit meningkat. Untuk tenaga non guru negeri juga terdapat tren yang menurun sedangkan untuk non guru swasta cenderung tetap.

Rasio guru dan murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Pada tahun 2020, rasio guru dan murid SD/MI sebesar 18,00. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebanyak 1 (satu) orang guru SD/MI mengajar 28 siswa, sehingga rasio guru dan murid SD/MI di Kabupaten Sleman telah melampaui standar yang ditetapkan.

Untuk jenjang SMP/MTs rasio guru/murid pada tahun 2020 sebesar 14,00. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebanyak 1 (satu) orang guru SMP/MTs mengajar 32 siswa, oleh karena itu rasio guru dan murid SMP/MTs di Kabupaten Sleman telah memenuhi standar. Perhitungan rasio itu tidak hanya terhadap guru-guru negeri (PNS) namun termasuk pula guru tidak tetap (GTT).

2.4.3. Fasilitas Kesehatan

Sampai tahun 2020 rasio posyandu per satuan balita adalah 27,61, meningkat dari 22,78 di tahun 2019. Adapun rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,20 dari 0,18 tahun 2019. Sedangkan rasio rumah sakit per satuan penduduk stagnan sebesar 0,03 sejak tahun 2016. Untuk rasio dokter per satuan penduduk sebesar 1,49 pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 1,28. Rasio tenaga medis per satuan penduduk pada tahun 2020 sebesar 1,79, sedangkan

tahun sebelumnya sebesar 1,55. Selain itu, di Kabupaten Sleman telah didapatkan sertifikat ISO dan akreditasi terhadap 25 puskesmas dan 2 RSUD.

Pada tahun 2018, Sleman sudah mencapai *universal health coverage (UHC)*. Dengan adanya kebijakan penon-aktifan jaminan kesehatan atas penerima biaya iuran BPJS Kesehatan dari APBN, pada bulan Agustus tahun 2019 Kabupaten Sleman tidak dapat mencapai UHC (95%), dan hanya mencapai 90,49%. Pada tahun 2020, akibat pandemi COVID-19, banyak terjadi PHK sehingga para pekerja tersebut tidak bisa memenuhi premi BPJS Sleman. Hal ini berakibat pada turunnya angka UHC, menjadi 88,74%.

2.4.4. Penanaman Modal

Penanaman modal di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 terus menunjukkan perkembangan, baik dari jumlah unit usahanya maupun nilai investasinya. Pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2020 berjumlah investasi PMA sebanyak 107 unit dengan nilai investasi US\$211.403.604 dan investasi PMDN sebanyak 219 unit dengan nilai investasi Rp6.983.255.000.000,00. Secara nominal jumlah investasi mengalami peningkatan namun rasio daya serap tenaga kerja mengalami penurunan, yaitu hanya mencapai 89,089. Perkembangan penanaman modal di Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 secara lebih rinci disajikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2. 9
Capaian Indikator Penanaman Modal Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jml investor berskala nasional					
	PMDN (unit)	60	77	88	119	219
	PMA (unit)	66	70	80	100	107
2	Nilai investasi berskala nasional					
	PMDN (juta rupiah)	3.370.881	3.893.334	5.584.260	6.475.060	6.983.255
	PMA (IIS \$)	233.587.774	35.336.556	193.830.919	209.380.604	211.403.604
3	Rasio daya serap tenaga kerja	174,103	167,257	161,307	123,973	89,089
4	Kenaikan/penurunan nilai	6,69	15,49	43,43	15,95	7,85
	realisasi PMDN (%)					

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, 2021

2.4.5. Sarana Perekonomian

Gambaran kegiatan perekonomian penduduk dapat dilihat dari perkembangan sarana perdagangan, sebagai aktivitas ekonomi masyarakat lokal sehari-hari. Pada tahun 2019, sarana perdagangan yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman sebanyak 515 jenis, yang terdiri dari 37 pasar kabupaten, 41 pasar desa, 2 pasar hewan, 2 usaha perdagangan pemerintah, 209 minimarket, 187 toko modern lokal, 4 pusat

perbelanjaan, 2 perkulakan/ grosir, 5 *hypermarket*, 14 *supermarket* dan 8 *department store*. Sarana pergudangan berjumlah sebanyak 190 buah.

Koperasi merupakan sarana perekonomian masyarakat, selain sektor pemerintah (BUMN) dan sektor swasta, yang berprinsip ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Namun hingga saat ini, kontribusi koperasi terhadap pendapatan nasional dan atau daerah masih jauh tertinggal.

Perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Sleman selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2016 jumlah koperasi sebanyak 627 unit. Tahun 2017 turun menjadi 479 unit. Tahun 2018 turun lagi menjadi 413 unit. Turun lagi pada tahun 2019 menjadi 383 unit, dan terakhir pada tahun 2020 juga turun menjadi 341 unit. Tidak semua unit koperasi berstatus aktif. Dalam kurun waktu 2016-2020 proporsi unit koperasi berstatus aktif berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Data rinci mengenai jumlah koperasi di Kabupaten Sleman disajikan dalam tabel 2.10.

Tabel 2. 10
Perkembangan Koperasi Kabupaten Sleman
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koperasi aktif (unit)	627	479	413	383	341
2	Jumlah koperasi (unit)	656	515	444	410	407
3	Persentase koperasi aktif (%)	95,58	96,12	93,01	93,41	83,78

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2021

Koperasi yang berjumlah 410 unit tersebut, 383 unit merupakan koperasi aktif dan sisanya tidak aktif. Anggota koperasi sampai dengan tahun 2019 mencapai 229.913 orang dan mempekerjakan 2.132 karyawan. Nilai aset koperasi mencapai Rp976.284.857.569,00 dan sisa hasil usaha yang dibagikan mencapai Rp25.841.484.858,00. Jumlah koperasi berdasarkan jenisnya di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2. 11
Jumlah Koperasi di Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019

No	Jenis Koperasi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	KUD	17	17	17	17	17
2	Koperasi pondok pesantren	26	26	6	4	4
3	Koperasi kerajinan industri	5	5	4	0	1
4	KSU	171	172	117	83	92
5	BMT	79	81	69	63	36
6	Koperasi pasar	8	8	2	4	4
7	KSP	63	68	61	86	67
8	Koperasi mahasiswa	10	10	10	8	8

9	Koperasi PKL	2	2	0	0	0
9	Koperasi pertanian/perikanan/ peternakan	52	53	34	15	17
10	Koperasi pegawai karyawan	174	174	166	129	123
11	Koperasi angkutan darat	2	2	4	2	2
12	Koperasi angkutan darat/ udara	15	15	12	12	13
13	Koperasi pasar	8	8	2	4	4
14	Koperasi wisata	0	0	0	0	1
15	Koperasi lain	14	15	11	17	21

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2020

2.5. Informasi sosial budaya yang berkaitan dengan isu kemiskinan dan isu-isu terkait lainnya

Upaya mengurangi angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dilakukan dengan kerja sama dari semua pihak, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat, seperti KUBE PKH, KUBE reguler dan PRSE. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2016 sampai 2018 mengalami penurunan, yaitu dari 78,58% turun menjadi 68,69% dan turun lagi menjadi 41,47%. Tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan menjadi 70,37% dan 84,69%.

Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya mengalami penurunan tajam. Pada tahun 2016 sebesar 5,08%, sedangkan pada tahun 2020 menjadi hanya 0,04%. Sebaliknya Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan Kesehatan sosial mengalami kenaikan tajam dari 78,95% pada tahun 2016, terus mengalami kenaikan hingga mencapai 100% pada tahun 2019 dan tetap 100% pada tahun 2020.

Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial mengalami penurunan meskipun tidak terlalu tajam. Sedangkan persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial mengalami kenaikan. Data selengkapnya tentang indikator urusan sosial disajikan dalam Tabel 2.12

Tabel 2. 12
Indikator Urusan Sosial Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	78,58%	68,69%	41,47%	70,37%	84,69%
2	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	5,08%	5,27%	3,65%	0,71%	0,04%
3	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan Kesehatan sosial	78,95%	85,71%	90%	100%	100%
4	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100,00%	82,05%	86,05%	88,89%	75,44%
5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	67,07%	44,48%	65,09%	80,64%	77,38%

Sumber: Dinas Sosial, 2021

Upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya adalah panti. Di Pada tahun 2021 di Kabupaten Sleman terdapat total 53 panti, yang terdiri atas panti anak, panti disabilitas, rumah singgah, panti rehabilitasi, panti jompo, dan UKS lansia. Data rinci mengenai jumlah tiap-tiap jenis panti disajikan pada tabel 2.13.

Tabel 2. 13
Data Panti yang Dibina di Kabupaten Sleman

No	Uraian	Jumlah
1	Panti anak	32
2	Panti disabilitas	9
3	Rumah singgah	2
4	Panti rehabilitasi	6
5	Panti Jompo	1
6	LKS lansia	3

Sumber : Dinas Sosial, 2021

Selain sarana prasarana, upaya penanganan PMKS juga memerlukan dukungan sumberdaya baik berupa kelembagaan maupun personil. Dalam kaitan itu di Kabupaten Sleman terdapat sejumlah lembaga sosial dan pekerja sosial dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 2.14.

Tabel 2. 14
Data Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial
Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	WKSBM	57	Kelompok
2	PSM	350	orang
3	TKSK	17	orang
4	LK3	4	lembaga
5	Family care unit (FCU)	1	unit
6	LKS	91	lembaga
7	Karang taruna	86	kelompok
8	Tagana	138	orang
9	Pendamping PKH	185	orang
10	Pelopop perdamaian	13	orang
11	Pekerja sosial	6	orang
12	TPSD	86	orang

Sumber: Dinas Sosial, 2021

BAB III

PROFIL KEMISKINAN DAERAH

Bab ini berisi uraian tentang kondisi kemiskinan di Kabupaten Sleman yang meliputi kondisi kemiskinan konsumsi dan kemiskinan non konsumsi. Kemiskinan konsumsi dilihat dari persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan (P1), keparahan kemiskinan (P2), dan garis kemiskinan. Kemiskinan non konsumsi dilihat dari bidang-bidang Pendidikan, Kesehatan, perumahan dan permukiman, pembangunan desa, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, dan bidang sosial.

3.1 Kemiskinan Konsumsi

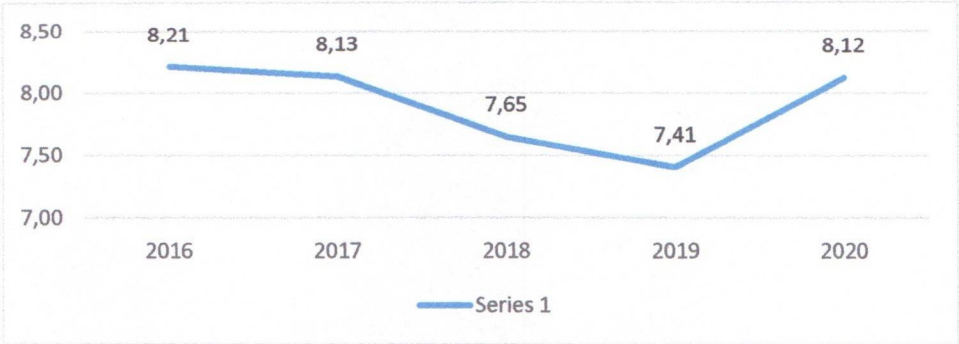
Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar, baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan bukan makanan. Standar ini disebut garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara dengan 2100 kalori energi per kapita per hari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling pokok. Penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan diklasifikasikan sebagai penduduk miskin.

Dengan pemahaman seperti di atas maka penggambaran tentang kondisi kemiskinan di Kabupaten Sleman dilakukan dengan dua kategori, yaitu kemiskinan konsumsi dan kemiskinan non konsumsi. Pada bagian ini diuraikan kemiskinan konsumsi, yakni ketidakmampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan.

3.1.1. Persentase Penduduk Miskin (P0)

Perkembangan persentase kemiskinan di Kabupaten Sleman dalam kurun lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun pada tahun 2016-2019 tetapi kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020. Kecenderungan tersebut digambarkan pada grafik 3.1.

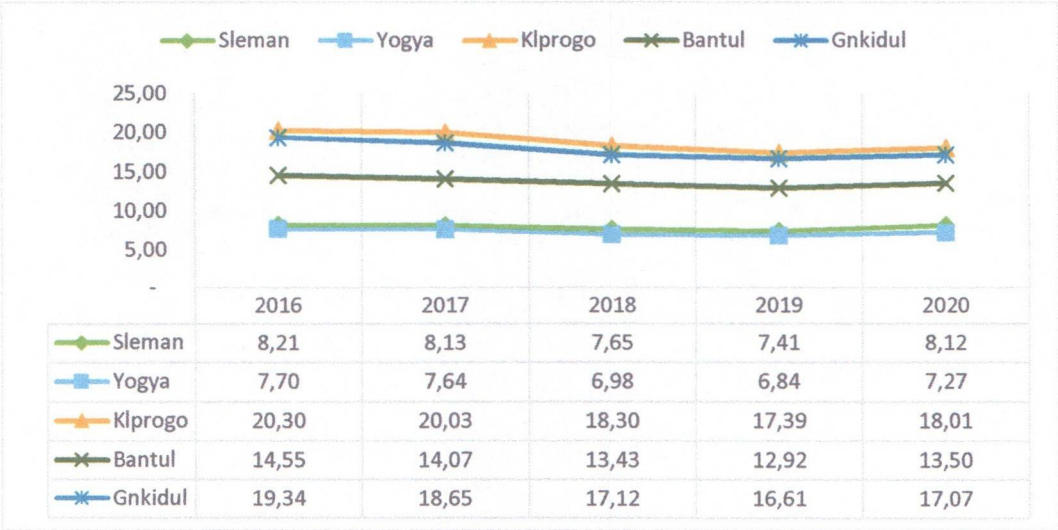
Grafik 3. 1
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sleman
Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi D I Yogyakarta, Survei Sosial Ekonomi Nasional,
Dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/134/1/jumlah-penduduk-miskin-.html>,

Apabila perkembangan persentase warga miskin di Kabupaten Sleman dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta terlihat bahwa Kabupaten Sleman menempati urutan kedua dengan angka persentase terkecil. Hal ini berbeda dengan posisi ketika perbandingan dilakukan berdasar jumlah warga miskinnya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa meskipun jumlah warga miskin di Kabupaten Sleman lebih banyak dibandingkan Kabupaten Kulonprogo, secara proporsi (perbandingan antara jumlah warga miskin dengan warga non-miskin) angkanya kecil. Dengan kata lain, proporsi golongan miskin di Kabupaten Sleman adalah kecil. Adapun kecenderungan perkembangannya terdapat kesamaan di antara kelima kabupaten/kota di DIY, yaitu berkecenderungan menurun. Data Kembangan persentase kemiskinan di DIY dapat dilihat pada grafik 3.2.

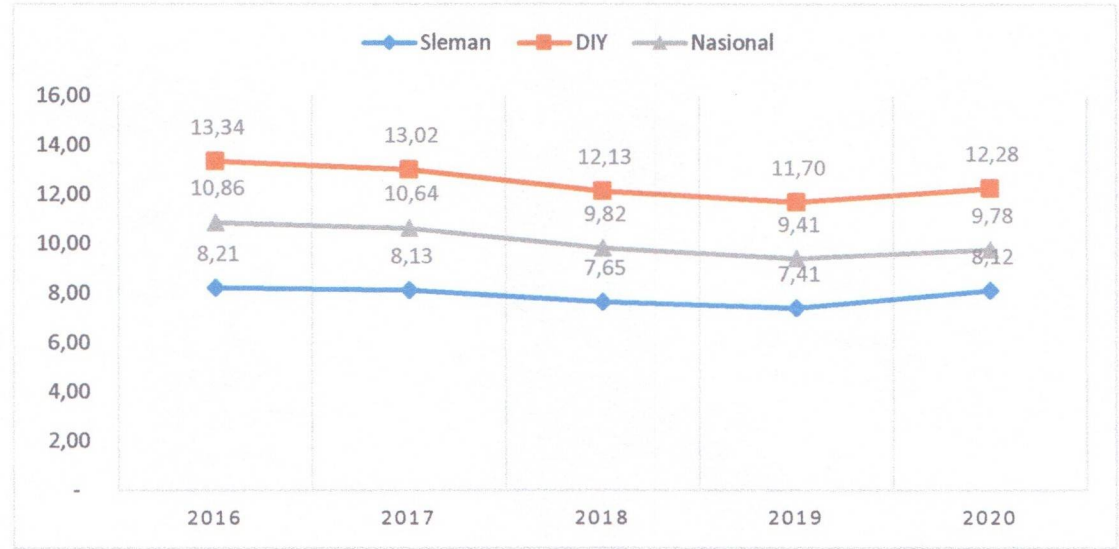
Grafik 3. 2
Perkembangan Persentase Warga Miskin di DIY
Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi D I Yogyakarta, Survei Sosial Ekonomi Nasional,
Dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/142/2/persentase-penduduk-miskin.html>

Apabila data kemiskinan di Kabupaten Sleman dibandingkan dengan level provinsi dan level nasional, perkembangan persentase warga miskin di Kabupaten Sleman ada pada posisi yang lebih baik. Persentase warga miskin di Kabupaten Sleman sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 selalu lebih rendah dibanding level provinsi maupun level nasional. Adapun perkembangannya dari tahun 2016 hingga 2019 cenderung searah, yaitu sama-sama cenderung menurun. Khusus pada tahun 2020 persentase warga miskin di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan yang lebih banyak dibanding peningkatan pada level provinsi maupun level nasional. Data perbandingan tersebut dapat dilihat pada grafik 3.3.

Grafik 3. 3
Perkembangan Persentase Warga Miskin di Kabupaten Sleman,
Provinsi DIY dan Nasional Tahun 2016-2020

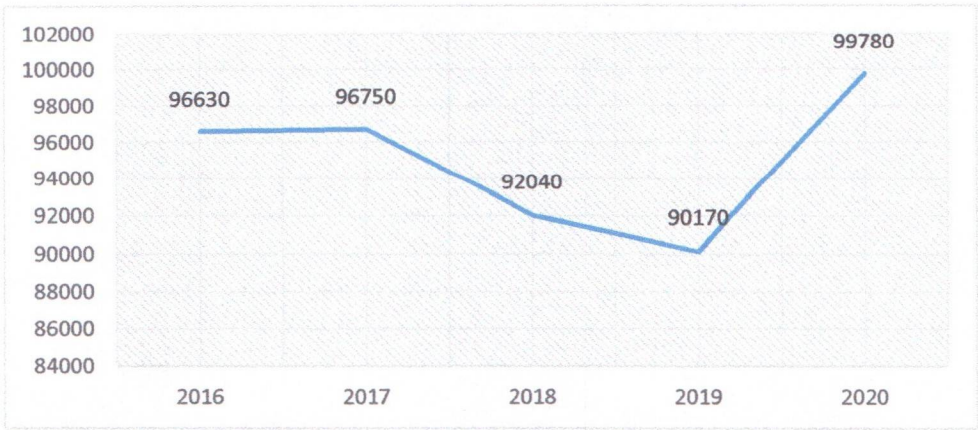


Sumber:
<https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/08/18%2000:00:00/1219/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007---2019.html>

3.1.2. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan hingga angkanya melebihi angka pada tahun 2016. Hal itu menunjukkan bahwa secara umum kinerja penanggulangan kemiskinan tahun 2016-2019 telah membuahkan hasil yang positif. Adapun kenaikan pada tahun 2020 sangat dimungkinkan merupakan dampak dari adanya pandemi covid-19 yang menimbulkan dampak dalam bidang ekonomi. Gambaran perkembangan jumlah warga miskin di Kabupaten Sleman periode 2016-2020 dapat dilihat pada grafik 3.4.

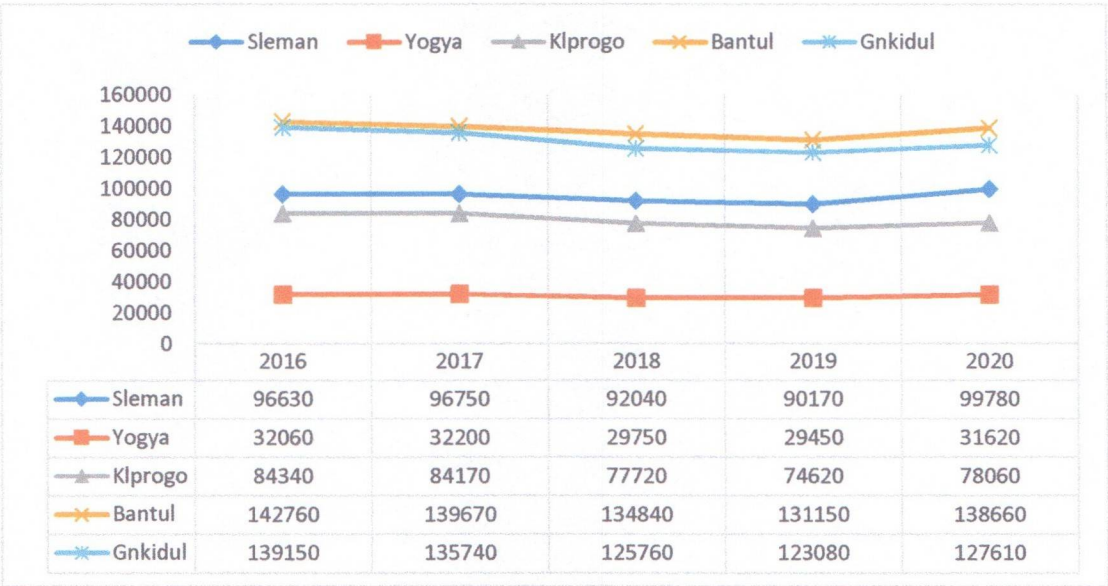
Grafik 3. 4
Perkembangan Jumlah Warga Miskin di Kabupaten Sleman
Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi D I Yogyakarta, Survei Sosial Ekonomi Nasional, Dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/134/1/jumlah-penduduk-miskin-.html>,

Jika perkembangan jumlah warga miskin di Kabupaten Sleman dibandingkan dengan perkembangan di kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta maka terlihat bahwa secara umum Kabupaten Sleman ada pada posisi ketiga dalam urutan dari jumlah terkecil. Posisi teratas dengan jumlah warga miskin terkecil adalah Kota Yogyakarta. Selanjutnya pada urutan kedua adalah Kabupaten Kulonprogo. Adapun urutan keempat dan kelima adalah Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul. Sedangkan dalam hal perkembangan, kelima kabupaten/kota di Daerah Istimewa ada pada pola yang sama, yaitu menurun pada tahun 2016-2019, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020. Gambaran mengenai hal tersebut dapat dilihat pada grafik 3.5.

Grafik 3. 5
Perkembangan Jumlah Warga Miskin Kab/Kota Di DIY Tahun 2016-2020



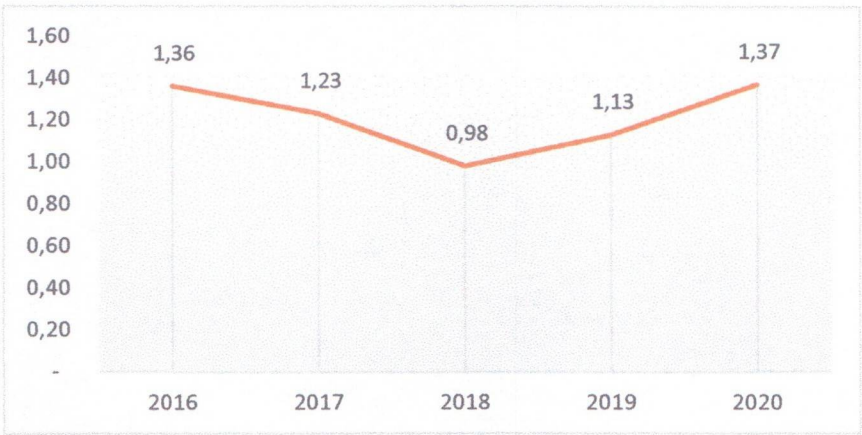
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi D I Yogyakarta, Survei Sosial Ekonomi Nasional, dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/134/1/jumlah-penduduk-miskin-.html>,

3.1.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Menurut BPS (2021), indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Dilihat dari indeks kedalaman kemiskinannya, kondisi di Kabupaten Sleman mengalami fluktuasi dengan kecenderungan naik. Tahun 2016-2018 mengalami penurunan, kemudian tahun 2018-2020 mengalami kenaikan. Hal itu menunjukkan bahwa kedalaman kemiskinan di Kabupaten Sleman pada tahun 2016-2018 semakin berkurang, yaitu menuju kearah yang lebih dangkal, sedangkan tahun 2018-2020 semakin bertambah yaitu menuju ke arah yang lebih dalam. Dengan kata lain, dalam kurun tiga tahun terakhir warga miskin semakin mengalami kekurangan. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan tersebut dapat dilihat pada grafik 3.6.

Grafik 3. 6
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan
di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

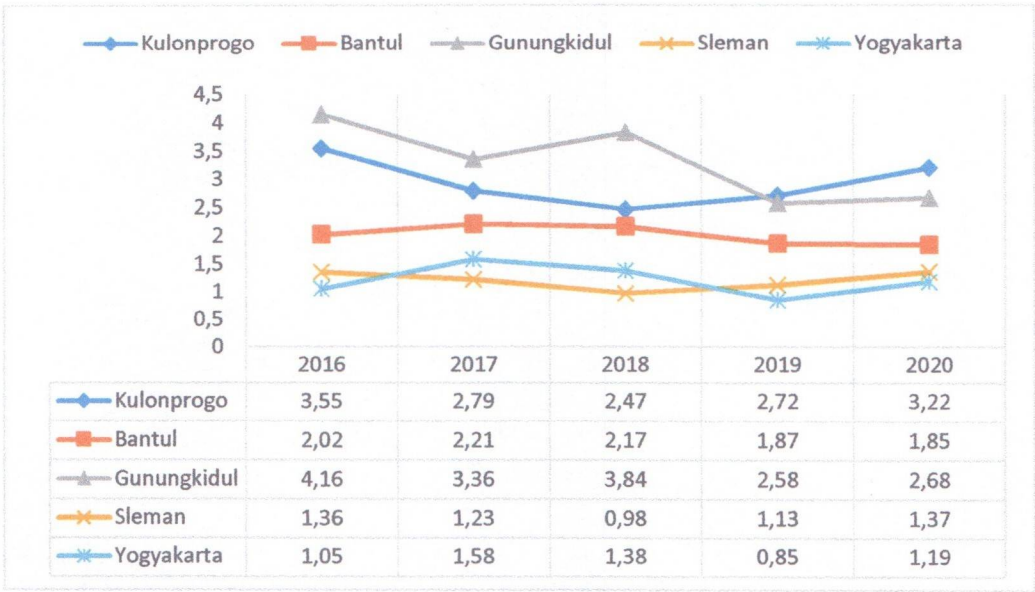


Sumber: BPS DIY, “Survei Sosial Ekonomi Nasional” dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/144/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-html>

Apabila perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta maka terlihat bahwa kondisi Kabupaten Sleman lebih baik dibandingkan Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, maupun Kabupaten Gunungkidul. Jika dibandingkan dengan kondisi di Kota Yogyakarta maka indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Sleman sempat lebih baik yaitu pada tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2019 dan

2020 Kota Yogyakarta kembali lebih unggul. Gambaran rinci mengenai hal tersebut disajikan pada grafik 3.7.

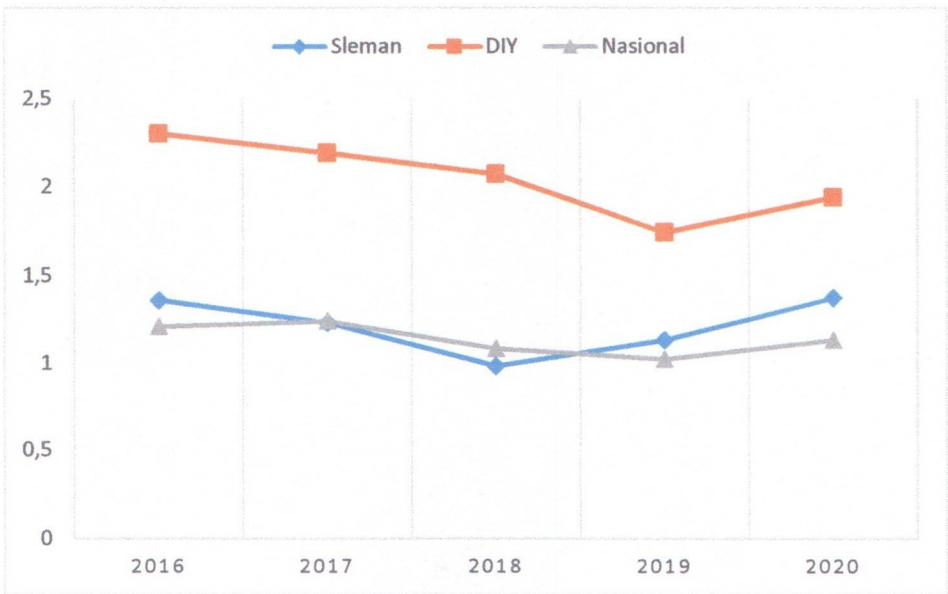
Grafik 3. 7
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan
di Kabupaten / Kota di DIY Tahun 2016-2020



Sumber: Sumber: BPS DIY, "Survei Sosial Ekonomi Nasional" dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/144/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1.html> diunduh pada 14 April 2021

Apabila perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Sleman dibandingkan dengan kondisi pada level provinsi dan nasional maka terlihat bahwa kondisi di Kabupaten Sleman lebih baik dibanding kondisi DIY, dan hanya sedikit di bawah kondisi nasional. Pada tahun 2018 indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sleman lebih rendah dibanding kondisi nasional. Gambaran rinci mengenai hal tersebut disajikan pada grafik 3.8.

Grafik 3. 8
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan
Kabupaten Sleman, DIY dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: Sumber: BPS DIY, "Survei Sosial Ekonomi Nasional" dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/144/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1.html> diunduh pada 14 April 2021

3.1.4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Menurut BPS (2021) indeks keparahan kemiskinan (*proverty severity index-P2*) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Dilihat dari indeks keparahan kemiskinannya, kondisi di Kabupaten Sleman berfluktuasi dengan kecenderungan naik. Pada tahun 2016-2018 indeks menurun tetapi tahun 2018-2020 kembali naik. Hal itu menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2018 kesenjangan antarwarga miskin semakin menipis, sedangkan pada tahun 2018-2020 kesenjangan antarwarga miskin semakin melebar. Dengan kata lain, selama tiga tahun terakhir terjadi peningkatan ketidak-merataan di antara sesama warga miskin. Data perkembangan indeks keparahan kemiskinan dapat dilihat pada grafik 3.9.

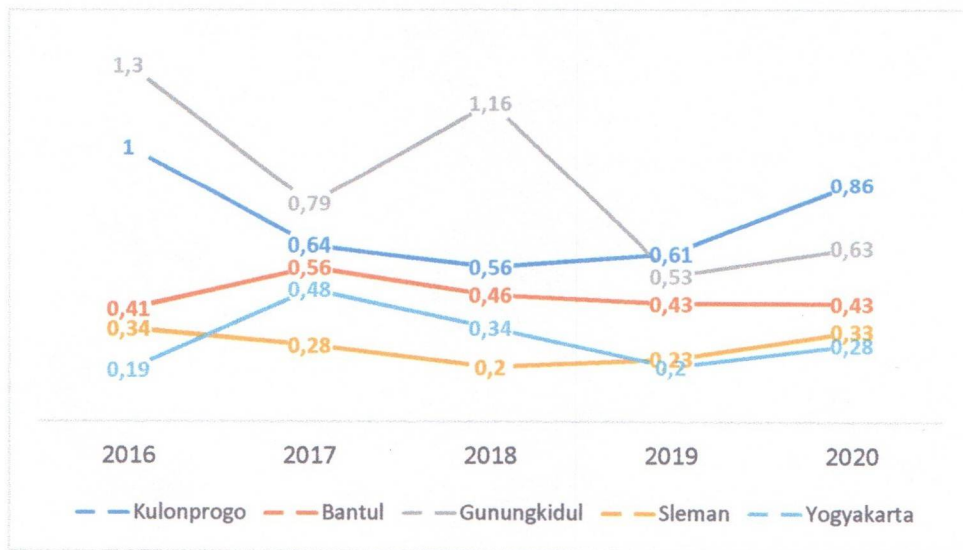
Grafik 3. 9
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan
di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020



Sumber: BPS DIY, “Survei Sosial Ekonomi Nasional” dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/144/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-.html>

Apabila perkembangan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Sleman dibandingkan dengan kondisi di kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta maka terlihat bahwa kondisi di Kabupaten Sleman lebih baik daripada kondisi di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Bantul. Jika dibandingkan dengan kondisi di Kota Yogyakarta, kondisi di Kabupaten Sleman sempat lebih baik yaitu pada tahun 2017 dan 2018, kemudian pada tahun 2019 dan 2020 sedikit kalah. Gambaran rinci mengenai hal tersebut disajikan pada grafik 3.10.

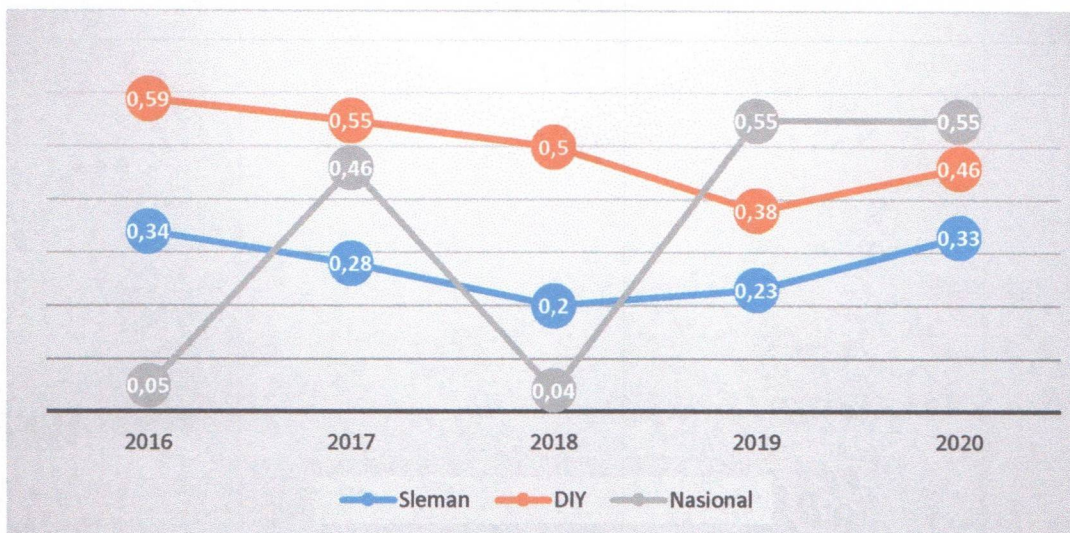
Grafik 3. 10
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2016-2020



Sumber: BPS DIY, “Survei Sosial Ekonomi Nasional” dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/144/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-.html>

Apabila perkembangan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Sleman dibandingkan dengan kondisi provinsi terlihat bahwa selama tahun 2016-2020 kondisi di Sleman lebih baik daripada kondisi DIY. Apabila kondisi di Kabupaten Sleman dibandingkan dengan kondisi nasional maka terlihat bahwa pada tahun 2016 dan 2018 kondisi Kabupaten Sleman lebih buruk dibanding kondisi nasional. Sedangkan pada tahun 2017, 2019, dan 2020 kondisi di Kabupaten Sleman lebih baik daripada kondisi nasional. Gambaran lebih rinci mengenai hal tersebut disajikan pada grafik 3.11.

Grafik 3. 11
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Sleman, DIY, dan Nasional Tahun 2016-2020



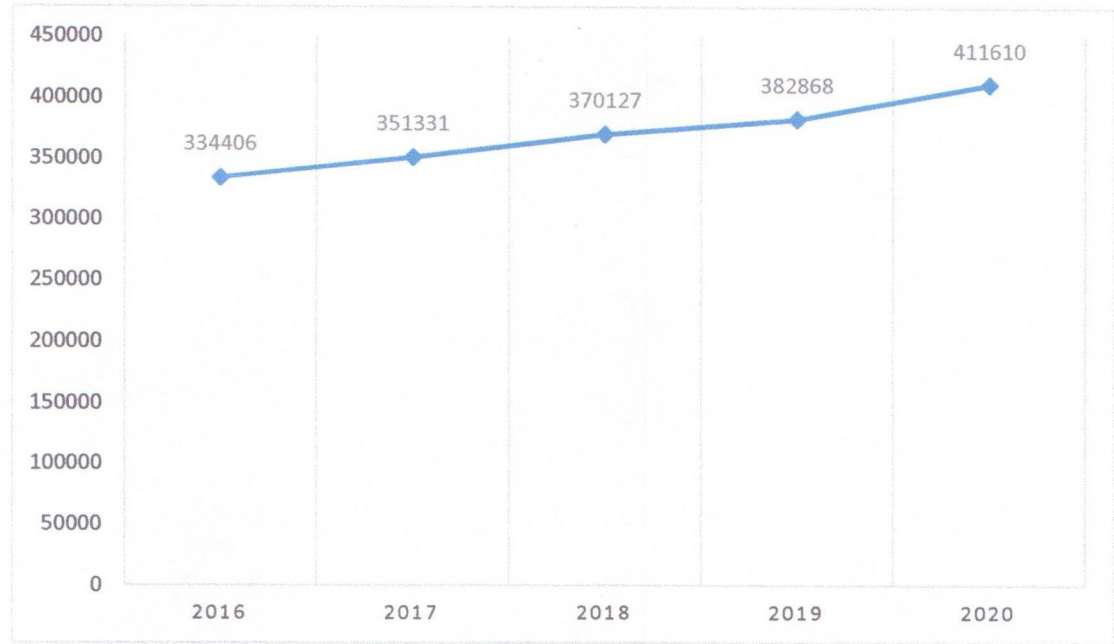
Sumber: BPS DIY, “Survei Sosial Ekonomi Nasional” dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/144/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-.html>

3.1.5. Garis Kemiskinan (GK)

Menurut BPS (2020) Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan Kabupaten Sleman pada tahun 2016-2020 terus mengalami kenaikan. Hal itu berkaitan dengan inflasi yang terjadi pada masing-masing tahun. Dalam bahasa sederhana dapat dikemukakan bahwa naiknya angka garis kemiskinan menandakan terjadinya kenaikan harga kebutuhan dasar. Gambaran tentang perkembangan angka garis kemiskinan di Kabupaten Sleman disajikan dalam grafik 3.12.

Grafik 3. 12
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Sleman
Tahun 2016-2020

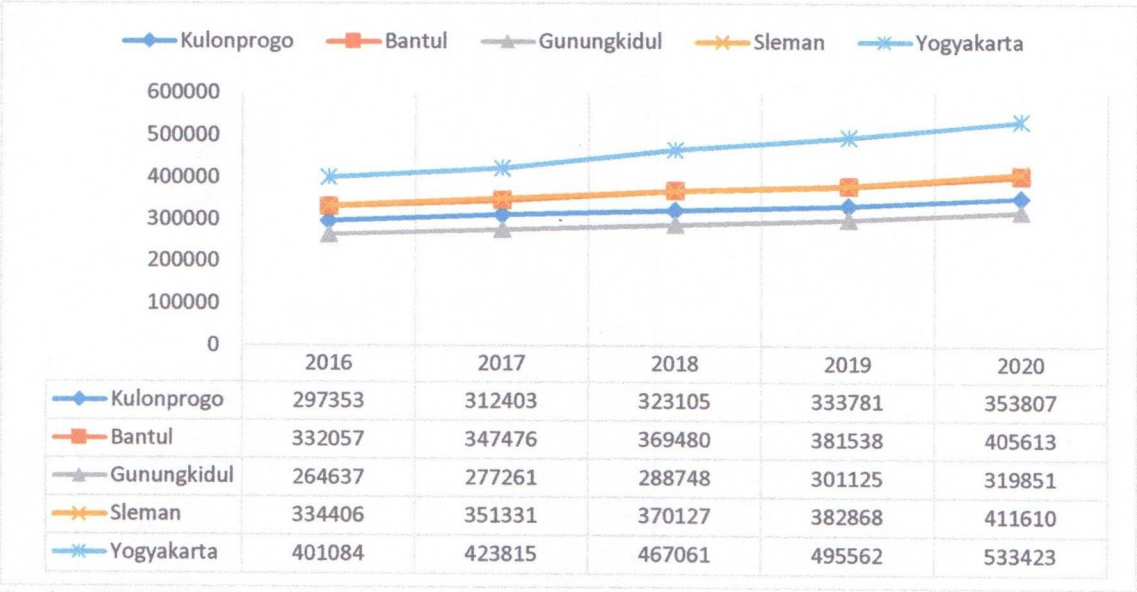


Sumber: BPS DIY, “Survei Sosial Ekonomi Nasional” dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/144/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-.html>

Apabila perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Sleman dibandingkan dengan kondisi di kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta terlihat memiliki kecenderungan yang sama, yaitu dari kenaikan dari tahun ke tahun. Angka kenaikannya hampir sama, dan bahkan antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bantul angka riil dan kenaikannya

sangat mirip sehingga di dalam grafik terlihat berdempetan. Gambaran riil mengenai hal itu disajikan pada grafik 3.13.

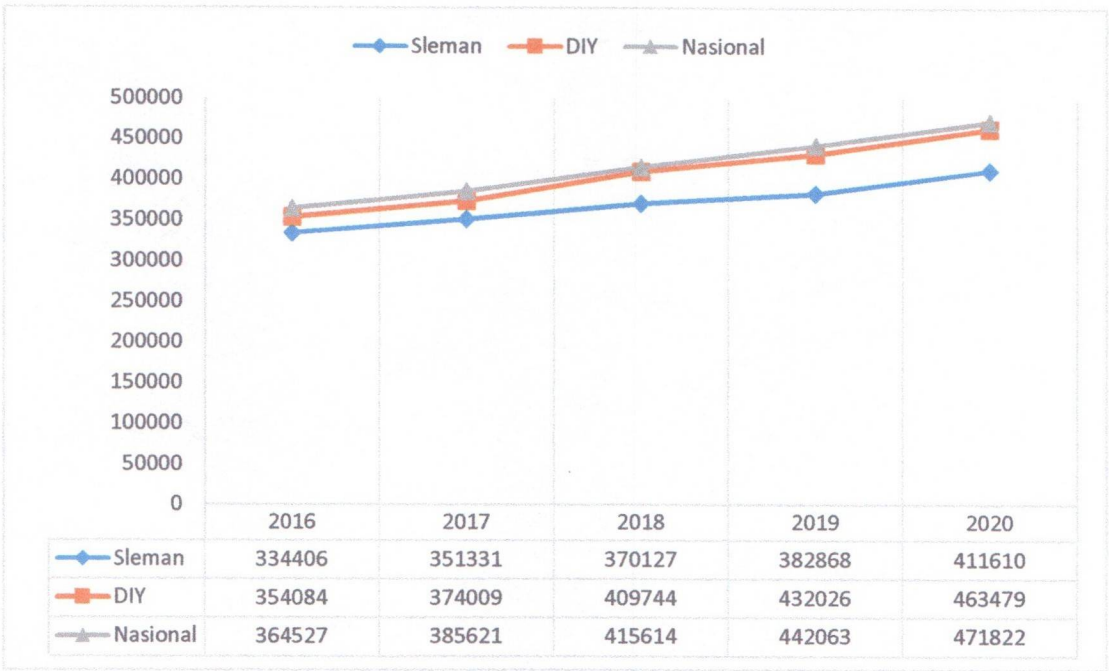
Grafik 3. 13
Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten/Kota DIY
Tahun 2016-2020



Sumber: BPS DIY, “Survei Sosial Ekonomi Nasional” dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/144/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-.html>

Apabila garis kemiskinan Kabupaten Sleman dibandingkan dengan garis kemiskinan pada level provinsi dan nasional terlihat bahwa ketiganya mempunyai kecenderungan yang sama, yaitu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Sekalipun demikian tingkan kenaikan untuk garis kemiskinan Kabupaten Sleman lebih kecil dibanding DIY maupaun nasional. Gambaran mengenai hal itu disajikan pada grafik 3.14.

Grafik 3. 14
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Sleman, DIY, dan Nasional
Tahun 2016-2020



Sumber: BPS DIY, “Survei Sosial Ekonomi Nasional” dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/144/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-.html>

Analisis

Dalam dokumen ini indikator kemiskinan konsumsi dikaji menggunakan lima indikator, yaitu: persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, dan garis kemiskinan. Dari data yang telah diuraikan pada bagian atas dapat diketahui bahwa dari lima indikator kemiskinan konsumsi, secara rerata kondisi Kabupaten Sleman tergolong unggul.

Dari perkembangan antarwaktu, efektivitas, dan efisiensi kelima indikator tersebut semuanya membaik dan efisien. Hanya dalam hal posisi relatif (terhadap kabupaten/kota lain) saja Kabupaten Sleman tidak sepenuhnya unggul. Sekalipun demikian perlu dicatat bahwa ketidak-unggulan Kabupaten Sleman pada indikator jumlah penduduk miskin terjadi karena total jumlah penduduknya lebih besar dibanding kabupaten/kota lain di DIY. Selain itu, dari indikator lain yang sangat terkait, yaitu indikator persentase penduduk miskin, posisi Kabupaten Sleman paling unggul. Dengan kata lain, meskipun jumlah orang miskin di Kabupaten Sleman ada di urutan ketiga, tetapi secara proporsi / persentase angkanya paling kecil dibanding kabupaten / kota lain. Analisis masing-masing indikator selengkapnya disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1
Analisa Indikator Kemiskinan Konsumsi Kabupaten Sleman

No	Indikator	Analisis			
		Posisi relatif	Perkembangan antarwaktu	Efektivitas	Efisiensi
1	Persentase penduduk miskin	Unggul	Membaik	Membaik	Efisien
2	Jumlah penduduk miskin	Tengah	Membaik	Membaik	Efisien
3	Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	Unggul	Membaik	Membaik	Efisien
4	Indeks keparahan kemiskinan (P2)	Unggul	Membaik	Membaik	Efisien
5	Garis kemiskinan	Tengah	Membaik	Membaik	Efisien

3.2. Kemiskinan Non Konsumsi

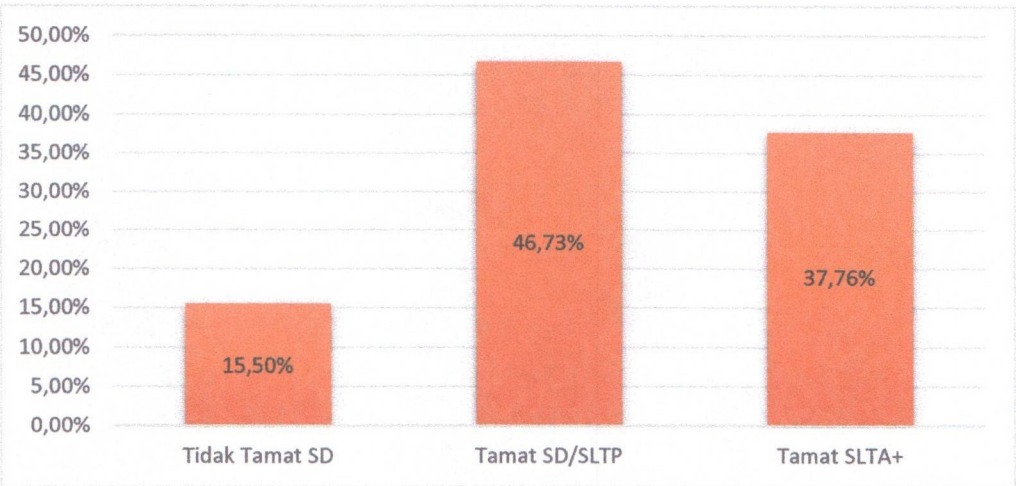
Telah dikemukakan sebelumnya bahwa kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar, baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan bukan makanan. Standar ini disebut garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara dengan 2100 kalori energi per kapita per hari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling pokok. Penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan diklasifikasikan sebagai penduduk miskin.

Dengan demikian penggambaran tentang kondisi kemiskinan di Kabupaten Sleman dilakukan dengan dua kategori, yaitu kemiskinan konsumsi dan kemiskinan non konsumsi. Pada bagian ini diuraikan kemiskinan non konsumsi, yakni ketidakmampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar selain makanan yang meliputi: bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, pembangunan desa, ketenagakerjaan, pertanian dan perikanan, serta bidang sosial.

3.2.1. Bidang Pendidikan

Dari segi pendidikan, warga miskin di Kabupaten Sleman sebagian besar (46,73%) tamat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sebanyak 37,76% tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau bahkan perguruan tinggi. Hanya sebesar 15,50% warga miskin yang tidak tamat SD. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mayoritas (62,24%) warga miskin di Kabupaten Sleman hanya berpendidikan SD/SMP. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian tersendiri mengingat masalah pendidikan berperan sangat penting dalam perolehan atau penciptaan lapangan kerja. Gambaran tentang data pendidikan warga miskin di Kabupaten Sleman disajikan pada diagram 3.1.

Diagram 3. 1
Tingkat Pendidikan Warga Miskin di Kabupaten Sleman
Tahun 2020



Sumber: BPS, *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten / Kota 2020*. Jakarta, 2020, hlm. 35

Angka melek huruf penduduk miskin di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 untuk usia 15-24 tahun telah mencapai 100,00 sedangkan untuk usia 15-55 tahun sebesar 99,29. Hal itu menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk miskin berusia 24-55 tahun yang belum melek huruf. Selanjutnya angka partisipasi sekolah di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 untuk usia 7-12 tahun telah mencapai 100,00; demikian pula untuk usia 13-15 juga telah mencapai 100,00. Hal itu menunjukkan bahwa

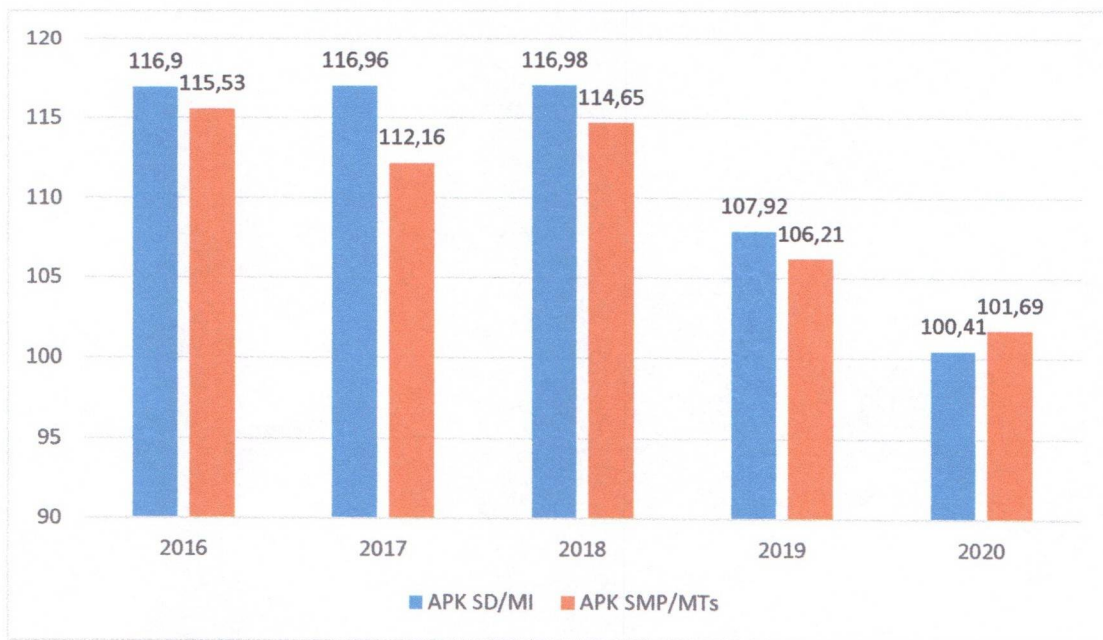
urusan partisipasi sekolah di Kabupaten Sleman telah terlaksana dengan baik sehingga bisa menjadi modal dalam usaha memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

3.2.1.1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah angka perbandingan antara banyaknya murid dari jenjang pendidikan tertentu dengan banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang yang sama, dinyatakan dalam persen. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka partisipasi kasar sekolah SD/MI dan SMP/MTs selama tahun 2016-2020 menunjukkan angka di atas 100%. Angka partisipasi kasar bisa mencapai lebih dari 100% menunjukkan bahwa jumlah murid pada jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs lebih banyak daripada jumlah penduduk usia SD/MI dan penduduk usia SMP/MTs. Hal itu dapat terjadi, antara lain karena: (a) adanya penduduk usia prasekolah SD sudah menjadi murid SD karena masih terdapat daya tampung sekolah; (b) adanya penduduk usia di atas 12 tahun yang masih bersekolah jenjang SD/MI karena terlambat masuk SD/MI atau karena pernah tinggal kelas; serta (c) adanya murid bukan penduduk Kabupaten Sleman yang bersekolah di wilayah Kabupaten Sleman. Adapun pada tahun 2019 dan tahun 2020, APK SD/MI dan APK SMP/MTs turun dibandingkan tahun sebelumnya, disebabkan oleh adanya regulasi pemerintah tentang zonasi sekolah bagi sekolah negeri baik jenjang SD, SMP maupun SMA, serta batasan usia masuk sekolah SD Negeri adalah 7 tahun. Perkembangan APK pada pendidikan dasar di Kabupaten disajikan pada diagram 3.2.

Diagram 3. 2
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, 2021

Meskipun APK SD/MI pada tingkat kabupaten telah mencapai lebih dari 100%, ternyata persebarannya tidak merata, yaitu terkonsentrasi hanya di 6 (enam) kecamatan/kapanewon. Sedangkan 11 (sebelas) kecamatan lainnya masih di bawah angka kabupaten. APK SD/MI paling rendah ada di Kapanewon Minggir yaitu sebesar 83,27%. Hal itu berarti dari 100 anak usia 7 sampai 12 tahun, yang sedang bersekolah SD sebanyak 83 anak, sedang selebihnya sebanyak 17 anak tidak bersekolah.

Kondisi pada jenjang SMP/MTs sedikit lebih baik. APK SMP Kabupaten Sleman mencapai 107,92%, yang berarti secara umum penduduk usia 13-15 tahun telah menyelesaikan sekolah lanjutan pertama. Kecamatan dengan APK SMP/MTs berada di bawah APK SMP/MTs kabupaten adalah Kapanewon Cangkringan (66,54%), Kapanewon Seyegan (74,49%), Kapanewon Kalasan (84,37%), Kapanewon Berbah (84,38), Kapanewon Gamping (96,06%), Kapanewon Ngemplak (96,31%) dan Kapanewon Mlati (98,69%).

3.2.1.2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah angka perbandingan penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut, dinyatakan dalam persen. Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat

pendidikan tertentu. APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan.

Pada tahun 2016-2020, angka partisipasi murni jenjang SD/MI di Kabupaten Sleman ada di atas angka 100%. Angka itu menunjukkan bahwa kapasitas atau daya tampung sekolah SD/MI di Kabupaten Sleman telah dapat mencukupi kebutuhan. Selain itu, angka tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia SD/MI yang bersekolah lebih banyak daripada jumlah penduduk usia SD/MI. Hal itu dapat terjadi karena terdapat anak luar daerah yang bersekolah di Kabupaten Sleman.

Angka partisipasi murni (APM) pada jenjang SMP/MTs selama tahun 2016-2020 terdapat tren yang meningkat. Angka APM SMP/MTs tidak setinggi angka APM SD/MI dan belum mencapai 100% dikarenakan terdapat penduduk usia SMP/MTs yang bersekolah di luar wilayah Kabupaten Sleman dan terdapat penduduk usia SMP/MTs yang menempuh pendidikan menengah. Gambaran rinci mengenai APM SD/MI dan SMP/MTs disajikan pada diagram 3.3.

Diagram 3. 3
Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pendidikan, 2020

3.2.1.3 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) atau *years of schooling* merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan

ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 adalah 10,91 tahun, lebih tinggi dari RLS DIY yang sebesar 9,55 tahun.

3.2.1.4. Harapan Lama Sekolah

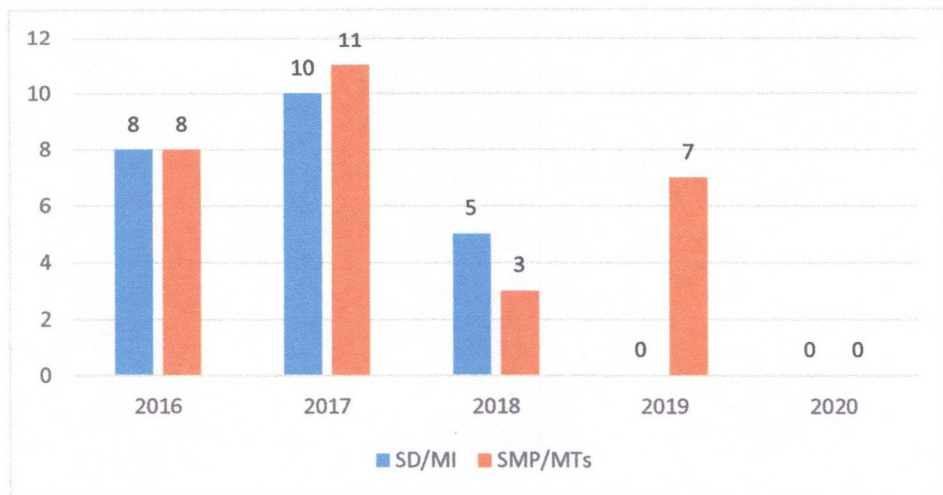
Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu pada masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk dalam bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pada tahun 2020, HLS Kabupaten Sleman sebesar 16,73 tahun. HLS Kabupaten Sleman lebih tinggi daripada HLS DIY yang mencapai 15,59. HLS Kabupaten Sleman tidak terjadi merata di semua kecamatan. HLS tertinggi terdapat di Kapanewon Depok, mencapai 18 tahun, sedangkan HLS terendah terjadi di Kapanewon Cangkringan sebesar 13,66 tahun.

3.2.1.5. Angka Putus Sekolah

Putus sekolah adalah usia sekolah yang tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Kasus putus sekolah jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs di Kabupaten Sleman selama tahun 2016-2020 flutuatif atau naik-turun. Hal itu terjadi karena setia[permasalahan putus sekolah dan tidak sekolah memiliki akar persoalan yang berbeda sehingga upaya penangannya tidak mungkin dilakukan secara seragam. Gambaran perkembangan kasus putus sekolah di Kabupaten Sleman kurun 2016-2020 ditunjukkan pada diagram 3.4. Data tersebut merupakan data tahunan dari data pokok Pendidikan (Dapodik), bukan data kumulatif. Adapun angka kumulatif putus sekolah dan tidak sekolah yang telah dikumpulkan melalui pendataan yang dilakukan oleh pendamping program PKH pada akhir tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2020 sebanyak 1.232 anak.

Diagram 3. 4
 Perkembangan Jumlah Kasus Putus Sekolah
 Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020



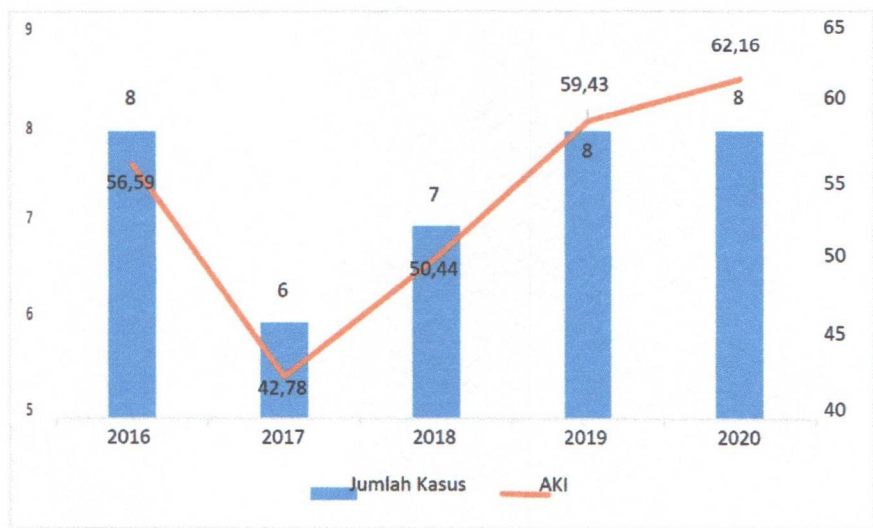
Sumber: Dinas Pendidikan, 2021

3.2.2. Bidang Kesehatan

3.2.2.1. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka kematian ibu melahirkan adalah jumlah kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kasus kematian ibu pada tahun 2019 sebanyak 8 kasus dari 13.462 kelahiran hidup, dengan angka kematian ibu melahirkan sebesar 59,43 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kasus kematian ibu tahun 2020 sama dengan tahun sebelumnya, hanya saja jumlah kelahiran hidup sebagai penyebut, turun menjadi 12.871 kelahiran hidup, dengan angka kematian ibu melahirkan sebesar 62,16 per 100.000 kelahiran hidup. Data rinci perkembangan angka kematian ibu melahirkan disajikan pada diagram 3.5.

Diagram 3. 5
Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu Melahirkan
Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Angka kematian ibu di Kabupaten Sleman tergolong sangat rendah. Hasil audit maternal perinatal menyatakan bahwa diagnosis penyebab kematian ibu di Kabupaten Sleman adalah karena pre-eklamsi berat, sepsis, leptospirosis, diabetes melitus, jantung, infeksi (*hospital pnemonia*), tumor otak dan perdarahan.

3.2.2.2 Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) atau tingkat kematian bayi merupakan ukuran kematian yang mengacu pada jumlah bayi yang meninggal dari jumlah bayi yang lahir hidup. Definisi bayi lahir hidup adalah janin yang keluar dari rahim ibu dan menunjukkan tanda-tanda kehidupan meskipun hanya sekejap. Bayi didefinisikan sebagai penduduk yang berumur kurang dari satu tahun dan belum mencapai ulang tahun pertama.

Di Kabupaten Sleman pada tahun 2016 terdapat 44 kasus kematian bayi (AKB 3,11); tahun 2017 terdapat 59 kasus (AKB 4,25); tahun 2018 terdapat 57 kasus (AKB 4,11); tahun 2019 terdapat 55 kasus (AKB 3,96); dan tahun 2020 terdapat 57 kasus kematian bayi dari 12.871 kelahiran hidup sehingga AKB pada tahun itu sebesar 4,43 per 1.000 kelahiran hidup. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah kasusnya relative stabil pada kisarang 57, sedangkan Angka Kematian Bayinya berfluktuasi pada rentang 3,11 sampai 4,43.

Kasus kematian bayi tersebut terdiri dari kematian neonatal (kematian bayi sebelum berumur satu bulan) dan kematian post neonatal (kematian bayi berumur setelah satu bulan tetapi kurang dari

satu tahun). Kematian bayi disebabkan antara lain oleh asfiksia, berat badan lahir rendah (BBLR), berat badan lahir sangat rendah (BBLSR), kelainan konginetal, sepsis, kelainan saluran cerna, prematur, dan lain-lain. Angka kematian bayi di Kabupaten Sleman dan setiap kecamatan tergolong rendah. Posisi di Kabupaten Sleman sudah mencapai *hard rock* atau angka kematian yang sangat kecil sehingga sulit untuk diturunkan lagi.

Angka kematian Balita per 1.000 kelahiran pada tahun 2016 adalah 3,47, kemudian turun menjadi 4,35 pada tahun 2017, turun lagi menjadi 4,32 pada tahun 2018, kemudian tahun 2019 naik menjadi 4,53, dan tahun 2020 naik lagi menjadi 4,89. Dengan kata lain selama tiga tahun terakhir terus-menerus terjadi kenaikan angka kematian Balita.

3.2.2.3 Persalinan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan

Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Sleman tahun 2016 telah mencapai 100%, kemudian turun menjadi 99,99% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 kembali mencapai 100% tetapi kemudian turun menjadi 99,98% pada tahun 2019, dan turun lagi pada tahun 2020 menjadi 99,95%. Penurunan capaian ini terjadi karena adanya 6 (enam) kasus yang tidak menjalankan persalinannya di fasilitas kesehatan. Satu kasus kehamilan tidak diinginkan (KTD) pada remaja yang sengaja menyembunyikan kehamilan dan persalinannya sehingga bersalin sendiri di rumah kekasihnya, 3 (tiga) kasus kehamilan tidak diinginkan (KTD) karena masih mempunyai anak yang usianya kurang dari 2 tahun, dan lainnya merupakan kasus persalinan dalam perjalanan karena sulit mendapatkan rumah sakit untuk persalinan.

3.2.2.4. Prevalensi TBC

Tingkat prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk di Kabupaten Sleman pada tahun 2016 adalah 69,23, kemudian naik menjadi 79,41 pada tahun 2017. Tahun 2018 naik lagi menjadi 96, demikian pula tahun 2019 juga naik menjadi 104,21. Sedangkan pada tahun 2020 tingkat prevalensinya turun menjadi 71,86. Jadi pada tahun 2016-2019 terjadi kenaikan, sedangkan tahun 2020 terjadi penurunan.

Tingkat kematian karena Tuberkulosis per 100.000 penduduk pada tahun 2016 sebesar 0,278, kemudian naik menjadi 0,376 pada tahun 2017, dan naik lagi pada tahun 2018 menjadi 3,024. Pada tahun 2019 terjadi penurunan sehingga menjadi 1,961, tetapi tahun 2020 naik lagi menjadi 3,61. Dengan kata lain, selama dua tahun terakhir terjadi kenaikan tingkat kematian karena tuberkulosis meskipun angka nominalnya kecil.

3.2.2.5. Prevalensi HIV/AIDS

Pada indikator prevalensi HIV/AIDS, pada tahun 2016-2017 angkanya 0% (nol persen), sedangkan tahun 2018-2020 angkanya 0,01%, dengan jumlah kasus sebanyak 113 kasus. Oleh karena itu kemudian selalu dilaksanakan survei pada masyarakat rawan (resiko tinggi) antara lain wanita pekerja seksual kosial, pekerja salon, dan panti pijat.

3.2.2.6. Prevalensi Balita Kurang Gizi

Anak disebut mengalami kekurangan gizi apabila tidak mendapatkan asupan gizi yang sesuai usianya. Kurang gizi ditandai dengan badan yang kurus, karena berat badannya kurang untuk anak seusianya. Penyebab balita dengan gizi buruk antara lain kemiskinan, buruknya akses air bersih dan sanitasi lingkungan, kurangnya imunisasi pada balita, kurangnya pendidikan dan pengetahuan tentang gizi, buruknya pola asuh balita, adanya masalah sosial, penelantaran anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatnya kasus pernikahan dini, pergaulan bebas, serta kehamilan yang tidak diinginkan.

Persentase balita dengan status gizi buruk di Kabupaten Sleman pada tahun 2016 sebesar 0,46%, turun pada tahun 2017 menjadi 0,44%, mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 0,52%, turun sedikit menjadi 0,51% pada tahun 2019, dan kembali naik pada tahun 2020 menjadi 0,54%. Jumlah balita dengan status gizi buruk pada tahun 2020 sebanyak 297 balita. Kasus balita dengan status gizi buruk paling banyak terjadi di wilayah Kapanewon Moyudan, Minggir, Ngemplak, Seyegan dan Gamping.

Persentase balita gizi kurang di Kabupaten Sleman pada tahun 2016 sebesar 7,43%, turun pada tahun 2017 menjadi 7,12%, mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 7,32%, naik lagi

menjadi 7,66% pada tahun 2019, dan kembali turun pada tahun 2020 menjadi 5,98%.

3.2.2.7. Prevalensi Stunting

Stunting disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena faktor penyakit pada balita, pola asuh orang tua, asupan makanan kurang, ketahanan pangan keluarga kurang serta pengetahuan orang tua tentang gizi masih kurang. Prevalensi *stunting* di Kabupaten Sleman pada tahun 2016 sebesar 11,88%, pada tahun 2017 nasik sedikit menjadi 11,99%, selanjutnya pada tahun 2018 turun menjadi 11,00%, turun lagi menjadi 8,38% pada tahun 2019, dan turun lagi pada tahun 2020 menjadi 7,24%.

3.2.3. ***Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman***

3.2.3.1. Persentase Rumah Layak Huni (%)

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah jumlah rumah layak huni pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah seluruh rumah pada tahun yang tersebut dikali 100%. Pada tahun 2016 cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Sleman sebesar 99,61%, kemudian turun menjadi 98,51% pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2018 naik menjadi 99,15%, naik lagi menjadi 99,68% pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 naik lagi menjadi 99,86%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sisanya (yang tidak termasuk dalam cakupan rumah layak huni) merupakan rumah tidak layak huni (RTLH). Jumlah RTLH yang belum tertangani pada tahun 2020 sebanyak 2.146 rumah dari jumlah keseluruhan RTLH sebanyak 11.602 rumah. Keberadaan rumah tidak layak huni menunjukkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial pada keluarga tersebut.

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau menghitung jumlah rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menempati rumah layak huni dan terjangkau, dibagi jumlah rumah tangga MBR. Terdapat 2 (dua) jenis MBR, yaitu rumah tapak dan rumah vertikal. Kriteria untuk masyarakat yang tinggal di rumah tapak (tidak bertingkat) adalah memiliki penghasilan di bawah Rp4.000.000,00 dengan catu listrik di bawah 1.300 KWH. Kriteria untuk bangunan bertingkat adalah khusus berpenghasilan dibawah Rp7.000.000,00. Cakupan rumah layak huni yang terjangkau pada

tahun 2016 sebesar 93,34%, kemudian turun menjadi 89,28% pada tahun 2017. Tahun 2018 meningkat menjadi 90,99%, kemudian meningkat lagi menjadi 99,68% pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 turun sedikit menjadi 99,37%. Naik turunnya angka disebabkan oleh kondisi status kepemilikan rumah yang umumnya berupa sewa.

3.2.3.2. Persentase Lingkungan Permukiman yang Tertata (%)

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana dan sarana umum (PSU) di Kabupaten Sleman pada tahun 2016 adalah 70,30%, kemudian meningkat pesat menjadi 99,57% pada tahun 2017. Tahun 2018 meningkat lagi menjadi 99,72%, meningkat lagi menjadi 99,95% pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 tetap pada angka 99,95%. Dengan demikian bahwa lingkungan permukiman di wilayah Kabupaten Sleman hampir semua telah tergolong sehat, aman, dan didukung dengan sarana serta prasarana umum.

3.2.3.3. Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)

Keberadaan kawasan kumuh di wilayah Kabupaten Sleman tidak terlalu mendominasi. Persentase Kawasan kumuh yang tertangani pada tahun 2016 sebesar 15,51%, kemudian turun menjadi 48,89% pada tahun 2017. Tahun 2018 naik menjadi 78,89%, naik lagi menjadi 87,64% pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 kawasan kumuh yang tertangani sebesar 91,25% (134,01 ha). Dalam rangka percepatan penanganan kumuh telah diterbitkan SK Bupati Sleman Nomor 93.3/Kep.KDH/A/2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sleman, yang memuat lokasi perumahan dan permukiman kumuh seluas 96,61 ha di 17 lokasi.

3.2.3.4. Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)

Proporsi rumah tangga di Kabupaten Sleman yang dapat mengakses air minum pada tahun 2016 sebesar 98,40%, kemudian naik menjadi 98,64% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 proporsinya mencapai 100%, tetapi pada tahun 2019 turun lagi menjadi 99,46%, dan pada tahun 2020 naik sedikit menjadi 99,50%.

Dalam hal ketersediaan jamban, data tahun 2020 menunjukkan bahwa rumah tangga miskin yang memiliki jamban sendiri atau memanfaatkan jamban Bersama sebanyak 92,15%.

Dengan kata lain masih terdapat 7,85% warga miskin yang belum mampu memanfaatkan jamban.

3.2.4. Bidang Pembangunan Desa

Tingkat kemajuan pembangunan desa dapat dilihat dari beberapa indikator seperti: rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, dan persentase PKK aktif, persentase Posyandu aktif. Untuk indikator-indikator tersebut kondisi Kabupaten Sleman pada tahun 2020 keseluruhannya telah mencapai angka 100%. Hal itu berarti bahwa dalam bidang pembangunan desa Kabupaten Sleman telah melakukan secara maksimal. Perkembangan indikator pembangunan desa seara rinci disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2
Capaian Indikator Pembangunan Desa Kabupaten Sleman
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan sarana prasarana Perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	100	100	100	100	100
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM (unit)	86	86	86	86	86
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (unit)	1.315	1315	1.315	1.315	1.309
4	Persentase PKK aktif (%)	80	80	100	100	100
5	Persentase posyandu aktif (%)	n.a.	60	99.93	100	100
	Pratama	n.a.	3,47	4,44	2,47	2,47
	Madya	n.a.	11,98	14,90	14,48	14,48
	Purnama	n.a.	39,79	17,32	10,24	10,24
	Mandiri	n.a.	4,76	63,27	72,79	72,79

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, 2021

Untuk mengukur perkembangan desa, Kabupaten Sleman menggunakan indeks desa membangun (IDM), yang dibangun oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan. Indeks tersebut dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, berdasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber

daya alam secara baik dan berkelanjutan. IDM memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa. IDM mengarahkan intervensi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah desa, baik tipologi maupun modal sosial.

Hasil penilaian perkembangan kemandirian desa dikelompokkan menjadi 5 (lima) klasifikasi, yaitu: (1) Desa sangat tertinggal, (2) Desa tertinggal, (3) Desa berkembang, Desa maju dan (5) Desa mandiri. Publikasi Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020, menunjukkan bahwa di Kabupaten Sleman sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal dan desa tertinggal. Peningkatan nilai indeks terjadi pada semua desa selama 2018-2020. Atas pencapaian tahun 2020 ini, Kabupaten Sleman berada pada peringkat 9 dari 434 kabupaten/kota di Indonesia.

Dari data IDM tahun 2020, diketahui bahwa desa-desa dengan kategori sebagai desa berkembang, tersebar di wilayah rural seperti Kapanewon Moyudan, Kapanewon Minggir, Kapanewon Seyegan, Kapanewon Tempel, Kapanewon Prambanan. Adapun predikat desa mandiri ditemukan pada desa-desa di wilayah urban antara lain di Kapanewon Depok, Kapanewon Kalasan, Kapanewon Gamping, Kapanewon Godean dan Kapanewon Ngaglik.

3.2.5. Bidang Ketenagakerjaan

Perkembangan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman dilihat dari indikator-indikator penduduk usia kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, rasio penduduk yang bekerja, dan rasio kesempatan kerja terhadap penduduk berusia 15 tahun ke atas. Indikator-indikator tersebut secara rinci disajikan pada tabel 3.3.

Tabel 3. 3
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk (jiwa)	1.079.053	1.062.861	1.058.368	1.070.913	1.079.916
2	Penduduk usia kerja 15 tahun dan lebih (jiwa)	852.884	841.227	830.851	842.358	871.640
	a. Angkatan kerja (jiwa)	590.443	604.701	604.701	604.701	604.701
	- Bekerja (jiwa)	590.443	569.750	569.750	569.750	569.750
	- Penganggur	34.360	34.951	34.951	34.951	34.951
	b. Bukan angkatan kerja (jiwa)	262.441	236.526	236.526	236.526	236.526
	- Sekolah (jiwa)	153.306	142.177	142.177	142.177	142.177
	- Mengurus rumah tangga (jiwa)	59.774	52.673	52.673	52.673	52.673
	- Menerima pendapatan lainnya (jiwa)	49.361	41.676	41.676	41.676	41.676
	- Anak (jiwa)	226.169	221.634	221.634	221.634	221.634
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	69,23	71,78	71,78	71,78	71,78
4	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,82	5,78	5,78	5,78	5,78
5	Rasio penduduk yang bekerja	94,18	94,22	94,22	94,22	94,22
6	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	0,27	0,12	0,26	0,58	0,10

*Basis data penduduk semester I tahun 2020
Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2021

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa persentase penduduk usia kerja di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 semester I sebesar 80,7%, meningkat dibanding dengan tahun 2019 (78,66%), namun persentase angkatan kerja dan yang bekerja mengalami penurunan, yaitu berada pada angka 72,34% dan 93,41%. Hal ini dikarenakan, walaupun ada peningkatan jumlah penduduk usia kerja, namun mereka bukan termasuk angkatan kerja. Kondisi ini akan menambah beban bagi penduduk yang bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sleman pada tahun 2016 5,82%, kemudian turun menjadi 5,78% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 turun lagi menjadi 5,76%, kemudian turun lebih banyak menjadi 3,69 pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 naik menjadi 6,59%. Peningkatan ini terjadi karena banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Mereka diberhentikan dari tempat kerjanya ataupun usaha yang digelutinya gulung tikar karena turunnya permintaan.

Persebaran pengangguran menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Kapanewon Depok merupakan kecamatan dengan tingkat pengangguran terendah (<1,49%), sementara kapanewon dengan tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Kapanewon Seyegan (6,63%), Kapanewon Godean (5,20%), Kapanewon Ngaglik (4,84%), Kapanewon Berbah (4,31%), Kapanewon Cangkringan (3,99%) dan Kapanewon Minggir (3,91%).

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan

kemampuan penyerapan tenaga kerja yang disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Pada tahun 2020, rasio penduduk yang bekerja mencapai 93,41%. Rasio penduduk yang bekerja pun mengalami penurunan. Rasio penduduk yang bekerja adalah persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja mempunyai korelasi negatif dengan tingkat pengangguran, dimana jika rasio penduduk yang bekerja tinggi maka tingkat pengangguran terbuka rendah.

Rasio kesempatan kerja pada tahun 2019 mulai meningkat, setelah mengalami penurunan pada tahun 2016. Namun akibat pandemi COVID-19, pada tahun 2020 mengalami penurunan, menjadi 0,1. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah penyerapan tenaga kerja oleh pasar kerja terhadap calon pekerja yang mencari pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK dapat digunakan untuk melihat potensi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan tenaga kerja (*labour supply*) untuk memproduksi barang dan jasa. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa.

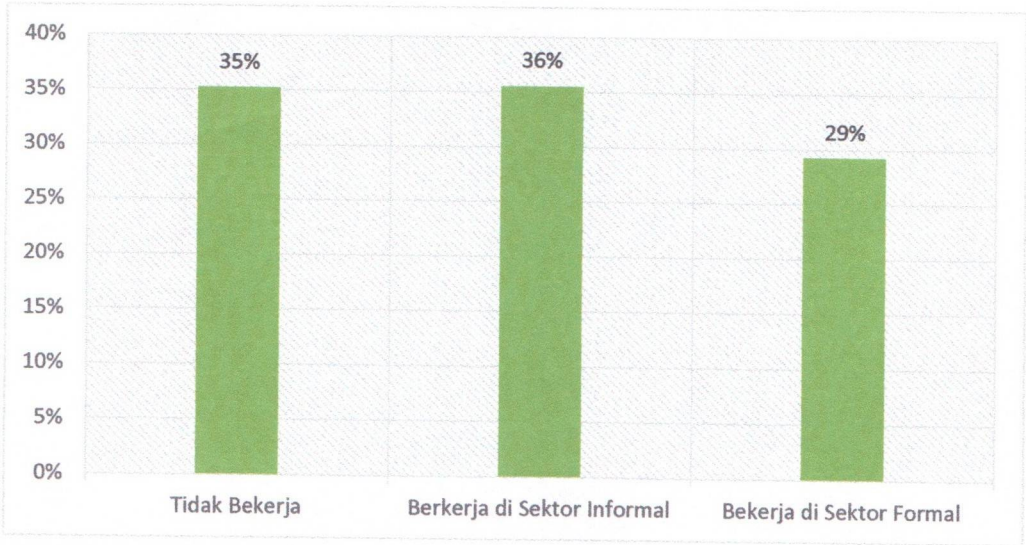
TPAK Kabupaten Sleman pada tahun 2020 mengalami penurunan, menjadi 72,34%. Berdasarkan data tahun 2019, kecamatan dengan TPAK paling rendah adalah Kapanewon Cangkringan (70,07%) dan Kapanewon Ngemplak (70,19%). Kecamatan dengan TPAK tertinggi adalah Kapanewon Kalasan (82,52%) dan Kapanewon Minggir (79,37%).

Distribusi ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman tahun 2020 menunjukkan bahwa 93,41% angkatan kerja telah bekerja dan 6,59% menganggur atau mencari pekerjaan.

Khusus mengenai penduduk miskin, data tahun 2020 menunjukkan bahwa sebanyak 36% warga miskin di Kabupaten Sleman bekerja pada sektor informal, 29% bekerja pada sektor formal, dan 35% tidak bekerja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lebih dari sepertiga warga miskin tidak memiliki sumber penghasilan, lebih dari sepertiga lagi memperoleh penghasilan tidak tetap, dan hanya kurang dari sepertiga yang memperoleh pendapatan tetap. Selanjutnya jika pekerjaan warga miskin dipilah berdasar sektor, diketahui bahwa sebanyak 13,02% bekerja pada sektor pertanian

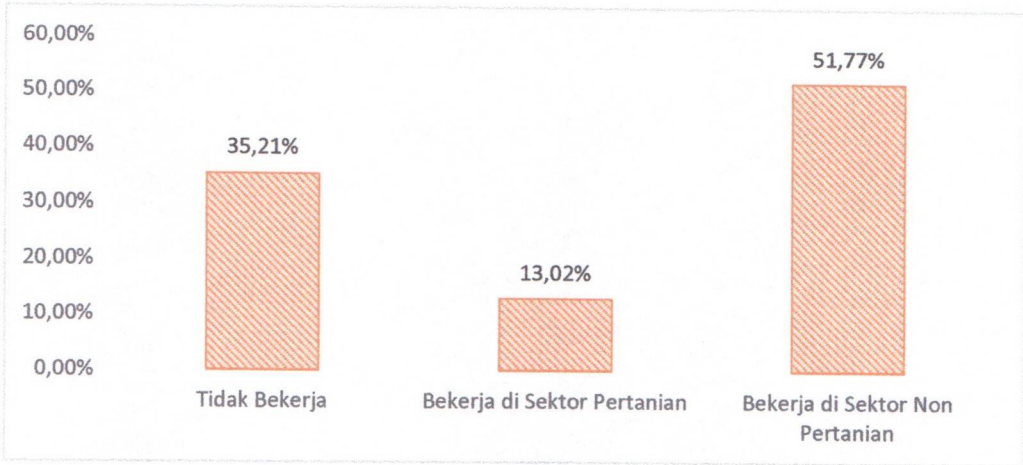
dan sebanyak 51,77% bekerja pada sektor non pertanian. Data tersebut menunjukkan bahwa fokus upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman perlu digeser dari awalnya berfokus pada sektor pernaian bergeser ke sektor-sektor yang bukan pertanian. Data rinci mengenai pekerjaan warga miskin dapat dilihat pada diagram 3.6 dan 3.7.

Diagram 3. 6
Proporsi Pekerjaan Warga Miskin di Kabupaten Sleman
Tahun 2020



Sumber: BPS, *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten / Kota 2020*. Jakarta, 2020, hlm. 77

Diagram 3. 7
Sektor Pekerjaan Warga Miskin di Kabupaten Sleman
Tahun 2020



Sumber: BPS, *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten / Kota 2020*. Jakarta, 2020, hlm. 97

3.2.6. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang ketahanan pangan di Kabupaten Sleman dilihat dengan menggunakan indikator-indikator ketersediaan pangan utama, ketersediaan energi perkapita, dan ketersediaan protein perkapita. Pada tahun 2015 ketersediaan pangan di Kabupaten Sleman sebesar 161.831,8 ton, kemudian turun menjadi 159.668,1 ton pada tahun 2016. Pada tahun 2017 turun lagi menjadi 149.441,3 ton, kemudian turun lagi menjadi

149.214,2 ton pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 kembali turun menjadi 142.031,84 ton. Terus turunnya ketersediaan pangan merupakan akibat dari penurunan luas panen. Kecenderungan turun juga dapat disebabkan oleh pergeseran musim dan meningkatnya organisme pengganggu tanaman.

Ketersediaan energi per kapita pada tahun 2015 sebesar 157%, kemudian naik menjadi 164,9% pada tahun 2016. Pada tahun 2017 turun drastis menjadi 136%, kemudian naik menjadi 140% pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 tetap sebesar 140%. Selama kurun waktu lima tahun, 2015-2019, ketersediaan energi sangat fluktuatif.

Ketersediaan protein per kapita pada tahun 2015 sebesar 153%, kemudian turun menjadi 141,8% pada tahun 2016. Pada tahun 2017 turun drastis menjadi 135%, kemudian naik menjadi 141% pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 naik signifikan menjadi 156%.

Selama kurun waktu lima tahun, 2015-2019, ketersediaan energi maupun ketersediaan protein tergolong fluktuatif. Ketersediaan energi Bersama-sama dengan ketersediaan protein harus memenuhi standard angka kecukupan gizi (AKG) yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketersediaan energi ditetapkan sebesar 2200 kkal/kapita/hari dan ketersediaan protein sebesar 57 gr/kapita/hari. Bahan pangan tersebut terdiri dari 9 (sembilan) jenis yaitu: padi-padian, makanan berpati, gula, buah/biji berminyak, buah-buahan, sayur-sayuran, daging, telur, susu, ikan serta minyak dan lemak.

Skor pola pangan harapan Kabupaten Sleman pada tahun 2019 sebesar 89,11. Skor PHH yang tinggi ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan di Kabupaten Sleman sudah bervariasi dan seimbang, mencakup konsumsi karbohidrat, protein, mineral, lemak dan lain-lain.

Penguatan cadangan pangan Kabupaten Sleman tahun 2019 tercatat sebesar 72,83%. Cadangan pangan ini sebagai salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan pangan, baik dari aspek fisik maupun ekonomi serta untuk mengantisipasi dan menanggulangi keadaan darurat, kekurangan pangan maupun keadaan tertentu yang ditetapkan oleh bupati. Sesuai dengan Perbup Nomor 10 Tahun 2014, cadangan pangan di Kabupaten Sleman berupa beras.

3.2.7. Bidang Pertanian dan Perkebunan

Perkembangan bidang pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sleman dilihat dengan menggunakan indikator cakupan bina kelompok tani, produktivitas padi sebagai bahan pangan utama lokal, produksi sektor pertanian dan peternakan, serta jumlah produksi komoditas perkebunan.

Cakupan bina kelompok tani sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 telah mencapai angka 100%. Hal itu berarti bahwa seluruh petani telah terlayani oleh program pembinaan.

Produktivitas padi sebagai bahan pangan utama lokal pada tahun 2016 sebesar 61,58 kuintal/ha, kemudian turun menjadi 57,15 kuintal/ha pada tahun 2017. Pada tahun 2018 turun lagi menjadi 53,37 kuintal/ha, kemudian naik menjadi 58,52 kuintal/ha pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 naik lagi menjadi 59,35 kuintal/ha. Produktivitas padi dipengaruhi faktor pola tanam, penggunaan bibit yang berkualitas dan penggunaan pupuk organik. Guna mengatasi kecenderungan penurunan produktivitas ini telah diupayakan peningkatan penerapan teknologi dalam budidaya melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) yang meliputi pengolahan tanah sempurna, penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, penggunaan pupuk organik, tata tanam tajarro dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), tata pengelolaan air irigasi sesuai kebutuhan tanaman.

3.2.8. Bidang Perikanan

Perkembangan bidang perikanan di Kabupaten Sleman dilihat dengan menggunakan indikator jumlah produksi ikan, kebutuhan produksi ikan, tingkat konsumsi ikan, dan tingkat ketersediaan ikan.

Produksi ikan konsumsi di Kabupaten Sleman berasal dari produksi perikanan budi daya dan produksi perikanan tangkap. Produksi perikanan budi daya berasal dari produksi di kolam, mina padi dan karamba. Produksi perikanan tangkap berasal dari perairan umum. Produksi ikan konsumsi di Kabupaten Sleman didominasi oleh ikan nila (merah dan hitam), ikan lele, ikan gurami, ikan mas, ikan *grasscarp*, ikan bawal, mujahir dan udang.

Jumlah produksi ikan konsumsi pada tahun 2016 sebanyak 42.875,2 ton, kemudian naik menjadi 49.730,31 ton pada tahun 2017. Pada tahun 2018 produksi Kembali naik menjadi 59.781,4 ton, kemudian naik

lagi menjadi 67.850 ton pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 produksi turun menjadi 54.552,19 ton.

Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Sleman pada tahun 2016 sebesar 25,65 kg/kapita/tahun, kemudian naik menjadi 28,81 kg/kapita/tahun pada tahun 2017. Pada tahun 2018 tingkat konsumsi ikan turun drastis menjadi 32,55 kg/kapita/tahun, dan tetap pada angka tersebut pada tahun 2019. Tahun 2020 tingkat konsumsi ikan naik menjadi 36,21 kg/kapita/tahun.

Tingkat ketersediaan ikan pada tahun 2016 sebesar 32,11 kg/kapita/tahun, kemudian naik menjadi 32,95 kg/kapita/tahun. Pada tahun 2018 angkanya naik menjadi 33,99 kg/kapita/tahun, kemudian naik lagi menjadi 36,71 kg/kapita/tahun pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 naik lagi menjadi 37,39 kg/kapita/tahun. Hal ini berarti bahwa produksi ikan di Kabupaten Sleman sudah mampu mencukupi kebutuhan konsumsi ikan bagi masyarakat Kabupaten Sleman, dan sisanya dipasarkan ke luar wilayah Sleman, antara lain ke kabupaten/kota di DIY, Klaten, Magelang, dan wilayah lainnya.

Hal yang perlu diperhatikan adalah tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Sleman masih di bawah angka nasional, meskipun sudah lebih tinggi dari DIY. Pada tahun 2020, konsumsi ikan DIY rata-rata hanya berada pada angka 28 kg/kapita/tahun, sedangkan Kabupaten Sleman mencapai 36,21 kg/kapita/tahun dan untuk nasional berada pada angka 56,39 kg/kapita/tahun.

3.2.9. Bidang Sosial

Perkembangan kinerja bidang sosial di Kabupaten Sleman dapat dilihat dengan menggunakan indikator-indikator: persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial, persentase panti sosial yang menerima program pembedayaan sosial, panti sosial yang menyediakan sarana-prasarana pelayanan kesehatan sosial, persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana-prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, dan persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia yang menerima jaminan sosial.

Persentase PMKS di Kabupaten Sleman yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2016-2020 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2016 angkanya sebesar 78,58%, kemudian turun

menjadi 68,69% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 turun lagi menjadi 41,47%, kemudian naik menjadi 70,37% pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 naik lagi menjadi 84,69%. Data PMKS tahun 2020 meliputi 2.518 anak/balita terlantar, 7.446 lanjut usia terlantar, 7.483 penyandang disabilitas dan 49 gelandangan/pengemis.

Persentase panti sosial di Kabupaten Sleman yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok usaha ekonomi sejenis lainnya pada tahun 2017-2020 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016 angkanya sebesar 5,08%, kemudian naik menjadi 5,27% pada tahun 2017. Pada tahun 2018, 2019, dan 2020 terus mengalami penurunan dengan angka masing-masing 3,65%, 0,71%, dan 0,04%.

Panti sosial yang menyediakan sarana-prasarana pelayanan kesehatan dasar pada kurun tahun 2016-2020 terus mengalami kenaikan hingga mencapai angka penuh. Pada tahun 2016 angkanya sebesar 78,95%, kemudian naik menjadi 85,71% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 naik lagi menjadi 90%, kemudian naik lagi menjadi 100% pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 tetap 100%.

Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) di Kabupaten Sleman yang menyediakan sarana-prasarana pelayanan kesejahteraan sosial pada kurun 2016-2020 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2016 angkanya sebesar 100%, kemudian turun menjadi 82,05% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 naik menjadi 86,05%, kemudian naik lagi menjadi 88,89% pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 75,44%.

Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia di Kabupaten Sleman yang menerima jaminan sosial dalam kurun tahun 2016-2020 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2016 angkanya sebesar 67,07%, kemudian turun menjadi 44,48% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 naik menjadi 65,09%, kemudian naik lagi menjadi 80,64% pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 turun menjadi 77,38%.

Analisis

Dalam dokumen ini kemiskinan non konsumsi dikaji melalui Sembilan bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pembangunan desa, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pertanian dan

perkebunan perikanan, serta bidang sosial. Dalam kesembilan bidang itu, posisi relatif Kabupaten Sleman (dibanding kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta) adalah unggul dalam lima bidang dan ada pada posisi tengah dalam empat bidang. Dengan demikian prioritas kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan perlu diberikan kepada empat bidang yang masih dalam posisi tengah tersebut, yaitu bidang ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pertanian dan perkebunan, serta bidang sosial.

Untuk analisa dari segi perkembangan antarwaktu, kondisi Kabupaten Sleman adalah membaik dalam delapan bidang, dan hanya dalam satu bidang yang perkembangannya tetap, yaitu bidang sosial. Dengan demikian upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman perlu lebih memberi perhatian dan prioritas dalam bidang sosial agar perkembangannya terus membaik.

Analisa dari segi efektivitas menunjukkan bahwa kondisi Kabupaten Sleman membaik dalam tujuh bidang dan tergolong “tetap” dalam dua bidang, yaitu bidang ketahanan pangan dan bidang sosial. Dengan demikian upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman perlu memprioritaskan dan terus berusaha meningkatkan efektivitas dalam kedua bidang tersebut.

Analisa dari segi efisiensi menunjukkan bahwa kondisi Kabupaten Sleman telah efisien dalam semua bidang. Hal itu menunjukkan bahwa perkembangan yang terjadi di Kabupaten Sleman telah selaras dengan perkembangan di Daerah Istimewa Yogyakarta maupun perkembangan pada level nasional. Oleh karena itu perlu terus dipertahankan. Rangkuman Analisa kesembilan bidang terkait keiskinan non konsumsi disajikan dalam tabel 3.4.

Tabel 3. 4
Analisa Bidang pada Kemiskinan Non Konsumsi Kabupaten Sleman

No	Bidang	Analisis			
		Posisi relatif	Perkembangan antarwaktu	Efektivitas	Efisiensi
1	Pendidikan	Unggul	Membaik	Membaik	Efisien
2	Kesehatan	Unggul	Membaik	Membaik	Efisien
3	Perumahan & Permukiman	Unggul	Membaik	Membaik	Efisien
4	Pembangunan desa	Unggul	Membaik	Membaik	Efisien
5	Ketenagakerjaan	Tengah	Membaik	Membaik	Efisien
6	Ketahanan pangan	Tengah	Menurun	Tetap	Efisien
7	Pertanian & perkebunan	Tengah	Membaik	Membaik	Efisien
8	Perikanan	Unggul	Membaik	Membaik	Efisien
9	Sosial	Tengah	Tetap	Tetap	Efisien

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM

Uraian pada bab IV ini terdiri atas dua bagian, yaitu bagian prioritas intervensi dan bagian analisa anggaran. Pada bagian prioritas intervensi diuraikan alur pemikiran dalam penentuan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman yang akan menjadi prioritas tahun 2021-2026. Bagian analisa anggaran berisi uraian tentang potensi sumber dana yang dikelola pemerintah Kabupaten Sleman yang dapat digunakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan

4.1. Prioritas Intervensi

Sesuai panduan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 53 Tahun 2020, uraian tentang prioritas intervensi meliputi tujuan, capaian-antara, program prioritas, hubungan sebab-akibat antara program dengan tujuan, serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan prioritas intervensi.

4.1.1. Tujuan

Telah diuraikan pada bab III bahwa profil kemiskinan konsumsi Kabupaten Sleman tergolong unggul. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sleman adalah kedua terkecil di antara kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkembangan persentase dari waktu ke waktu juga cenderung menurun. Hanya pada tahun 2020 terjadi kenaikan lagi akibat adanya pandemi covid-19. Apabila dibandingkan dengan proporsi pada level provinsi dan nasional, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sleman dalam tahun 2016-2020 konsisten selalu lebih rendah. Data tahun 2020 menunjukkan proporsi penduduk miskin di Kabupaten Sleman adalah 8,12%, sedangkan secara nasional 9,78%, dan proporsi DIY ada di atas proporsi nasional, yaitu 12,28%.

Dari segi kemiskinan non konsumsi, secara rerata posisi Kabupaten Sleman pada tahun 2016-2020 juga cenderung membaik, meningkat dan selaras dengan perkembangan pada level provinsi maupun level nasional. Posisi Kabupaten Sleman unggul terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pembangunan desa, ketahanan pangan, pertanian dan perkebunan, serta perikanan. Posisi Kabupaten Sleman kurang unggul hanya dalam bidang ketenagakerjaan dan bidang sosial.

Dengan persentase penduduk miskin yang sudah relatif kecil (satu digit) maka laju penurunannya dimungkinkan tidak bisa sebesar sebelumnya. Meskipun upaya memperkecil proporsi terus dilakukan, pada ujung akhirnya penduduk miskin akan selalu ada. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kondisi kemiskinan konsumsi dan kemiskinan non konsumsi, tujuan utama penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman diarahkan pada tiga hal, yaitu: meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial warga miskin, meningkatnya pendapatan keluarga miskin, dan anak dari keluarga miskin memperoleh pekerjaan formal.

Tujuan yang pertama, yaitu meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial warga miskin, dimaksudkan untuk memastikan bahwa warga miskin memperoleh bantuan dalam memenuhi kebutuhan hidup baik dalam hal konsumsi maupun non-konsumsi. Warga miskin dibantu untuk memperoleh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Tujuan yang kedua, yaitu meningkatnya pendapatan keluarga miskin, dimaksudkan untuk memfasilitasi keluarga miskin yang berusia produktif untuk membuka atau mengembangkan usaha ekonomi produktif guna meningkatkan pendapatan keluarga.

Tujuan yang ketiga, yaitu anak dari keluarga miskin memperoleh pekerjaan formal, dimaksudkan untuk mencegah agar anak-anak dari keluarga miskin kelak ketika membentuk keluarga baru (sudah berumah tangga) tidak masuk dalam golongan keluarga miskin.

4.1.2. Capaian Antara

Capaian-antara untuk tujuan pertama, yaitu meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial warga miskin meliputi:

- a. Meningkatnya peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanggulangan kemiskinan
- b. Meningkatnya perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- c. Terwujudnya ketahanan keluarga
- d. Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai
- e. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak

Capaian-antara untuk tujuan kedua, yaitu meningkatnya pendapatan keluarga miskin, meliputi:

- a. Meningkatnya kesejahteraan petani

- b. Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan
- c. Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi

Capaian-antara untuk tujuan ketiga, yaitu anak dari keluarga miskin memperoleh pekerjaan tetap, meliputi:

- a. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
- b. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
- c. Meningkatnya kesempatan kerja
- d. Meningkatnya kualitas tenaga kerja
- e. Meningkatnya perlindungan terhadap inovasi daerah

4.1.3. Program Prioritas

Program prioritas untuk mewujudkan tujuan pertama, yaitu meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial warga miskin meliputi:

- a. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- b. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
- c. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- d. Program pemberdayaan sosial;
- e. Program rehabilitasi sosial;
- f. Program perlindungan dan jaminan sosial;
- g. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
- h. Program kawasan permukiman;
- i. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
- j. Program pengelolaan persampahan;
- k. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- l. Program perlindungan perempuan;
- m. Program peningkatan kualitas keluarga;
- n. Program perlindungan khusus anak;
- o. Program pengendalian penduduk;
- p. Program pembinaan keluarga berencana;
- q. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.

Program prioritas untuk mewujudkan tujuan kedua, yaitu meningkatnya pendapatan keluarga miskin, meliputi:

- a. Program penyuluhan pertanian;
- b. Program peningkatan diverifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
- c. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
- d. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
- e. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
- f. Program penanganan kerawanan pangan;
- g. Program peningkatan kemampuan pengelolaan perikanan budidaya;
- h. Program perencanaan dan pembangunan industri;
- i. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
- j. Program pendidikan dan latihan perkoperasian;
- k. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- l. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro;
- m. Program pengembangan UMKM;
- n. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- o. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat;
- p. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan.

Program prioritas untuk mewujudkan tujuan ketiga, yaitu anak dari keluarga miskin memperoleh pekerjaan tetap, meliputi:

- a. Program pengelolaan pendidikan;
- b. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
- c. Program penempatan tenaga kerja;
- d. Program penelitian dan pengembangan daerah.

4.1.4. Uraian Sebab-Akibat

Tujuan utama penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman periode tahun 2021-2026 meliputi tiga hal, yaitu: meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial warga miskin, meningkatnya pendapatan keluarga miskin, dan anak dari keluarga miskin memperoleh pekerjaan formal. Capaian-antara untuk tujuan pertama meliputi: meningkatnya peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), meningkatnya perlindungan sosial dan jaminan sosial, terwujudnya ketahanan keluarga,

terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai, dan meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hubungan sebab-akibat antara capaian-antara dan tujuan utama adalah bahwa jika lima capaian antara itu berhasil diwujudkan maka warga miskin bisa memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Capaian-antara untuk tujuan kedua meliputi: meningkatnya kesejahteraan petani, meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan, dan berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Ketiga capaian-antara tersebut merupakan bidang-bidang usaha yang paling mungkin dikerjakan oleh warga miskin. Oleh karena itu jika ketiga caapaian-antara itu berhasil diwujudkan maka terbuka peluang bagi warga miskin untuk bisa memperoleh peningkatan pendapatan.

Capaian-antara untuk tujuan ketiga meliputi: meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, meningkatnya kesempatan kerja, meningkatnya kualitas tenaga kerja, dan meningkatnya perlindungan terhadap inovasi daerah.

Hubungan sebab-akibat antara tujuan yang ketiga dengan capaian-antara adalah: agar anak dari keluarga miskin tidak mewarisi kemiskinan keluarganya maka anak tersebut harus memperoleh penghasilan tetap. Penghasilan tetap bisa diperoleh jika seseorang bekerja pada sektor formal. Oleh karena itu, agar anak dari keluarga miskin bisa memperoleh penghasilan tetap, maka perlu diupayakan agar mereka memperoleh pekerjaan formal.

Agar anak dari keluarga miskin bisa memperoleh pekerjaan formal maka mereka harus sehat jasmani dan rohani, memiliki kualifikasi pendidikan dan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Selain itu, perlu disediakan informasi yang lengkap dan akurat tentang lowongan pekerjaan yang dapat diakses oleh anak dari keluarga miskin. Pada saat yang sama perlu ada topangan inovasi teknologi, khususnya teknologi informasi, guna membantu mereka meningkatkan keterampilan dalam berbagai bidang, yaitu melalui pembelajaran online. Jika keempat hal itu dapat diwujudkan secara paralel maka anak-anak dari keluarga miskin bisa memperoleh pekerjaan formal, baik secara natural maupun dengan dukungan (*endorsement*) dari pemerintah Kabupaten Sleman.

4.1.5. Asumsi-asumsi

Asumsi-asumsi dalam penyusunan prioritas intervensi dalam dokumen ini meliputi:

1. Upaya meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan upaya membantu anak dari keluarga miskin memperoleh pekerjaan formal dapat dilakukan dengan baik apabila terdapat data yang dan profil yang lengkap dan akurat tentang keluarga miskin.
2. Yang dimaksud dengan “anak dari keluarga miskin” adalah anak biologis atau keturunan dari keluarga miskin. Dengan demikian kata “anak” bukan merujuk kepada keadaan fisik atau acuan umur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan melainkan merujuk pada hubungan kekeluargaan atau silsilah.
3. Penyediaan layanan pelatihan keterampilan secara online bisa terlaksana dan membuahkan hasil jika terdapat penyedia konten yang kompeten beserta pendampingan kepada para peserta secara berkesinambungan.

4.2. Analisa Anggaran

4.2.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sleman berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, APBD meliputi aspek pendapatan, aspek belanja dan aspek pembiayaan. Aspek pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah. Aspek belanja terdiri dari Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung. Aspek pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

4.2.1.1 Pendapatan Daerah

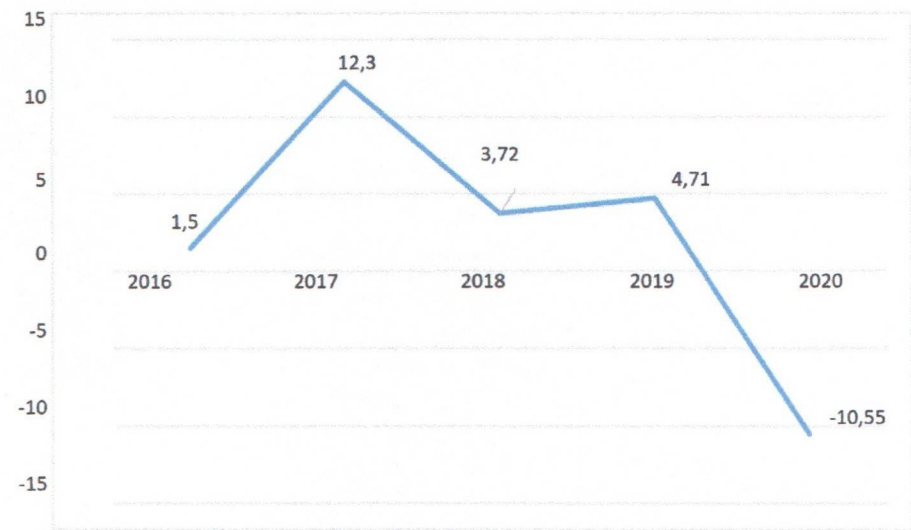
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.

Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah/BUMD) serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Transfer meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer pemerintah pusat meliputi dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Transfer antar daerah meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Lain-lain pendapatan yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah selama tahun 2016 hingga 2020 mengalami kenaikan, dengan laju pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2016 tumbuh 1,50%, tahun 2017 tumbuh 12,30%, tahun 2018 tumbuh 3,72% dan tahun 2019 tumbuh 4,71%. Adapun rata-rata kenaikan pendapatan daerah selama tahun 2015-2019 adalah 6,54%. Pada tahun 2020, pendapatan daerah turun secara signifikan sebesar (10,22%) sehingga rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah selama kurun waktu 2016-2020 hanya sebesar 2,34%. Pertumbuhan pendapatan daerah tersebut ditampilkan pada grafik 4.1.

Grafik 4. 1
Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2016-2020



Sumber : Hasil Analisa, 2021

Tahun 2017 bisa dikatakan sebagai puncak pertumbuhan pendapatan daerah. Selama kurun 2016-2020, pada tahun 2017 itulah terjadi peningkatan pendapatan daerah paling tinggi dibanding tahun yang lain karena sumber-sumber pendapatan daerah semuanya mengalami peningkatan cukup besar. PAD naik sebesar 15,13%. Dana Perimbangan naik sebesar 2,29% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah naik sebesar 64,32%. Pada tahun 2018 dan 2019 sumber-sumber pendapatan daerah tetap mengalami kenaikan namun tidak lagi sebesar kenaikan pada tahun 2017.

Tahun 2020, dimana pandemi COVID-19 telah mempengaruhi kinerja ekonomi, pendapatan daerah terkoreksi secara signifikan. Hal ini menyebabkan proyeksi dan target pendapatan daerah yang direncanakan tidak dapat tercapai. Pada tahun 2020 pendapatan daerah turun sebesar -10,55% dibandingkan tahun 2019. PAD turun -18,91% karena sumber-sumber PAD mengalami hambatan kegiatan. Dana Perimbangan juga berkurang sebesar -7,25%. Lain-lain Pendapatan yang Sah turun sebesar 3,30%. Secara lengkap, perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Sleman tahun 2015-2020, sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel 4. 1
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN DAERAH	2.294.622.764.756,12	2.329.097.456.006,80	2.615.515.097.398,98	2.712.794.080.456,21	2.840.636.285.803,45	2.541.050.870.612,73
Pendapatan Asli Daerah	643.130.079.828,03	717.151.176.028,57	825.637.751.681,82	894.272.961.557,85	972.049.575.206,45	788.246.742.427,73
Pajak daerah	373.137.768.070,80	407.675.230.792,56	528.453.215.727,18	596.559.264.609,83	650.084.598.498,00	499.961.975.136,00
Retribusi daerah	45.052.207.026,81	43.217.124.390,15	48.706.088.818,85	47.760.996.920,00	57.632.637.863,00	40.971.519.904,00
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Bagian laba BUMD)	34.330.598.540,50	42.031.674.753,95	36.292.784.407,97	34.654.443.121,29	36.733.513.628,55	47.565.772.690,28
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	190.609.506.189,92	224.227.146.091,91	212.185.662.727,82	215.298.256.906,73	227.598.825.216,90	199.747.474.697,45
Dana perimbangan	1.080.162.444.931,00	1.384.675.221.762,00	1.416.428.331.296,00	1.368.717.993.794,00	1.371.364.974.325,00	1.271.979.511.950,00
Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	38.281.936.931,00	66.604.303.616,00	60.499.721.072,00	50.685.431.396,00	33.935.956.742,00	59.999.743.515,00
Dana alokasi umum	984.410.612.000,00	1.014.310.630.000,00	996.492.454.000,00	996.492.454.000,00	1.035.862.077.000,00	938.351.449.000,00
Dana alokasi khusus	29.421.080.000,00	240.745.571.146,00	278.580.346.224,00	321.540.108.398,00	301.566.940.583,00	273.628.319.435,00
Alokasi Dana Desa dari APBN	28.048.816.000,00	63.014.717.000,00	80.855.810.000,00			
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	571.330.239.997,09	227.271.058.216,23	373.449.014.421,16	449.803.125.104,36	497.221.736.272,00	480.824.616.235,00
Pendapatan Hibah	5.132.097.396,00	8.947.518.750,00	8.712.131.733,00	82.204.905.633,00	80.359.600.000,00	135.660.122.645,00
Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	198.089.393.601,09	205.041.339.466,23	214.366.369.383,86	234.123.774.471,36	243.660.619.272,00	223.286.778.345,00
Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	27.241.950.000,00	8.282.200.000,00	17.655.805.907,00	786.747.000,00	2.319.000.000,00	48.418.617.245,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat						

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	340.866.799.000,00	5.000.000.000,00	52.588.927.000,00	132.687.698.000,00	170.882.517.000,00	73.459.098.000,00
-- Dana Insentif Daerah						
- Dana Tunjangan Pendidikan (BOSNAS)			80.125.780.397,30			
Pendapatan dari Piutang PBB yang belum diserahterimakan						
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.294.622.764.756,12	2.329.097.456.006,80	2.615.515.097.398,98	2.712.794.080.456,21	2.840.636.285.803,45	2.541.050.870.612,73

Sumber: DPKAD Kabupaten Sleman, 2021

Peran Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu 2016-2019 (sebelum pandemi Covid-19) semakin meningkat, meskipun belum menjadi yang paling dominan dalam struktur pendapatan daerah karena kontribusi PAD dalam struktur pendapatan daerah masih berada di bawah Dana Perimbangan. Peran PAD dalam struktur Pendapatan daerah berturut-turut selama tahun 2016-2020 adalah 30,79%, 31,57%, 32,97%, 34,22% dan 31,02%. Rata-rata kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah selama kurun waktu 2016-2020 adalah 32,11%. Adanya trend kenaikan porsi PAD dalam pendapatan daerah menunjukkan adanya kemauan yang baik dari Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

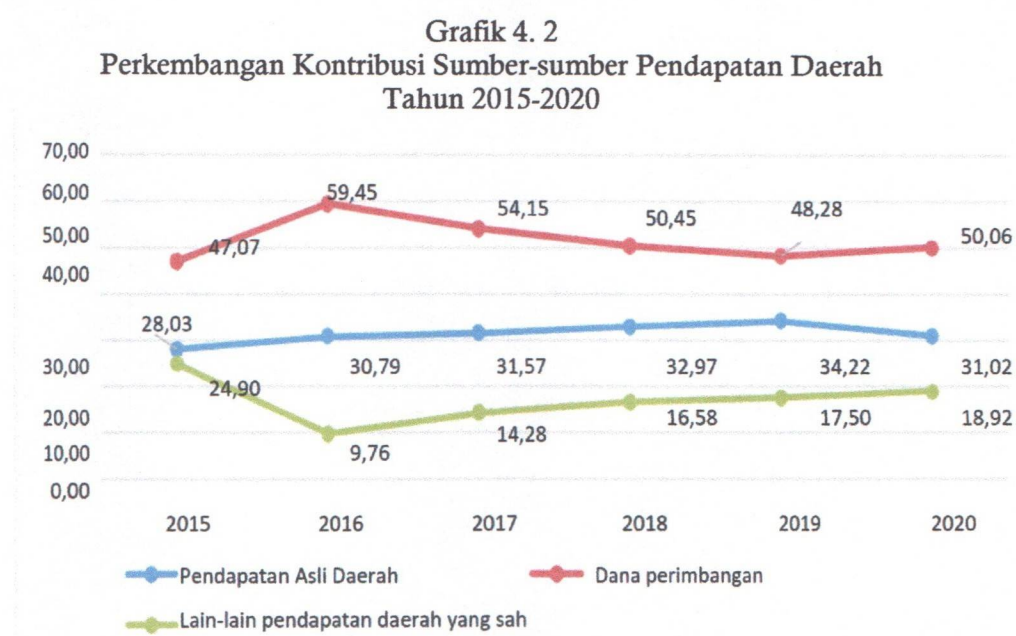
Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020 memberikan dampak kepada PAD Kabupaten Sleman yaitu berkurangnya PAD karena target pajak dan retribusi dari sumber-sumbernya tidak dapat dicapai. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 788.355.525.509,73 atau turun sebesar 18,89% dari realisasi PAD pada tahun 2019.

Trend peran Dana Perimbangan pada pendapatan daerah selama 2016-2020 adalah fluktuatif, berturut-turut adalah 47,07%, 59,45%, 54,15%, 50,45% dan 48,28% dan 50,06%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2016 terjadi peningkatan signifikan pada komponen Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa yang menyebabkan pertumbuhan Dana Perimbangan meningkat menjadi 28,19% dan kontribusi terhadap pendapatan daerah pada tahun tersebut mencapai persentase tertinggi yaitu 59,45%. Namun mulai tahun 2017 kontribusinya menurun menjadi 54,15% dan menurun lagi di tahun 2018 menjadi 53,44% dan pada tahun 2019 peran dana perimbangan sebesar 48,28%. Angka itu kemudian sedikit meningkat pada tahun 2020 yang mana pada tahun 2020 kontribusi Dana Perimbangan adalah 50,06%.

Rata-rata per tahun kontribusi dana perimbangan adalah 52,48%. Sejak tahun 2017 hingga 2019, terjadi trend yang menurun pada kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah meskipun secara absolut terjadi fluktuasi pada besarnya dana perimbangan yang diterima. Penerimaan Dana Perimbangan pada

tahun 2020 berkurang dibandingkan tahun 2019. Unsur Dana Perimbangan yang penerimaannya lebih kecil dibandingkan tahun 2019 adalah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, sedangkan pada Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak penerimaan tahun 2020 sedikit naik dibanding tahun 2019.

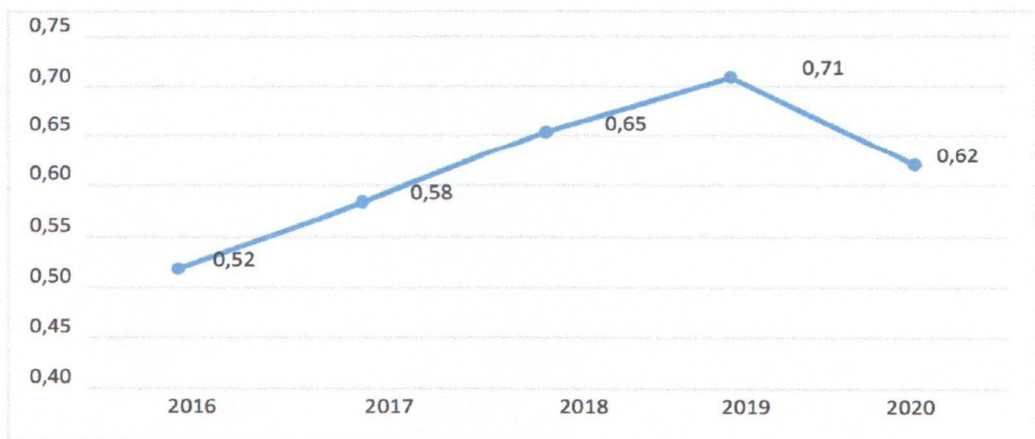
Rata-rata kontribusi per tahun selama 2015-2019 sumber pendapatan daerah yang berupa Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah 16,60%. Adapun trend peran Lain-lain pendapatan daerah adalah fluktuatif namun cenderung menurun, ialah 22,59% pada tahun 2014, 24,90% pada tahun 2015, turun menjadi 9,76% pada tahun 2016, naik menjadi 14,28% pada tahun 2017, dan naik menjadi 16,58% di tahun 2018 dan naik lagi menjadi 17,50% pada tahun 2019 dan 18,92% pada tahun 2020. Perkembangan kontribusi sumber pendapatan daerah Kabupaten Sleman tahun 2015–2020 ditampilkan pada grafik 4.2.



Sumber: Hasil Analisis, 2021

Kemandirian keuangan Kabupaten Sleman dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Perimbangan yang diterima. Dari analisis diketahui bahwa pada periode 2016-2020 terdapat kecenderungan kemandirian daerah yang semakin meningkat. Perkembangan kemandirian daerah (Perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Perimbangan) pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada grafik 4.3.

Grafik 4. 3
Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2016-2020

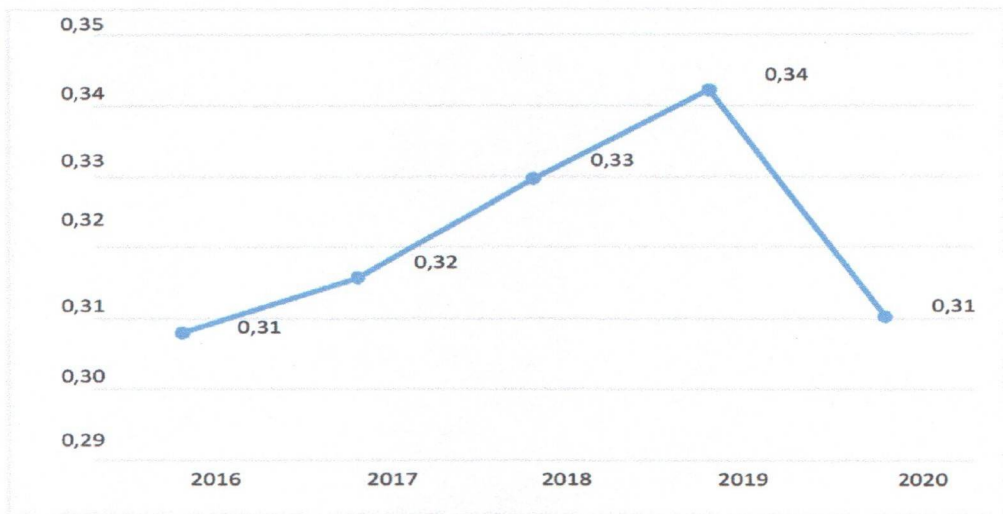


Sumber: hasil analisis, 2021

Pada tahun 2016-2019, kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sleman selalu meningkat seiring dengan meningkatnya PAD Kabupaten Sleman. Pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19, kemandirian keuangan terdampak pula disebabkan PAD menurun dibandingkan tahun 2019 sehingga kemandirian keuangan berada pada angka 0,62.

Apabila dianalisa tentang desentralisasi fiskal, yakni dengan membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah, diperoleh hasil adanya trend yang semakin meningkat dari tahun 2016 hingga 2019. Pada tahun 2016 derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sleman adalah 0,31. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 0,34. Pada tahun 2020 desentralisasi fiskal menjadi 0,31 (lebih rendah dibandingkan tahun 2019). Kondisi ini mirip dengan kondisi pada tahun 2016. Selengkapnya dapat dicermati pada Gambar 4.4.

Grafik 4. 4
Perkembangan Tingkat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sleman
Tahun 2016-2020 (%)



Sumber: Hasil analisis, 2021

4.2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Pada era otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi pendorong utama bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Semakin tinggi PAD maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah kepada dana transfer pusat ke daerah. Pada periode 2016-2019 PAD Kabupaten Sleman tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 10,91%. Pada tahun 2016, angka PAD Kabupaten Sleman adalah Rp.717.151.176.028,57 menjadi Rp972.049.575.206,45 pada tahun 2019 atau meningkat 35,54%. Pada tahun 2020 PAD Kabupaten Sleman menurun jika dibandingkan PAD tahun 2019 sebagai dampak terjadinya pandemi. Pada tahun 2020 PAD Kabupaten Sleman adalah Rp.788.246.742.427,73 dan karena terkoreksi secara signifikan pada tahun 2020 (tumbuh sebesar – 18,91%) maka rata-rata pertumbuhan PAD selama tahun 2016-2020 hanya sebesar 4,95%.

Komponen Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Perkembangan komponen Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2
Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 (Rupiah)

Tahun	Jenis Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)				
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Bagian Laba BUMD)	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Total Pendapatan Asli Daerah
2016	407.675.230.792,56	43.217.124.390,15	42.031.674.753,95	224.227.146.091,91	717.151.176.028,57
2017	528.453.215.727,18	48.706.088.818,85	36.292.784.407,97	212.185.662.727,82	825.637.751.681,82
2018	596.559.264.609,83	47.760.996.920,00	34.654.443.121,29	215.298.256.906,73	894.272.961.557,85
2019	650.084.598.498,00	57.632.637.863,00	36.733.513.628,55	227.598.825.216,90	972.049.575.206,45
2020	499.961.975.136,00	40.971.519.904,00	47.565.772.690,28	199.747.474.697,45	788.246.742.427,73
Rerata Perubahan PAD	7,53%	0,31%	7,95%	1,44%	4,95%

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman, 2021

Dalam APBD Kabupaten Sleman periode 2016-2020 target Pendapatan Asli Daerah diasumsikan selalu meningkat dari tahun ke tahun dengan laju pertumbuhan yang berbeda. Realisasi atas penerimaan PAD selama periode tersebut selalu dapat melampaui target. Namun demikian terdapat sedikit perbedaan antara target dan realisasi dalam hal laju pertumbuhan PAD. Angka target dan realisasi PAD selama periode 2015-2019 ditampilkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 3
Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah
Pada APBD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Pertumbuhan (%)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)	Rasion Efektivitas (%)
2016	648.841.915.155,32	12,34	717.151.176.028,57	11,51	110,53
2017	718.151.492.310,00	10,68	825.637.751.681,82	15,13	114,97
2018	821.071.767.742,63	14,33	894.272.961.557,85	8,31	108,92
2019	903.278.920.723,56	10,01	972.049.575.206,45	8,70	107,61
2020	676.743.940.021,93	(25,08)	788.246.742.427,73	(18,91)	116,48

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman, 2021

Pada tabel 3.5. dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2016-2019 realisasi PAD selalu melampaui target, dengan rasio efektivitas berkisar antara 110,53% hingga 107,61%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman sudah efektif dalam melakukan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah. Pada tahun 2020, ketika pandemi Covid-19 melanda dan pada triwulan kedua perekonomian bergerak sangat lambat, Pemerintah Kabupaten Sleman merevisi target PAD. Triwulan IV perekonomian sudah mulai bergerak, pariwisata dan perdagangan menggeliat, memberi manfaat kepada PAD sehingga perolehan PAD dapat melampaui target yang ditetapkan, namun jumlahnya masih dibawah PAD pada tahun 2017-2019.

4.2.1.3. Dana Perimbangan

Instrumen utama desentralisasi fiskal di Indonesia adalah dana transfer ke daerah. Dana transfer terdiri dari Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan. Dana Perimbangan merupakan komponen terbesar dari dana transfer ke daerah. Dana perimbangan bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan merupakan

pendanaan yang dimaksudkan untuk mengatasi ketimpangan vertikal dan horizontal antar daerah. Dana Perimbangan Daerah berperan penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Pemerintah Daerah. Setiap jenis dana perimbangan mempunyai peran masing-masing.

Dana bagi hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) berperan sebagai pemerataan fiskal antar daerah (*fiscal equalization*) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berperan sebagai dana yang didasari oleh adanya kebijakan khusus untuk membiayai pelaksanaan program prioritas nasional di daerah. Pemanfaatan dana perimbangan diserahkan kepada daerah sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat secara efektif dan efisien menggunakan dana ini untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Selama tahun 2015-2020, Dana Perimbangan rata-rata pertahun tumbuh sebesar 4,01% dengan trend yang menurun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 dikarenakan dari tahun 2015 ke tahun 2016 DAU naik dari Rp984.410.612.000,- menjadi Rp1.014.310.630.000,- dan DAK naik dari Rp29.421.080.000 menjadi Rp240.745.571.146.- Meskipun selama periode 2015-2016 pendapatan DAU meningkat, namun pada tahun 2017 dan 2018 penerimaan DAU sedikit turun dibandingkan tahun 2016.

Dana Alokasi Khusus naik pesat pada tahun 2016, ketika pada tahun 2015 DAK yang diterima adalah sebesar Rp29.421.080.000,- menjadi Rp240.745.571.146,00 pada tahun 2016, naik menjadi Rp278.580.346.224,00 pada tahun 2017 dan kembali naik cukup signifikan menjadi Rp321.540.108.398,00 pada tahun 2018 tetapi pada tahun 2019 turun menjadi Rp301.566.940.583,00.

Alokasi Dana Desa dari APBN yang dilaksanakan mulai 2015, mempunyai trend meningkat setiap tahunnya, yakni sebesar Rp28.048.816.000,00 pada tahun 2015, meningkat menjadi Rp63.014.717.000,00, bertambah menjadi Rp80.855.810.000,00 pada tahun 2017 dan naik sedikit menjadi Rp81.187.698.000,00 pada tahun 2018. Mulai tahun 2018, Alokasi Dana Desa (ADD) tidak berdiri sendiri sebagai bagian dari Dana Perimbangan karena sudah masuk ke dalam komponen DAU.

4.2.1.4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari pendapatan Hibah, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, dan Dana Penyesuaian Otonomi Khusus. Laju pertumbuhan rata-rata per tahun pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah 6,36%. Komponen Pendapatan Hibah rata-rata tumbuh 196,37%, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota rata-rata tumbuh 2,6%, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya pertumbuhannya 426,14%. Angka Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disajikan pada tabel 4.4.

Tabel 4. 4
Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Yang Bersumber Dari Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	227.271.058.216,23	373.449.014.421,16	449.803.125.104,36	497.221.736.272,00	480.824.616.235,00
Pendapatan Hibah	8.947.518.750,00	8.712.131.733,00	82.204.905.633,00	80.359.600.000,00	135.660.122.645,00
Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	205.041.339.466,23	214.366.369.383,86	234.123.774.471,36	243.660.619.272,00	223.286.778.345,00
Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	8.282.200.000,00	17.655.805.907,00	786.747.000,00	2.319.000.000,00	48.418.617.245,00
Bantuan keuangan Pemerintah Pusat:					
1.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.000.000.000,00	52.588.927.000,00	132.687.698.000,00	170.882.517.000,00	73.459.098.000,00
2.Dana Insentif Daerah					-
3.Dana Tunjangan Pendidikan (BOSNAS)		80.125.780.397,30			
Pertumbuhan	-60,22	64,32	20,45	10,54	-3,30

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman, 2021

4.2.2 Analisis Rasio Pendapatan Daerah

Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis ini dapat digunakan untuk mengintepretasikan perkembangan kinerja pendapatan dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Dalam kajian ini digunakan rasio kemandirian daerah dan derajat desentralisasi.

4.2.2.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan. Perkembangan rasion kemandirian Keuangan disajikan pada tabel 4.5.

Tabel 4. 5
Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Sleman
Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Rasio Kemandirian = PAD/Dana Perimbangan
1	2	3	4 = (2/3)
2016	717.151.176.028,57	1.384.675.221.762,00	0,52
2017	825.637.751.681,82	1.416.428.331.296,00	0,58
2018	894.272.961.557,85	1.449.905.691.794,00	0,62
2019	972.049.575.206,45	1.371.364.974.325,00	0,71
2020	788.246.742.427,73	1.271.979.511.950,00	0,62

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman, 2021

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan Kabupaten Sleman berkecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 rasio kemandirian lebih rendah daripada tahun 2019 dikarenakan Pendapatan Asli Daerah Dana tidak mencapai target yang direncanakan karena terdampak Pandemi Covid-19.

4.2.2.2. Rasio Desentralisasi Fiskal

Dengan prinsip otonomi daerah, undang-undang mewajibkan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dengan prinsip

peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam pengelolaan urusan rumah tangganya, yaitu dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial yang ada di daerah tersebut. Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya terlihat dari perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang positif di sisi penerimaan.

Struktur hubungan pemerintah pusat dan daerah dapat diketahui dengan menggunakan indikator Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Derajat Desentralisasi Fiskal dapat digunakan sebagai indikator kemandirian suatu daerah dalam pembiayaan pembangunan. DDF diukur dengan membandingkan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah, rasio dana transfer pusat terhadap total penerimaan daerah, dan rasio bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap total penerimaan daerah. Dengan melihat struktur realisasi penerimaan Kabupaten Sleman, maka dapat dianalisis besarnya derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Sleman seperti terlihat pada tabel 4.6.

Tabel 4. 6
Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2016-2020 (%)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
Rasio PAD terhadap total penerimaan daerah	30,79	31,57	32,97	34,22	31,02	32,114
Rasio bagi hasil pajak/bukan pajak terhadap total penerimaan daerah	2,86	2,31	1,87	1,19	2,36	2,118
Rasio dana transfer pusat terhadap total penerimaan daerah	59,45	54,15	50,45	48,28	69,98	56,462

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman, 2021

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) Kabupaten Sleman rata-rata masih 32,114%, yang mengindikasikan bahwa besarnya PAD masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Hal ini berarti tingkat kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan masih relatif rendah.

Ketergantungan pembiayaan daerah Kabupaten Sleman terhadap Pusat dapat pula dilihat dari rasio dana transfer Pusat terhadap total penerimaan daerah. Tahun 2020 pada saat ekonomi daerah lesu karena pandemi Covid-19, ketergantungan kepada Pusat meningkat disebabkan PAD menurun secara signifikan dibanding tahun 2019.

Dilihat dari derajat desentralisasi perpajakan yang diukur dari rasio bagi hasil pajak dan bukan pajak nilainya relatif rendah yaitu rata-rata hanya 2,118% dalam kurun waktu tahun 2016 sampai 2020. Relatif rendahnya derajat desentralisasi perpajakan juga dapat menunjukkan bahwa pajak yang produktif, baik jenis pajak langsung maupun pajak tidak langsung belum menjadi kewenangan pemerintah daerah secara administrasi.

4.2.2.3 Belanja Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah juga dapat dilihat dari sisi belanja daerah selama periode tertentu. Kinerja ini ditunjukkan oleh seberapa besar penerimaan daerah digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan belanja daerah, baik belanja yang sifatnya rutin maupun belanja non rutin. Tabel 4.7 menunjukkan besaran belanja yang terjadi selama tahun 2016-2020 di Kabupaten Sleman.

Tabel 4.7 pada halaman berikut menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah selalu meningkat, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung lebih besar daripada rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung. Rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung tahun 2015-2019 adalah 11,78% sedangkan rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung tahun 2016-2020 adalah 3,75. Rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung pada tahun 2015-2019 adalah sebesar 5,38% sedangkan rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung tahun 2016-2020 adalah 0,40.

Pos Belanja Tidak Langsung, selama periode 2015-2019 meskipun terdapat trend menurun, besarnya masih lebih dari 50% keseluruhan Belanja Daerah. Belanja Tidak Langsung digunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, dan Partai Politik serta Belanja Tidak Terduga. Pos Belanja Pegawai menempati porsi terbesar Belanja Tidak Langsung dengan trend yang fluktuatif. Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2020 meningkat secara signifikan dibanding tahun 2019 dikarenakan ada Pandemi Covid-19 dan dana sosial tersebut disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Tabel 4. 7
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Belanja Daerah	2.455.446.948.874,24	2.489.596.631.327,52	2.580.093.717.989,06	2.776.995.369.322,82	2.532.169.209.185,59	1,86
Belanja Tidak Langsung	1.380.996.251.480,47	1.299.646.259.688,98	1.290.867.655.413,00	1.400.760.682.415,83	1.312.733.724.175,51	0,40
Belanja Pegawai	1.097.707.839.367,23	950.142.604.624,18	925.330.430.469,00	955.311.451.153,34	918.406.370.293,51	2,10
Belanja Bunga	3.021.102.416,00	2.358.580.867,00	1.574.098.880,00	815.138.250,00	89.787.135,00	175,02
Belanja Subsidi					-	
Belanja Hibah	40.024.505.000,00	47.965.959.800,00	52.751.833.680,00	75.869.738.900,00	122.109.390.061,00	22,64
Belanja Bantuan Sosial	29.383.789.000,00	34.694.686.100,00	29.112.937.900,00	29.342.042.220,00	53.395.042.950,00	12,13
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	43.485.614.551,00	48.747.897.642,00	61.204.231.336,00	69.147.719.976,00	50.698.247.953,00	12,13
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerin- tahan Desa Dan Partai Politik	166.884.663.874,24	214.565.611.722,80	220.758.430.850,00	270.003.466.916,49	147.873.408.170,00	5,95
Belanja Tidak Terduga	488.737.272,00	1.170.918.933,00	135.692.298,00	271.125.000,00	20.161.477.613,00	6,67
Belanja Langsung	1.074.450.697.393,77	1.189.950.371.638,54	1.289.226.062.576,06	1.376.234.686.906,99	1.219.435.485.010,08	3,75
Belanja Pegawai	165.659.692.724,00	178.352.823.667,00	211.105.892.006,00	209.024.004.368,00	228.951.089.500,00	7,15
Belanja Barang Dan Jasa	564.788.678.438,44	630.970.493.075,82	666.807.766.001,50	715.679.321.681,52	629.417.627.418,50	8,24
Belanja Modal	344.002.326.231,33	380.627.054.895,72	411.312.404.568,56	451.531.360.857,47	361.066.768.091,58	(2,19)
Jumlah Belanja	2.455.446.948.874,24	2.489.596.631.327,52	2.580.093.717.989,06	2.776.995.369.322,82	2.532.169.209.185,59	1,86
Surplus/(Defisit)	(126.349.492.867,44)	125.918.466.071,46	132.700.362.467,15	63.640.916.480,63	8.881.661.427,14	12,43
Persentase surplus/(defisit)	(5,42)	4,81	4,89	2,24	0,35	

Sumber : BKAD Kabupaten Sleman, 2021

Pos Belanja Bunga selama tahun 2015-2019 berfluktuasi, tergantung keperluan masing-masing tahun. Pada tahun 2016-2018 belanja bunga cukup banyak dikarenakan pembayaran bunga atas pinjaman daerah untuk pembangunan RSUD Sleman. Pada tahun 2020 belanja bunga sudah menurun dibanding periode sebelumnya karena sudah mendekati akhir penyelesaian pinjaman daerah.

Belanja Hibah pada tahun 2020 lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan hibah kepada KPU Kabupaten Sleman terkait dengan agenda PILKADA dan PILKADES secara serentak.

Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa mempunyai trend yang meningkat seiring dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah karena Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa tergantung kepada besaran pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pos Belanja Langsung terdapat trend yang meningkat dari waktu ke waktu, dari Rp1.029.954.405.201,42,- pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp1.376.234.686.906,99,- pada tahun 2019. Rata-rata pertumbuhan per tahun Belanja Langsung adalah 11,73%. Meskipun rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung cukup tinggi namun pada tahun 2016-2019 pertumbuhannya di bawah rata-rata yakni 4,32% pada tahun 2016, kemudian 10,75% pada tahun 2017, selanjutnya 8,34% pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 sebesar 6,75%. Hanya pada tahun 2015 Belanja Langsung yang tumbuhnya diatas pertumbuhan rata-rata tahunan, yakni sebesar 28,49%.

Pada tahun 2020 Belanja Langsung menurun dari tahun sebelumnya karena kondisi keuangan daerah terdampak pandemi. Selain dilakukan refocusing anggaran, juga dilakukan rasionalisasi anggaran, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Realisasi atau penyerapan anggaran pada Belanja Daerah selama tahun 2015-2019 secara umum di atas 80%, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Penyerapan yang rendah ada pada belanja tak terduga. Pada tahun 2020 Belanja Tak terduga naik secara fantastis dibanding tahun-tahun sebelumnya

Belanja tak terduga digunakan untuk penanganan Covid-19 dan erupsi Gunungapi Merapi. Angka-angka selengkapnya disajikan pada tabel 4.8.

Tabel 4. 8
Proporsi Realisasi Belanja Daerah Terhadap
Anggaran Belanja Kabupaten Sleman Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Tidak Langsung	0,85	0,94	0,87	0,89	0,91	0,84
Belanja Pegawai	0,85	0,94	0,85	0,87	0,89	0,91
Belanja Bunga	0,17	0,76	0,88	0,84	0,44	0,64
Belanja Subsidi						
Belanja Hibah	0,96	0,94	0,99	0,96	0,98	0,97
Belanja Bantuan Sosial	0,92	0,89	0,78	0,85	0,91	0,82
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	0,88	0,95	0,97	0,99	0,95	0,98
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	0,96	1,00	0,99	0,99	1,00	0,57
Belanja Tidak Terduga	0,01	0,13	0,20	0,01	0,04	0,35
Belanja Langsung	0,83	0,91	0,88	0,89	0,87	0,91
Belanja Pegawai	0,93	0,95	0,96	0,96	0,94	0,93
Belanja Barang Dan Jasa	0,84	0,89	0,89	0,89	0,90	0,90
Belanja Modal	0,79	0,92	0,83	0,86	0,81	0,91
Jumlah Belanja	0,84	0,93	0,88	0,89	0,89	0,87

4.2.2.4. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang tidak akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Sleman tahun 2016-2019 secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.9.

Sumber Penerimaan Pembiayaan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya. Selama tahun 2016-2020 SiLPA berfluktuasi turun-naik. Tahun 2016-2017 trend menurun, namun dari 2017 ke 2018 meningkat. SiLPA yang besar menunjukkan kurangnya kecermatan perhitungan dalam perencanaan pendapatan dan belanja.

Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Hutang. Penyertaan Modal dilakukan kepada BUMD Bank BPD DIY, Bank Sleman dan PDAM. Adapun pembayaran pokok hutang adalah pembayaran atas pokok hutang RSUD Sleman.

Tabel 4. 9
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata Pertumbuhan (%)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	479.716.888.141,02	337.768.495.273,58	417.658.961.346,00	403.042.566.398,15	398.584.982.878,78	(2,92)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	478.521.631.855,02	337.768.495.273,58	417.658.961.346,00	403.042.566.398,15	398.584.982.878,78	(2,92)
Pencairan Dana Cadangan						
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
Penerimaan pinjaman daerah	1.195.256.286,00					
Penerimaan Kembali pemberian pinjaman						
Penerimaan piutang Daerah						
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	479.716.888.141,02	337.768.495.273,58	417.658.961.346,00	403.042.566.398,15	398.584.982.878,78	(4,02)
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	15.598.900.000,00	46.027.999.999,04	147.316.757.415,00	68.098.500.000,00	26.920.832.137,00	
Pembentukan Dana Cadangan						
Penyertaan modal / investasi Pemerintah Daerah	8.578.900.000,00	39.007.999.999,04	140.296.757.415,00	61.078.500.000,00	23.044.201.137,00	88,74
Pembayaran pokok utang	7.020.000.000,00	7.020.000.000,00	7.020.000.000,00	7.020.000.000,00	3.876.631.000,00	
Pemberian pinjaman Daerah						
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	15.598.900.000,00	46.027.999.999,04	147.316.757.415,00	68.098.500.000,00	26.920.832.137,00	
Pembiayaan Netto	464.117.988.141,02	291.740.495.274,54	270.342.203.931,00	334.944.066.398,15	371.664.150.741,78	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	337.768.495.273,58	417.658.961.346,00	403.042.566.398,15	398.584.982.878,78	380.545.812.168,92	

4.2.3. Analisa Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar dapat tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Sleman diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Perimbangan selama periode 2016-2019 menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah, yakni rata-rata 51,88%. Pada tahun 2020 proporsi Dana Perimbangan mencapai 50,06%, lebih tinggi dibandingkan proporsi pada tahun 2019 yang sebesar 48,28%.

4.2.3.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Sesuai ketentuan, belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja dan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kewenangan tersebut terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut

diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selama periode tahun 2016-2019, dari keseluruhan belanja Daerah Kabupaten Sleman, proporsi Belanja Tidak langsung masih lebih dari 50% meskipun terdapat trend yang menurun. Sebaliknya proporsi Belanja Langsung terdapat trend yang meningkat namun masih tetap kurang dari 50%. Komponen-komponen dalam Belanja Tidak Langsung adalah Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik.

Dari beberapa komponen itu, Belanja Pegawai mengambil porsi terbesar dengan rata-rata proporsi per tahun selama 2016-2019 adalah 39,51% dari keseluruhan belanja daerah. Sementara itu, komponen lain dalam Belanja Tidak Langsung hanyalah sedikit saja proporsinya. Belanja pegawai dalam Belanja Tidak Langsung cukup menyedot anggaran dikarenakan dalam Belanja Pegawai itu dibayarkan gaji ASN dan guru negeri.

Belanja aparatur, selain dari pos Belanja Pegawai dalam Belanja Tidak Langsung, juga berasal dari Belanja Langsung yang antara lain dari Pos Belanja honorarium PNS dan non PNS, Belanja uang Lembur, Belanja beasiswa pendidikan PNS, Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja Premi asuransi Kesehatan, Belanja makanan dan minuman pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja bahan habis pakai, belanja bahan/material, belanja perawatan kendaraan bermotor, dan belanja pemeliharaan. Selama tahun 2016-2020 rata-rata proporsi belanja aparatur masih tinggi yakni 55,95%. Perbandingan antara pemenuhan kebutuhan aparatur dengan belanja daerah disajikan pada Tabel 4.10.

Tabel 4. 10
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

Tahun	Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Proporsi Belanja Aparatur thd Belanja Daerah (%)
2016	1.083.603.497.479,00	2.455.446.948.874,24	44,13
2017	1.494.630.193.087,86	2.489.596.631.327,52	60,04
2018	1.545.232.831.501,05	2.580.093.717.989,06	59,89
2019	1.598.845.539.102,79	2.776.995.369.322,82	57,57
2020	1.471.788.158.006,61	2.532.169.209.185,59	58,12
Rata-rata			55,95

Sumber: BKAD Kab Sleman, 2021

Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada pos Belanja Honorarium PNS telah berkecenderungan menurun. Pada tahun 2016 sebesar Rp64.731.225.438,00 menjadi Rp31.786.472.575,00 pada tahun 2019. Belanja makan dan minum pegawai dan Belanja perjalanan dinas, selama 5 tahun terjadi penambahan yang signifikan, trend selalu meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah selama 2016-2019, masih berorientasi kepada aparatur.

4.2.3.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan terdiri dari komponen penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sebagai sumber utama Penerimaan pembiayaan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Pada tahun 2015 dan 2016 selain bersumber dari dana SiLPA, penerimaan pembiayaan juga berasal dari penerimaan pinjaman daerah. Untuk tahun yang lainnya sumber penerimaan pembiayaan adalah SiLPA saja. Sementara itu pengeluaran pembiayaan daerah terutama adalah untuk pembayaran pokok hutang dan untuk penyertaan modal/investasi pemerintah daerah. Kondisi pembiayaan daerah terlihat pada Tabel 4.11. Adapun SiLPA, selain untuk pengeluaran pembiayaan, SiLPA dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran apabila belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah

Tabel 4. 11
Defisit Riil Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015-2020

No	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp.)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.294.622.764.756,12	2.329.097.456.006,80	2.615.515.097.398,98	2.712.794.080.456,21	2.840.636.285.803,45	2.541.050.870.612,73
Dikurangi realisasi:							
2	Belanja Daerah	2.328.751.919.925,33	2.455.446.948.874,24	2.489.596.631.327,52	2.580.093.717.989,06	2.776.995.369.322,82	2.532.169.209.185,59
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	17.835.252.500,00	15.598.900.000,00	46.027.999.999,04	147.316.757.415,00	68.098.500.000,00	26.920.832.137,00
Defisit riil = 1-(2+3)		(51.964.407.669)	(141.948.392.867)	79.890.466.072,42	(14.616.394.948)	(4.457.583.519)	(18.039.170.710,00)

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman, 2021

4.2.4. Anggaran Penanggulangan Kemiskinan

Untuk mengetahui perkiraan besarnya anggaran penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sleman tahun 2021-2026, perlu diperhatikan anggaran penanggulangan kemisknan pada periode sebelumnya. Data mengenai anggaran sebelumnya digunakan sebagai proyeksi.

Anggaran kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman pada tahun 2019 dan tahun 2020 meliputi dua puluh kegiatan. Kedua puluh kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang langsung menysasar warga miskin, yakni warga miskin memperoleh manfaat secara langsung dari kegiatan tersebut. Dengan kata lain, anggaran untuk dua puluh kegiatan tersebut merupakan anggaran khusus untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau dahulu disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pada anggaran tahun 2020 hampir semua kegiatan mengalami kenaikan alokasi jika dibandingkan dengan alokasi pada tahun 2019. Hal itu menunjukkan adanya kesungguhan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penanggulangan kemiskinan. Data mengenai anggaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman pada tahun 2019 dan 2020 disajikan dalam tabel 4.12.

Tabel 4. 12
Anggaran Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Langsung
Kabupaten Sleman Tahun 2019 dan 2020

No	Kegiatan	Anggaran tahun 2019	Anggaran tahun 2020	Sumber Anggaran
1	Bantuan Pangan Non Tunai	72.122.710.000	146.373.700.000	APBN
2	Bantuan PKH	149.386.350.000	144.417.534.000	APBN
3	Bantu LU (Bantuan Bertujuan Lanjut Usia)	840.000.000	-	APBN
4	Bantuan Rehab RTLH	6.125.000.000	3.859.376.000	APBN/DAK
5	Bantuan Keuangan Khusus (BKK) KUBE Graduasi PKH	450.000.000	-	APBD Propinsi
6	Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pembuatan Jamban	450.000.000	800.000.000	APBD Propinsi
7	Pengadaan alat bantu untuk Penyandang Disabilitas	-	107.500.000	DAK
8	Uang Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat	396.000.000	534.000.000	APBN
			138.000.000	APBD Kabupaten
9	Bantuan Kepala Keluarga Miskin Non Potensial	30.000.000	75.000.000	APBD Kabupaten
10	Bantuan Lanjut Usia Rentan Sosial Ekonomi	720.000.000	1.200.000.000	APBD Kabupaten
11	Bantuan Kebutuhan dasar Anak Panti	350.000.000	350.000.000	APBD Kabupaten
12	Bantuan Kelompok WRSE yang sudah terbentuk	40.000.000	40.000.000	APBD Kabupaten
13	Bantuan Kelompok WRSE baru	160.000.000	-	APBD Kabupaten

14	Bimbingan Lanjut KUBE	70.000.000	210.000.000	APBD Kabupaten
15	Jaring Pengaman Sosial	8.000.000.000	8.000.000.000	APBD Kabupaten
16	Bantuan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas	56.000.000	107.500.000	APBD Kabupaten
17	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	50.000.000	-	APBD Kabupaten
18	Pembayaran Premi BPJS bagi warga miskin, rentan miskin dan pekerja bukan penerima upah	30.019.140.000	45.924.084.000	APBD Kabupaten
19	Bantuan RTLH	9.000.000.000	1.489.543.000	APBD Kabupaten
20	Bantuan beasiswa pendidikan dasar dan retraining	2.500.000.000	2.500.000.000	APBD Kabupaten
		280.765.200.000	356.126.237.000	

BAB V

LOKASI PRIORITAS

Lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman dalam tahun 2021-2026 ditentukan dengan menyusun indeks dari sejumlah variabel untuk setiap kecamatan, selanjutnya dipilih sepuluh kecamatan dengan jumlah indeks terbesar. Variabel yang digunakan meliputi: jumlah keluarga miskin, tingkat pengangguran, rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup, daya beli, jumlah balita penderita gizi buruk, jumlah rumah tidak layak huni, jumlah keluarga yang belum memiliki jamban, dan penyakit kronis yang diderita warga.

Pada setiap variabel disajikan angka nominalnya. Selanjutnya angka nominal tersebut diberikan skor berdasar skala yang telah ditetapkan. Setiap variabel diberikan bobot tertentu. Penentuan indeks untuk variabel tersebut didapat dari hasil perkalian skor dengan bobot. Data selengkapnya mengenai indeks untuk masing-masing variabel disajikan dalam tabel 5.1.

Berdasar data pada tabel 5.1 dapat ditentukan sepuluh kecamatan / kapanewon dengan indeks tertinggi yang meliputi: Seyegan, Tempel, Turi, Sleman, Berbah, Minggir, Gamping, Cangkringan, Prambanan, dan Godean. Kesepuluh kapanewon itu merupakan lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan dalam tahun 2021-2026 secara generik.

Tabel 5. 1
Indeks Variabel Kemiskinan per Kecamatan

No	Kapanewon	Jumlah KK Miskin	Tingkat Pengang- guran	Rata-rata Lama Sekolah	Usia Harapan Hidup	Daya Beli	Jumlah Balita Gizi Buruk	RTLH	Belum Memiliki Jamban	Penyakit Kronis	Total Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Moyudan	1,00	0,40	0,30	0,15	0,25	0,20	0,10	0,15	0,05	2,60
2	Minggir	1,25	0,40	0,20	0,25	0,25	0,40	0,10	0,15	0,10	3,10
3	Seyegan	1,25	0,60	0,40	0,10	0,25	1,00	0,15	0,25	0,20	4,20
4	Godean	1,00	0,40	0,30	0,10	0,25	0,20	0,20	0,25	0,15	2,85
5	Gamping	0,75	0,40	0,30	0,10	0,25	0,80	0,10	0,10	0,25	3,05
6	Mlati	0,75	0,40	0,20	0,05	0,15	0,60	0,15	0,20	0,10	2,60
7	Depok	0,25	0,80	0,10	0,05	0,05	0,40	0,05	0,05	0,15	1,90
8	Berbah	1,00	0,60	0,30	0,20	0,25	0,60	0,05	0,10	0,05	3,15
9	Prambanan	1,25	0,20	0,50	0,25	0,25	0,40	0,05	0,05	0,05	3,00
10	Kalasan	0,75	0,60	0,20	0,05	0,25	0,40	0,05	0,25	0,05	2,60
11	Ngemplak	0,50	0,20	0,30	0,10	0,25	0,80	0,10	0,10	0,10	2,45
12	Ngaglik	0,50	0,60	0,10	0,10	0,15	0,40	0,10	0,15	0,10	2,20
13	Sleman	1,00	1,00	0,30	0,15	0,25	0,20	0,15	0,15	0,05	3,25
14	Tempel	1,25	0,20	0,50	0,15	0,25	0,20	0,25	0,25	0,25	3,30
15	Turi	1,25	0,20	0,40	0,20	0,25	0,60	0,15	0,10	0,15	3,30
16	Pakem	0,50	0,20	0,20	0,15	0,25	0,40	0,10	0,10	0,10	2,00
17	Cangkringan	1,00	0,60	0,50	0,15	0,25	0,20	0,05	0,25	0,05	3,05

BAB VI

PENUTUP

Tujuan utama penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman periode tahun 2021-2026 meliputi tiga hal, yaitu: meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi warga miskin, meningkatnya pendapatan keluarga miskin, dan anak dari keluarga miskin memperoleh pekerjaan formal. Sasaran-sasaran untuk tujuan pertama meliputi: meningkatnya peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), meningkatnya perlindungan sosial dan jaminan sosial, terwujudnya ketahanan keluarga, terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai, dan meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Sasaran-sasaran untuk tujuan kedua meliputi: meningkatnya kesejahteraan petani, meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan, dan berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Sedangkan sasaran-sasaran untuk tujuan ketiga meliputi: meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, meningkatnya kesempatan kerja, meningkatnya kualitas tenaga kerja, dan meningkatnya perlindungan terhadap inovasi daerah.

Rangkuman mengenai tujuan, sasaran, dan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman periode 2021-2026 disajikan dalam matriks 6.1 dan 6.2.

MATRIKS 6.1
MATRIKS TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021-2026

No	Tujuan	SASARAN								KEBIJAKAN								
		Sasaran	Indikator	Target														
				2021	2022	2023	2024	2025	2026									
1	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi warga miskin	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)	74,83	74,85	74,87	74,89	74,91	74,93	1. Penyediaan sarana prasarana dan SDM pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan								
		Meningkatnya peran aktif PSKS dalam penanggulangan kemiskinan	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif (%)	67,00	69	71	73	75	77	1. Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin 2. Peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi masyarakat miskin								
		Meningkatnya perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi penduduk Sleman	Cakupan PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial)/PPKS yang mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan sosial (%)	82,5	83	83,5	84	84,5	85	3. Pemberdayaan masyarakat miskin 4. Sinergi antara akademisi, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan swasta (TJSP/CSR) dalam program pengentasan kemiskinan								
		Terwujudnya ketahanan keluarga	Indeks ketahanan keluarga	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	3,30	1. Peningkatan kualitas keluarga 2. Pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera 3. Pengendalian pertumbuhan penduduk								
		Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar (%)	46,71	50,31	53,91	57,51	61,11	64,7	Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar secara merata di wilayah Kabupaten Sleman								
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani (%)	100	100	100	100	100	100	Peningkatan kesadaran, penguatan pencegahan dan kualitas perlindungan terhadap perempuan								
			Persentase anak korban kekerasan yang tertangani (%)	100	100	100	100	100	100	Peningkatan kesadaran, penguatan pencegahan dan kualitas perlindungan terhadap anak								
2	Meningkatnya pendapatan keluarga miskin	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	112,53	112,73	113,93	113,13	113,33	114,53	1. Peningkatan kapasitas petani 2. Peningkatan kualitas produksi pertanian, diversifikasi produk pertanian, optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian termasuk cadangan pangan yang mencukupi 3. Peningkatan jejaring distribusi pasca produksi dan pengawasan stabilitas harga produk pertanian								
										Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan	1) Persentase pertumbuhan nilai produksi industri (%)	2,00	2,10	2,30	2,40	2,5	2,60	Peningkatan kualitas dan kuantitas produk industri
											Persentase sarana dan prasarana perdagangan tradisional dikelola dengan baik (%)	9,30	11,63	13,95	16,28	18,6	20,93	Penguatan jejaring kelembagaan serta pemasaran hasil industri Peningkatan prasarana dan sarana perdagangan tradisional
		Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	Rasio pelaku usaha mikro	11	11	11	11	11	11	1. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk IKM, UKM dan Koperasi 2. Peningkatan perlindungan terhadap IKM,UKM dan Koperasi								
			Rasio keanggotaan koperasi	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	3. Pembinaan terhadap pelaku IKM, UKM dan Koperasi 4. Optimalisasi pemasaran produk daerah								
		Meningkatnya kapasitas SDM dan ruang ekonomi kreatif	Cakupan peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (%)	31,17	35,12	37,77	37,77	37,77	37,77	Penguatan sub sektor ekonomi kreatif yang mampu memperkuat pondasi perekonomian daerah								
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang mandiri dan berkelanjutan	Indeks desa membangun kategori desa mandiri (jumlah)	27	32	37	42	47	52	1. Pemberdayaan masyarakat kelurahan 2. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan dana desa bagi pembangunan desa								

No	Tujuan	SASARAN								KEBUAKAN
		Sasaran	Indikator	Target						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3	Anak keluarga miskin memperoleh pekerjaan formal	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata - rata lama sekolah (tahun)	10,92	10,93	10,94	10,95	10,96	11,06	1. Penyediaan sarana prasarana dan SDM pendidikan yang berkualitas dan terjangkau
			Angka Harapan lama sekolah (tahun)	16,75	16,77	16,79	16,81	16,83	16,85	2. Peningkatan kualitas layanan pendidikan
		Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan kerja (TKK) (%)	94,01	94,05	94,10	94,20	94,25	94,30	1. Peningkatan peluang kerja (kerjasama dengan lembaga penempatan kerja dan pasar kerja) 2. Peningkatan kualitas tenaga kerja
		Meningkatnya perlindungan terhadap inovasi daerah	Peresentase inovasi yang telah ditetapkan dengan keputusan dan atau peraturan lainnya (%)	58	58	59	60	61	62	Penguatan kualitas inovasi untuk peningkatan daya saing daerah

MATRIKS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN SLEMAN[illegible]

No	Tujuan	SASARAN		KEBIJAKAN	Program	Indikator Program	Satuan	Data Awal 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
		Sasaran	Indikator						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
									Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
		Terwujudnya Infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar (%)	penyediaan infrastruktur pelayanan dasar secara merata di wilayah Kabupaten Sleman	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan terhadap jumlah rumah tangga di seluruh kabupaten	%	19,33	20,15	26.152.181.500	20,95	24.447.798.650	21,75	25.469.261.319	22,55	26.220.764.653	23,35	27.022.718.730	24,15	27.878.115.795	Dinas PUPKP
					Program kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani terhadap total luas permukiman kumuh seluruh kabupaten	%	0	16,66	26.257.687.000	33,33	14.854.910.000	49,99	15.475.568.581	66,66	15.932.195.149	83,32	16.419.476.471	100,00	16.939.230.686	
					Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	61,49	98,32	10.323.287.750	98,73	12.488.596.767	99,14	13.010.387.525	99,55	13.394.275.753	99,96	13.803.935.585	100,00	14.240.895.541	Dinas LH
					Program pengelolaan persampahan	Persentase pengurangan sampah	%	22,53	22,53	12.684.546.285	22,54	13.681.486.963	22,55	14.253.118.315	22,57	14.673.674.914	22,58	15.122.464.779	22,60	15.601.162.430	
						Persentase penanganan sampah	%	33,58	33,58		33,86		34,16		34,45		34,75		35,04		
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani (%)		Peningkatan kesadaran, penguatan pencegahan dan kualitas perlindungan terhadap perempuan	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase lembaga PUG yang aktif	%	100	100,00	362.884.640	100,00	322.780.755	100,00	336.266.979	100,00	346.188.969	100,00	356.777.053	100,00	368.070.737	Dinas P3AP2KB
					Program perlindungan perempuan	Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan/ pendampingan perlindungan perempuan	lembaga	51	51,00	138.412.925	52,00	589.442.925	53,00	614.070.662	54,00	632.189.607	55,00	651.524.933	56,00	672.148.783	
		Persentase anak korban kekerasan yang tertangani (%)		Peningkatan kesadaran, penguatan pencegahan dan kualitas perlindungan terhadap anak	Program peningkatan kualitas keluarga	Persentase pemenuhan atas layanan UPTD PPA terhadap Korban Kekerasan	%	100	100,00	914.264.600	100,00	684.672.125	100,00	713.278.669	100,00	734.324.874	100,00	756.783.976	100,00	780.739.774	Dinas P3AP2KB
						Jumlah kelompok desa prima dan industri rumahan	desa prima dan industri rumahan	21 dan 20	25 dan 21		26 dan 28		27 dan 31		28 dan 34		29 dan 37		30 dan 40		
					Program perlindungan khusus anak	Persentase pemenuhan perlindungan khusus anak	%	46,67	46,67	91.066.150	53,33	139.084.650	53,33	144.895.798	53,33	149.171.135	53,33	153.733.489	60,00	158.599.882	
	Terwujudnya ketahanan keluarga	Indeks ketahanan keluarga		1. Peningkatan kualitas keluarga	1) Program pengendalian penduduk	Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita pada usia 15 - 49 tahun	tahun	24	23,00	70.691.938	23,10	62.241.938	23,20	64.842.492	23,30	66.755.753	23,40	68.797.457	23,50	70.975.223	Dinas P3AP2KB
				2. Pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera	2) Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate / mCPR)	%	77,34	76,70	4.493.961.602	76,80	4.761.161.602	76,90	4.960.089.485	77,00	5.106.443.309	77,10	5.262.622.318	77,20	5.429.209.245	
						Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	39,08	38,10		39,12		39,15		39,17		39,20		39,22		
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)	%	7,95	7,95		7,92		7,90		7,88		7,86		7,84		

No	Tujuan	SASARAN		KEBIJAKAN	Program	Indikator Program	Satuan	Data Awal 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
		Sasaran	Indikator						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
									Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
				3. Pengendalian pertumbuhan penduduk	3) Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Persentase jumlah poktan (kelompok kegiatan) yang mendukung program Bangga Kencana	%	80	80,00	1.138.532.580	82,00	1.026.032.580	84,00	1.068.901.633	86,00	1.100.440.951	88,00	1.134.097.602	90,00	1.169.997.164	
2	Meningkatnya pendapatan warga miskin	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	Peningkatan kapasitas petani	Program penyuluhan pertanian	Peningkatan kinerja penyuluh pertanian sesuai tugas dan fungsinya	%	2	2,00	2.026.731.883	2,00	4.196.338.800	2,00	4.371.667.610	2,00	4.500.659.289	2,00	4.638.310.578	2,00	4.785.135.081	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
						Persentase peningkatan kelompok yang menerapkan SOP cara-cara penanganan/pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan	%	5	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
						Kelembagaan petani dengan klasifikasi kelas lanjut	kelompok	24	16		16		16		16		33		36		
						Jumlah wirausaha muda pertanian	orang	200	200		200		200		200		200		200		
				Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk pertanian, serta optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Jumlah KWT pengelola pemanfaatan pekarangan	kelompok	2	2	944.146.750	3	3.311.995.750	4	3.450.375.490	4	3.552.183.259	5	3.660.825.699	5	3.776.708.175	
						Jumah Toko Mitra Tani	unit	1	1		2		2		2		2		2		
						Cadangan pangan pemerintah daerah	ton	15	15		15		15		15		15		15		
				Peningkatan jejaring distribusi pasca produksi dan pengawasan stabilitas harga produk pertanian	Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Jumlah lumbung pangan masyarakat yang aktif	unit	30	31	51.255.000	32	50.000.000	33	52.089.069	34	53.626.024	35	55.266.159	36	57.015.595	
					Penanganan kerawanan pangan	Penanganan daerah rawan pangan / waspada pangan	kalurahan	3	3	97.512.000	3	70.000.000	3	72.924.696	3	75.076.433	3	77.372.623	3	79.821.833	
				Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk pertanian, serta optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian	Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	NA	0,30	3.607.254.895	0,30	5.241.765.000	0,30	5.460.773.155	0,30	5.621.900.295	0,30	5.793.844.398	0,30	5.977.247.021	
						Peningkatan produksi tanaman hortikultura	%	NA	0,50		0,50		0,50		0,50		0,50		0,50		
						Peningkatan produksi tanaman perkebunan	%	NA	0,30		0,30		0,30		0,30		0,30		0,30		
						Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	NA	0,28		0,28		0,28		0,29		0,30		0,30		
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah kelompok tani hortikultura dan perkebunan yang menerima bantuan alat	Jumlah kelompok tani hortikultura dan perkebunan yang menerima bantuan alat	kelompok	26	15	3.562.651.402	15	3.919.175.975	15	4.082.924.540	15	4.203.396.483	15	4.331.956.081	15	4.469.083.013	
						Jumlah kelompok tani tanaman pangan yang menerima bantuan alat	kelompok	5	5		5		5		5		5		5		
						Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan dan Perikanan (BP4) dengan klasifikasi kelas madya	balai	1	2		3		4		5		6		7		

No	Tujuan	SASARAN		KEBIJAKAN	Program	Indikator Program	Satuan	Data Awal 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah	
		Sasaran	Indikator						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
									Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
		Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri (%)	Peningkatan kualitas dan kuantitas produk industri	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase sentra industri aktif	%	77	77	1.197.742.454	82	2.264.212.991	87	2.358.814.925	92	2.428.414.796	97	2.502.687.120	100	2.581.909.024	Dinas Perindag	
			Persentase sarana dan prasarana perdagangan tradisional dikelola dengan baik (%)	1.Penguatan jejaring kelembagaan serta pemasaran hasil industri	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Rasio sarana prasarana perdagangan tradisional dalam kondisi baik	Rasio	0,8605	0,86	7.917.622.187	0,88	3.476.474.468	0,88	3.621.726.355	0,88	3.728.590.052	0,91	3.842.627.840	0,91	3.964.265.215		
						Jumlah kejadian gangguan keamanan yang terjadi di sarana prasarana perdagangan tradisional	kejadian	NA	5		5		5		5		5		5			
						Rasio sarana prasarana perdagangan tradisional yang menerapkan pengelolaan sampah	Rasio	4,65	9,30		11,63		13,95		16,28		18,60		20,93			
				2.peningkatan prasarana dan sarana perdagangan tradisional		Cakupan pembinaan pedagang pasar dan sarana usaha milik pemerintah Kabupaten Sleman	%	4,49	2,07		2,76		2,76		2,76		2,76		2,76			
					Jumlah sarana dan prasarana perdagangan tradisional tertata	pasar	13	14		15		16		17		18		20				
		Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	Rasio pelaku usaha mikro	1. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk IKM, UKM dan Koperasi	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat	%	15,9	19,10	743.647.655	22,31	813.544.665	25,51	847.535.681	28,71	872.543.312	31,91	899.229.782	35,11	927.694.665	Dinas Koperasi dan UKM	
			Rasio keanggotaan koperasi	2. Peningkatan perlindungan terhadap IKM,UKM dan Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	%	-23,46	1,70	771.491.600	1,70	477.019.172	1,70	496.949.689	1,70	511.612.830	1,70	527.260.352	1,70	543.950.640		
				3. Pembinaan terhadap pelaku IKM, UKM dan Koperasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro baru yang berizin	pelaku usaha	1000	1.000	1.512.997.994	500	3.519.109.964	500	3.666.143.221	500	3.774.317.495	500	3.889.753.842	500	4.012.882.979		
				4. Optimalisasi pemasaran produk daerah	Program Pengembangan UMKM	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	usaha mikro	10	10	510.395.300	10	835.110.947	10	870.003.032	10	895.673.591	10	923.067.494	10	952.286.953		
		Meningkatnya kapasitas SDM dan ruang ekonomi kreatif	Cakupan peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (%)	Penguatan sub sektor ekonomi kreatif yang mampu memperkuat pondasi perekonomian daerah	Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Cakupan kelompok usaha pariwisata yang dibina	kelompok UJP	11	6	2.639.630.463	8	2.534.102.566	8	2.639.980.858	8	2.717.876.891	8	2.801.002.326	8	2.889.667.319	Dinas Pariwisata	
						Cakupan kelompok desa wisata/destinasi wisata yang dibina	kelompok desa/destinasi wisata	20	20		25		25		30		30		30			
						Cakupan komunitas ekonomi kreatif yang difasilitasi dalam aktivitas pariwisata	komunitas ekraf	3	4		4		4		4		4		4			
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang mandiri dan berkelanjutan	Indeks desa membangun kategori desa mandiri (jumlah)	Pemberdayaan masyarakat kelurahan	Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase pengembalian pinjaman PNPB mandiri perdesaan pasca program lancar	%	57	60,00		63,00		65,00		68,00		70,00		72,00			
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang mandiri dan berkelanjutan	Indeks desa membangun kategori desa mandiri (jumlah)	Peningkatan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan dana bagi pembangunan desa	3) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	NA	30,00	3.673.493.705	30,00	3.643.475.316	35,00	3.795.704.728	40,00	3.907.701.881	45,00	4.027.217.750	50,00	4.154.698.270	Kapanewon	

No	Tujuan	SASARAN		KEBIJAKAN	Program	Indikator Program	Satuan	Data Awal 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
		Sasaran	Indikator						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
									Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
3	Anak dari keluarga miskin memperoleh pekerjaan formal	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1.Angka rata-rata lama sekolah (tahun); 2.Angka Harapan lama sekolah (tahun)	Penyediaan sarana prasarana dan SDM pendidikan yang berkualitas dan terjangkau Peningkatan kualitas layanan pendidikan	Program Pengelolaan pendidikan	Persentase satuan pendidikan PAUD terakreditasi A	%	32,77	32,77	243.417.003.140	32,77	190.594.483.968	32,77	198.557.783.779	33,98	204.416.486.728	33,98	210.668.502.530	33,98	217.337.158.656	Disdik
						Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi A	%	69,53	69,53		69,53		69,53		69,53		69,53		69,53		
						Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi A	%	82,08	82,08		82,08		82,08		82,08		82,08		82,08		
						Persentase satuan pendidikan non formal dan kesetaraan yang penyelenggaraannya sudah berizin	%	93,72	93,89		94,06		94,23		94,23		94,40		94,40		
						Persentase sarpras PAUD, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan dalam kondisi baik	%	69,1	69,36		69,36		69,40		69,40		69,44		69,44		
	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan kerja (TKK) (%)	Peningkatan peluang kerja (kerjasama dengan lembaga penempatan kerja dan pasar kerja)	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase peserta yang mendapatkan pekerjaan pasca pelatihan	%	43,88	25,00	2.669.823.000	26,00	5.343.854.108	27,00	5.539.292.048	28,00	5.702.735.989	29,00	5.877.152.427	30,00	6.063.192.143	Disnaker	
			Peningkatan kualitas tenaga kerja	Program penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (di dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	%	68,09	60,00	2.930.898.000	60,00	3.056.064.640	63,17	3.183.751.226	63,13	3.277.691.903	65,23	3.377.939.109	65,15	3.484.866.884		
	Meningkatnya perlindungan terhadap inovasi daerah	Peresentase inovasi yang telah ditetapkan dengan keputusan dan atau peraturan lainnya (%)	Penguatan kualitas inovasi untuk peningkatan daya saing daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	%	25	25,00	334.218.440	25,00	441.119.000	25,00	459.549.559	25,00	473.109.160	25,00	487.579.059	25,00	503.013.246	Bappeda	

